



Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
Telp. (62 21) 29817317, 29817311
Fax. (62 21) 3864884
www.bi.go.id
Email: humasbi@bi.go.id



Laporan Tahunan **2012** *Annual Report*

Menjaga Keseimbangan,
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkelanjutan dan Inklusif

Maintaining Balance, Supporting Sustainable and Inclusive Economic Growth

Menjaga Keseimbangan, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi Indonesia selama 2012 tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya kondusif. Indonesia menjadi satu dari sedikit negara yang ekonominya tetap tumbuh tinggi, dengan inflasi yang rendah, dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Selain itu, kinerja perbankan di Indonesia makin optimal, yang tercermin pada meningkatnya efisiensi dan intermediasi serta daya tahan perbankan yang kuat. Peran sistem pembayaran yang handal, aman, dan efisien juga turut mendukung kegiatan ekonomi Indonesia.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia yang secara terukur menempuh berbagai kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Berbagai kebijakan diarahkan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, antara lain melalui berbagai program pada industri perbankan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat pemberdayaan sektor riil serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Efektivitas kebijakan Bank Indonesia tentunya tidak terlepas dari jalinan kerjasama yang solid dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain, termasuk dukungan dari publik.

Guna mendukung berbagai kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh berbagai strategi penguatan internal, termasuk menyiapkan penataan ulang organisasi dan kerangka kerja pendukungnya. Bank Indonesia juga menyiapkan pengalihan tugas pengawasan bank ke lembaga yang baru yakni Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan pencapaian kinerja yang dilandasi dengan penerapan tata kelola organisasi yang baik secara konsisten.

Maintaining Balance, Supporting Sustainable and Inclusive Economic Growth

The economy of Indonesia was robustly maintained throughout 2012 amid unpropitious global economic conditions. Indonesia remained among a handful of countries that achieved solid economic growth, coupled with low inflation and a stable exchange rate. In addition, bank performance in Indonesia continued to improve, as reflected by gains in efficiency and intermediation as well as sound banking resilience. A payment system that is reliable, secure and efficient also helped bolster economic activity in Indonesia.

Such conditions are inextricably linked to Bank Indonesia support in the form of measured banking, monetary and payment system policy. The range of policies are directed towards expediting the creation of sustainable and inclusive economic growth, among others, through a variety of programs in the banking industry that reach all strata of society - real sector empowerment- as well as micro, small and medium enterprises. The efficacy of Bank Indonesia policy is due in part to a solid network of cooperation with the government and other stakeholders, including support from the general public.

Bank Indonesia executes an array of internal strengthening strategies, including preparations for reorganisation and supporting frameworks in order to buttress the policies instituted. Bank Indonesia has also undertaken preparations to transfer the function of banking supervision to a new institution, namely the Financial Services Authority (FSA). The collection of aforementioned endeavours was undertaken while still prioritising the achievement of sound performance based on consistent good governance.

Daftar Isi

Table of Content

PENGANTAR GUBERNUR	09	FOREWORD BY THE GOVERNOR
TENTANG BANK INDONESIA	12	ABOUT BANK INDONESIA
Status, Tujuan dan Tugas	13	<i>Status, Objective and Tasks</i>
Misi, Visi, dan Nilai Strategis	14	<i>Mission, Vision and Strategic Values</i>
Sekilas Perjalanan	16	<i>Brief History</i>
Profil Dewan Gubernur	20	<i>Profile of the Board of Governors</i>
Rangkaian Peristiwa 2012	24	<i>2012 Events Highlight</i>
Kebijakan Strategis 2012	26	<i>Strategic Policies in 2012</i>
Struktur Organisasi	28	<i>The Organisational Structure of Bank Indonesia</i>
Peta Wilayah Kerja Bank Indonesia	30	<i>The Map of Working Area of Bank Indonesia</i>
TATA KELOLA BANK INDONESIA	33	BANK INDONESIA GOVERNANCE
Dewan Gubernur	34	<i>Board of Governors</i>
Badan Supervisi Bank Indonesia	34	<i>Bank Indonesia Supervision Body</i>
Rapat Dewan Gubernur	35	<i>Board of Governors' Meeting</i>
Komite	36	<i>Committees</i>
Manajemen Strategis	37	<i>Strategic Management</i>
Manajemen Risiko	37	<i>Risk Management</i>
Audit Internal	39	<i>Internal Audit</i>
Hubungan dengan Pemerintah	39	<i>Relationship with the Government</i>
Hubungan dengan Parlemen	40	<i>Relationship with the Parliament</i>
Pedoman Perilaku Bank Indonesia	41	<i>Bank Indonesia Code of Conduct</i>
KINERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS	43	BANK INDONESIA PERFORMANCE AND TASK IMPLEMENTATION
BANK INDONESIA		
Pencapaian Strategis 2012	44	<i>Strategic Achievements in 2012</i>
Kegiatan Strategis	49	<i>Strategic Activities</i>
- Bauran Kebijakan Moneter yang Efektif	49	- <i>An Effective Monetary Policy Mix</i>
Boks: Jurus Mengendalikan Inflasi Daerah	52	<i>Box: Controlling Regional Inflation</i>
- Kebijakan Perbankan yang Efektif	55	- <i>Effective Banking Policy</i>
Boks: Meningkatkan Daya Saing BPR Melalui Pengembangan Sistem Transfer Kredit Elektronik APEX BPR	59	<i>Box: Enhancing the Competitiveness of Rural Banks Through The Development an Electronic Credit Transfer System APEX Banks</i>
- Sistem Pembayaran yang Aman dan Efisien	61	- <i>Secure and Efficient Payment System</i>
Boks: Melayani Hingga ke Pelosok Negeri	66	<i>Box: Serving Up All Over the Country</i>
- Pengembangan Sektor Riil & UMKM	69	- <i>MSMEs Real Sector and Development</i>
Boks: Mengolah Potensi Daerah	72	<i>Box: Cultivating Local Potential</i>
- Kerjasama Internasional	77	- <i>International Cooperation</i>
- Pengelolaan Organisasi	81	- <i>Organisational Management</i>
BANK INDONESIA DAN PUBLIK	87	BANK INDONESIA AND PUBLIC
Komunikasi dan Edukasi Publik	89	• <i>Public Education and Communication</i>
Program Sosial Bank Indonesia	91	• <i>Bank Indonesia Social Programs</i>
Boks: Desa Wisata: Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Kearifan Budaya	93	<i>Box: Tourist Villages: Community Economic Development Through Cultural Wisdom</i>
OUTLOOK DAN STRATEGI KE DEPAN	97	OUTLOOK AND STRATEGY LOOKING AHEAD
Outlook Perekonomian	98	• <i>Economic Outlook</i>
Strategi ke Depan	99	• <i>Strategy Looking Ahead</i>
Daftar Singkatan	102	• <i>List of Abbreviations</i>
LAPORAN KEUANGAN	105	FINANCIAL REPORT

Inflasi IHK tercatat rendah yakni
Headline inflation recorded low at

4,3%

atau **masih dalam rentang target inflasi 2012** sebesar **or still in the range 2012 of the inflation target**

4,5% ± 1%

Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia terjaga dengan Indeks akhir 2012 sebesar 1,62, lebih baik dari target maksimal 2,00.
Indonesia financial system stability was preserved with an index at yearend 2012 of 1.62, better than the maximum threshold of 2.00

CAR industri perbankan tercatat sebesar 17,16% pada akhir tahun, jauh di atas batas minimal aturan sebesar 8%.
CAR in the banking industry was 17.16% at the end of the reporting year, well above the minimum requirement of 8%.

Efisiensi perbankan semakin membaik, sehingga suku bunga dasar kredit semakin turun. Dalam setahun terakhir, rata-rata suku bunga dasar kredit turun hingga
Banking efficiency improved, thereby lowering prime lending rates. In the past year, the average prime lending rate declined by

68
bps

Ekonomi tumbuh 6,2%, lebih tinggi dari rata-rata delapan tahun terakhir sebesar
Economic growth was 6.2%, surpassing the average for the past eight years at

6,2%
Per tahun
per annum

Rata-rata volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD dapat terjaga pada level 4,34%, lebih rendah dibandingkan 2011 sebesar 6,06%
Average rupiah exchange rate volatility against the US dollar was maintained at a level of 4.34%, lower than that posted in 2011 at 6.06%.

Kredit perbankan tumbuh
Bank credit grew by

23,1%

didominasi penyaluran kredit pada sektor produktif. Kualitas kredit terjaga baik dengan
dominated by credit allocated to productive sectors. The quality of credit was maintained with

NPL gross yang sangat rendah yakni 1,87%
gross NPL at the very low level of 1.87%

level terendah dalam sejarah perbankan nasional.
its lowest level in the history of national banking.

Transaksi pembayaran terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi. Nilai transaksi sistem pembayaran mencapai Rp104,8 ribu triliun, dengan volume 3,3 miliar transaksi. Seluruh transaksi dapat berjalan dengan aman dan lancar, didukung **tingkat penyelesaian transaksi** melalui BI-RTGS dan BI-SSSS pada hari yang sama mencapai **99,77%** dan **tingkat ketersediaan** BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI mencapai **100%**.
Payment transactions continued to increase in line with the proliferation of economic activity. The value of transactions in the payment system reached Rp104.8 thousand trillion, with a volume of 3.3 billion transactions. All transactions were settled smoothly and securely, underpinned by a level of same-day transaction settlement through BI-RTGS and BI-SSSS of 99.77% and a level of availability for BI-RTGS, BI-SSSS and the national clearing system of 100%.

Tema Laporan Tahunan

Annual Report Theme



05:00 WIB

Seiring merekahnya fajar, detak jantung perekonomian Indonesia mulai berdenyut. Geliat di sektor riil mengawali bergulirnya roda pertukaran barang dan jasa, mulai dari tingkat rumah tangga hingga korporasi. Menjadi tugas Bank Indonesia untuk mengawal kelancaran aktivitas ekonomi Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia berperan sebagai pelumas untuk tetap bertumbuhnya ekonomi yang inklusif, sekaligus membangun pondasi yang kuat untuk mengawal kesinambungan.

As dawn goes down to day, the rhythm of Indonesian economy starts to throb. The vibrant of real sector embarks the scrolling wheel exchange of goods and services embracing household level up to corporation level. It is the duty of Bank Indonesia to escort the smoothness of Indonesian economy. Bank Indonesia's policies act as lubricant to keep economic growth inclusively, as well as to build a strong and resilient foundation for sustainable economy.



08:30 WIB

Menyeruak pagi, geliat ekonomi semakin menampakkan wujudnya. Kepercayaan terhadap kondisi perekonomian yang berjalan dalam arah yang tepat, menciptakan optimisme tetap terjaganya situasi perekonomian Indonesia. Melalui wewenangnya, Bank Indonesia menjaga agar kepercayaan para pelaku ekonomi tetap terjaga. Kredibilitas kebijakan dan tata kelola organisasi yang baik menjadi kunci untuk meraih kepercayaan.

The morning burst reveals dynamic of economy. Confidence that the economy is running on right direction creates optimism toward the Indonesian economy. Through its authority, Bank Indonesia maintains confidence on sustained level. Policy credibility and good corporate governance are the keys to gain the confidence.



14:30 WIB

Menyongsong teriknya matahari, terpapar hambatan dan rintangan. Namun, tidak ada sukses yang diraih tanpa perjuangan. Menciptakan keseimbangan perekonomian Indonesia bukanlah tanpa tantangan. Namun, kesungguhan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk publik, membantu memastikan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia turut berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

The heat of sunray unveils obstacles and impediments. However, no success without struggle. Creating a balanced economy is not without challenges. Nevertheless, sincerity and good coordination with the various stakeholders including public help to ensure that measures taken by Bank Indonesia contribute to the welfare of society.



20:35 WIB

Terbenamnya matahari tidak menyurutkan geliat aktivitas perekonomian, dengan dunia yang semakin tanpa batas. Semakin terhubungnya perekonomian Indonesia dengan negara lain menciptakan peluang sekaligus tantangan. Menghadapi situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian, Bank Indonesia mempersiapkan diri dengan strategi masa depan, agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sehingga tetap mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

The sunset does not fade away the dynamic of economic activity in the borderless world. The increasing relation between Indonesian economy with other countries creates opportunities as well as challenges. As the global economy remains uncertain, Bank Indonesia prepares its readiness with the future strategy. The aim is to adapt with new environment so that it remains able to fulfill its duties and responsibilities.

Pengantar Gubernur

Foreword by the Governor

Menjaga Keseimbangan, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

*Maintaining Balance, Supporting Sustainable and Inclusive
Economic Growth*

Tahun 2012 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus pelajaran. Saya melihat nuansa optimisme sempat tumbuh di awal 2012 saat Indonesia kembali disejajarkan oleh Fitch dan Moody's sebagai negara dengan predikat layak investasi (*investment grade*). Pada saat yang sama ekonomi AS juga mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Namun ketika sampai di pertengahan tahun 2012, saya akhirnya menyadari bahwa krisis global ternyata belum sampai di ujungnya. Luasnya dimensi permasalahan krisis Eropa masih menimbulkan dampak global yang luar biasa.

The past year of 2012 was replete with arduous challenges and valuable lessons. I felt the nuance of optimism grow at the beginning of 2012 when Indonesia's status was reaffirmed by Fitch and Moody's as investment grade. Concomitantly, the US economy began to show signs of resurgence. Nonetheless, upon entering the middle of the reporting year, I finally realised that the end of the global financial crisis was still not in sight. The broad dimension of the crisis in Europe was still producing extraordinary global effects.

Pengantar Gubernur

Foreword by the Governor

Sejak pertengahan 2012, perekonomian China sebagai tujuan utama ekspor kita terkena imbas dan tampak kehilangan tenaga. Harga beberapa komoditas ekspor andalan kita pun terus merosot. Indonesia pada akhirnya tidak hanya terkena dampak krisis Eropa melalui jalur investasi, tetapi juga melalui jalur perdagangan. Di tengah tingginya impor, saya menyadari bahwa kondisi global yang memburuk semakin memperbesar defisit transaksi berjalan.

Di pihak lain, sejak awal 2012, polemik kebijakan kenaikan harga BBM yang berkepanjangan sudah terlanjur memicu ekspektasi inflasi. Memburuknya kinerja neraca pembayaran dan menguatnya ekspektasi inflasi sempat menggerus keyakinan pasar dan pelaku ekonomi. Di tengah besarnya kebutuhan devisa untuk impor minyak, bahan baku dan barang modal, ekonomi kita menghadapi kelangkaan pasokan devisa dan tekanan terhadap rupiah.

Bank Indonesia memang tidak dapat mengubah arah pergerakan nilai tukar, tetapi tetap dapat menjaga volatilitasnya. Oleh karenanya, melemahnya nilai tukar rupiah selama tahun 2012 adalah merupakan konsekuensi fundamental dari defisit transaksi berjalan yang cukup besar. Sebagai bagian dari respons kebijakan, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan kewajiban pelaporan devisa hasil ekspor (DHE) pada awal 2012, yang diikuti dengan pengaturan layanan bisnis penitipan dengan pengelolaan (*trustee*).

Di sektor keuangan, ketentuan untuk mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SBDK) juga diperkuat. Masalah heterogenitas dan dominasi kepemilikan asing kita coba atasi dengan kebijakan perijinan jamak (*multi-licensing*) dan kebijakan pembatasan kepemilikan bank. Untuk memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat kecil produktif dan UMKM, diluncurkan ketentuan yang mewajibkan bank mengalokasikan 20% portofolio kreditnya untuk kredit UMKM.

Sebagai bagian dari program besar keuangan inklusif, telah dikeluarkan ketentuan mengenai perbankan non-cabang (*branchless banking*), dimana bank cukup bekerjasama dengan badan usaha tertentu yang disebut agen untuk

Since the middle of 2012, the economy of China, as a key export destination of Indonesia, has begun to feel the adverse effects of the crisis and has appeared to lose steam. Furthermore, the prices of several of our mainstay exports began to slide. Ultimately, Indonesia has not only been struck by the crisis in Europe through the investment channel but also through the trade channel. Amid strong imports, I recognise that a further deterioration in global conditions would exacerbate the current account deficit.

On the other hand, since the beginning of 2012, the delayed and controversial policy to hike fuel prices has already sparked inflationary expectations. Weaker performance in terms of the balance of payments and stronger inflationary expectations eroded market confidence and that of economic agents. In the midst of strong demand for foreign exchange to import oil, raw materials and capital goods, our economy suffered from an insufficient supply of foreign exchange and depreciatory pressures on the rupiah.

Bank Indonesia cannot alter the direction of shifts in the rupiah exchange rate but can still try to control its volatility. Accordingly, rupiah depreciation during 2012 was a fundamental consequence of the sufficiently large current account deficit. As part of its policy response, Bank Indonesia issued regulations to control foreign exchange proceeds from exports (DHE) at the beginning of 2012, followed by other provisions to regulate trust management at commercial banks.

In the financial sector, regulations requiring the publication of prime lending rates were expanded. We endeavoured to overcome the problems of heterogeneity and foreign ownership through multi-licensing policy and policy to restrict bank ownership. Regulations were also promulgated requiring banks to allocate 20% of their credit portfolio to MSME credit in order to facilitate financing to the real sector and MSMEs.

As part of the larger financial inclusion program, regulations were issued concerning branchless banking, where banks cooperate with specific agents to extend their outreach to remote areas without the need to open

Kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi, bahkan di akhir 2012 muncul penilaian sebagai yang paling stabil di dunia dalam lima tahun terakhir. Disamping itu, pada 2012 inflasi juga terkendali serta berada pada rentang target yang ditetapkan.

We are grateful that economic expansion in Indonesia has remained robust, with growth at yearend 2012 the most stable it has been in the past five years. Additionally, inflation was brought under control in 2012 and maintained within the inflation corridor set.

dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berada di pelosok, tanpa harus membuka cabang baru. Mekanisme ini akan melengkapi sisi lain keuangan inklusif yang memanfaatkan telepon genggam serta jaringan telekomunikasi untuk pengiriman uang (*electronic money*).

Upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan interkoneksi jasa pembayaran juga membuahkan sejumlah hasil yang signifikan, bahkan bersejarah. Pada 2012 telah berhasil dihubungkan jaringan ATM BCA dan Mandiri. Ini merupakan salah satu inovasi terbesar dalam sistem pembayaran Indonesia, karena nasabah kedua bank yang jumlahnya sangat besar, menjadi sangat dimudahkan, disamping memang terjadi kenaikan transaksi yang sangat signifikan sebagai dampaknya.

Di tengah segala tantangan yang cukup signifikan, kerja keras Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, stabilitas keuangan dan sistem pembayaran tampaknya membuahkan hasil. Kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap tinggi, bahkan di akhir 2012 muncul penilaian sebagai yang paling stabil di dunia dalam lima tahun terakhir. Disamping itu, pada 2012 inflasi juga terkendali serta berada pada rentang target yang ditetapkan.

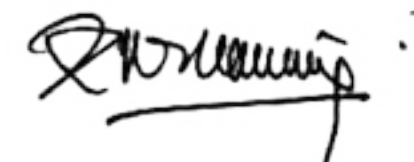
Kita juga patut bersyukur bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ditemukan gejolak di sektor keuangan yang berlebihan. Sistem pembayaran nasional juga sejauh ini berlangsung dengan cepat, aman dan handal. Sejumlah terobosan yang inovatif, terutama dalam area keuangan inklusif, telah berhasil dilakukan. Kesemuanya itu sejalan dengan keinginan awal, bahwa kebijakan-kebijakan yang ditelurkan Bank Indonesia, tidaklah “menggantung” di awan, tetapi harus “membumi.”

additional branches. This mechanism complements another side of financial inclusion that utilises cellular telephone technology as well as telecommunications networks to transfer money (electronic money).

Bank Indonesia's efforts to expand the interconnectedness of financial services also produced a number of significant, even historic, results. In 2012 the ATM networks of BCA and Mandiri were connected. This is the largest single innovation in the payment system of Indonesia because now the numerous customers of both banks can conveniently engage in payment system services, the effect being a significant jump in transactions.

Amid the panoply of arduous challenges faced, the hard work and diligence of Bank Indonesia in terms of maintaining macroeconomic stability, financial system stability and a reliable, secure and efficient payment system have come to fruition. We are grateful that economic expansion in Indonesia has remained robust, with growth at yearend 2012 the most stable it has been in the past five years. Additionally, inflation was brought under control in 2012 and maintained within the inflation corridor set.

We are also genuinely thankful that no excessive shocks befell the financial sector in 2012. Furthermore, the national payment system has continued to operate quickly, securely and reliably. A number of innovative breakthroughs, particularly in the area of financial inclusion, have been successful. Everything that has been achieved hitherto is in harmony with our initial wishes, that the policies instituted by Bank Indonesia are not hung up in the clouds but remain firmly grounded in our shared reality.



Darmin Nasution
Gubernur | Governor

Tentang Bank Indonesia

About Bank Indonesia



Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Kedudukan bank sentral merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang mengemban tugas untuk menjaga kestabilan sistem moneter di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan di bidang perbankan dan sistem pembayaran. Disahkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011 membuka babak baru sejarah keberadaan Bank Indonesia. Tugas pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Meskipun demikian, melalui kewenangannya Bank Indonesia tetap berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia

Bank Indonesia is the central bank of the Republic of Indonesia. The position of the central bank is mandated in the 1945 Constitution as a state institution tasked with maintaining monetary system stability in Indonesia. Furthermore, Bank Indonesia also performs a regulatory and supervisory function for the banking and payment systems. Notwithstanding, the recent Financial Services Authority Act of 2011 opens a new chapter in the history of Bank Indonesia. The function of banking supervision, previously overseen by Bank Indonesia, will be transferred to the Financial Services Authority on 31st December 2013. Nonetheless, in accordance with its authority, Bank Indonesia will continue to contribute to maintaining financial system stability in Indonesia.

Status, Tujuan dan Tugas

Status, Objective and Tasks

Status

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Tujuan

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Tugas

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia¹ dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan², tugas pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan dilakukan oleh OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dengan beralihnya tugas pengawasan bank tersebut, ke depan Bank Indonesia akan fokus menangani tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial guna mendukung terjaminnya stabilitas sistem keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Status

Bank Indonesia is the central bank of the Republic of Indonesia and represents a legal entity that is duly authorised to perform legal acts. As a legal public entity, Bank Indonesia has the power to establish regulations as an execution of the Law that legally binds the public within the limits of its task and authority. As a legal civil entity, Bank Indonesia may act for and on behalf of itself both within and outside of the court of law.

Objective

Bank Indonesia has the overarching objective to achieve and maintain rupiah stability, which is measured by rupiah stability against goods and services, reflected by inflation, and rupiah stability against other currencies. To achieve this goal, Bank Indonesia implements monetary policy in a sustainable, consistent and transparent manner, while paying due regard to the government's holistic economic policy.

Tasks

Bank Indonesia assumes three core purposes in order to achieve the goals set as follows:

To formulate and implement monetary policy;

To regulate and maintain an effective payment system; and

To regulate and supervise banks.

Pursuant to the mandate stipulated in the Bank Indonesia Act¹ and the Financial Services Authority Act², the banking regulation and supervision function previously implemented by Bank Indonesia will be transferred to the Financial Services Authority on 31st December 2013. Consequently, looking ahead Bank Indonesia will focus on macroprudential supervision and regulation in order to help maintain financial system stability.

1. Act No. 23, 1999, concerning Bank Indonesia, most recently amended by Act No. 6, 2009.
2. Act No. 21, 2011, concerning the Financial Services Authority.

Misi, Visi dan Nilai-Nilai Strategis

Mission, Vision and Strategic Values

Misi

Mission

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

To create and maintain rupiah stability by achieving monetary stability and promoting financial system stability towards Indonesia's long-term sustainable development.

Visi

Vision

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

To be recognised, domestically and internationally, as a credible central bank through the strength of our strategic values and the achievement of a low and stable inflation rate.

Nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

*Bank Indonesia
Organization Strategic
Values*

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia dalam menjalankan operasionalnya, dengan mengedepankan manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku baik. Nilai-nilai strategis itu, yang terdiri atas "Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan".

The values that serve as the foundation of Bank Indonesia, by advocating its management and staff to conduct themselves in an appropriate manner, comprise of "Competence, Integrity, Transparency, Accountability and Cohesiveness".



Sekilas Perjalanan

Brief History



1828

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. (DJB) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. Bank tersebut berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

The history of Bank Indonesia begins with the establishment of De Javasche Bank N.V. (DJB) by the Government of the Dutch East Indies in 1828. That bank functioned as a circulation bank tasked with printing and circulating money.

1953

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan proses nasionalisasi terhadap DJB. Pada 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya, pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953 bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

DJB was nationalised after Indonesia gained independence. On 15th December 1951, laws concerning the nationalisation of DJB were announced. Thereafter, on 29th May 1953 the President enacted the Principle Act on Bank Indonesia and since 1st July 1953, Indonesia citizens have enjoyed a central bank known as Bank Indonesia. Act No 11, 1953, concerning the application of the Principle Act on Bank Indonesia stipulated the core tasks of Bank Indonesia, namely maintaining rupiah stability, circulating money in Indonesia, advancing the development of credit and banks as well as the supervision of credit.

1968

Pada tahun 1968 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia. Melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, diatur mengenai kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam Undang-Undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia juga memiliki fungsi yang lain yakni sebagai pemegang kas pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah, dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat hutang negara.

The Bank Indonesia Act was amended in 1968. Through Act No. 13, 1968, concerning the central bank, the position and tasks of Bank Indonesia as the central bank were regulated and distinct from other banks operating commercially. In that Act, in addition to detailing the three core purposes of the central bank, Bank Indonesia was also tasked with assisting the government as an agent of development by promoting real sector production and advancement as well as expanding employment opportunities to ameliorate public welfare. Bank Indonesia also functions as the government's payment agent and is required to assist the government place government bonds.

1999

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

The year of 1999 represented a new chapter in the history of Bank Indonesia. The Bank Indonesia Act was amended again, this time by Act No. 23, 1999, concerning Bank Indonesia. The new law positioned Bank Indonesia as a state institution that performs its tasks and holds authority independently from the government. In addition, the law established the single objective of Bank Indonesia, namely to achieve and maintain rupiah stability.

2004

Kedudukan Bank Indonesia kembali diperkuat melalui amandemen Undang Undang Bank Indonesia. Pada tahun 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut, dipertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen serta dilakukan penyempurnaan atas pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penataan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia.

Bank Indonesia's position was reaffirmed through another amendment to the Bank Indonesia Act. In 2004, Act No. 3, 2004, was issued as an amendment to Act No. 23, 1999, concerning Bank Indonesia. The new legislation confirmed Bank Indonesia's position as an independent central bank as well as refining regulations pertaining to task implementation and the authority of Bank Indonesia, including the supervision function.

2008

Terjadinya krisis ekonomi global mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penerbitan Perpu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

The onset of the global economic crisis forced the government to institute an array of unconventional policy measures in order to maintain public confidence in the banking sector. One such government policy was the promulgation of a Government Regulation in Lieu of a Law, No. 2, as the second amendment to Act No. 23, 1999, concerning Bank Indonesia. The regulation was issued to shore up national bank resilience in the face of the global crisis through broader access to funding for banks suffering a short-term liquidity shortfall.

2009

Pada tahun 2009, Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2009, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

In 2009, Government Regulation in Lieu of a Law No. 2, 2008, concerning the second amendment to Act No. 23, 1999, regarding Bank Indonesia, was passed as the Bank Indonesia Act. Consequently, on 13th January 2009 Act No. 6, 2009 became effective, which was the second amendment to Act No. 23, 1999, on Bank Indonesia.

2011

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

The House of Representatives of the Republic of Indonesia officially enacted the Financial Services Authority Act. The promulgation of this Act, to become effective on 31st December 2013, sets forth the transfer of the function, tasks and authority for the regulation and supervision of financial services in the banking sector from Bank Indonesia to the FSA.

Dewan Gubernur

Board of Governors



Berdiri dari kiri ke kanan | *Standing from left to right*

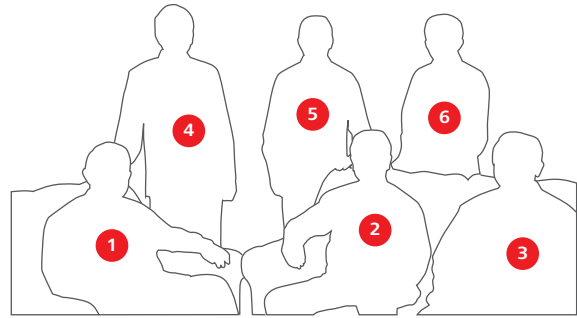
Halim Alamsyah, Ronald Waas, Muliaman D. Hadad

Duduk dari kiri ke kanan | *Sitting from left to right*

Darmin Nasution, Hartadi A. Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo

Profil Dewan Gubernur

Profile of the Board of Governors



Pada awal 2012 jumlah Anggota Dewan Gubernur sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Gubernur dan enam orang Deputy Gubernur. Namun pada akhir 2012, jumlah Anggota Dewan Gubernur yang aktif menjadi empat orang (Gubernur dan tiga Deputy Gubernur) yang disebabkan dua orang Deputy Gubernur mengakhiri masa jabatannya pada November 2012 dan satu Deputy Gubernur mengundurkan diri karena mengemban jabatan baru sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

At the beginning of 2012, the Board of Governors comprised of seven members, including one Governor and six Deputy Governors. At the end of 2012, however, the number of active board members shrank to just four (one Governor and three Deputies) due to two Deputy Governors reaching the end of their tenure in November 2012 and the resignation of one Deputy Governor to take up his new position as the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (FSA).

01 DARMIN NASUTION Gubernur | Governor

Darmin Nasution dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1 September 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010. Mulai bergabung di Bank Indonesia pada 27 Juli 2009 sebagai Deputy Gubernur Senior untuk masa jabatan 2009 – 2014, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009. Selama menjabat sebagai Deputy Gubernur Senior, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Darmin Nasution juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia dengan mengisi kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Darmin Nasution was installed as Governor of Bank Indonesia on 1st September 2010 pursuant to Presidential Decree No. 95/P, 2012, dated 21st August 2010. Darmin Nasution joined Bank Indonesia on 27th July 2009 as Senior Deputy Governor for the period 2009-2014 based on Presidential Decree 57/P, 2009, dated 17th July 2009. While appointed Senior Deputy Governor, and in accordance with the Bank Indonesia Act, Darmin Nasution was also Acting Governor of Bank Indonesia to fill the vacant position.

02 HARTADI A. SARWONO Deputi Gubernur | Deputy Governor

Hartadi A. Sarwono diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2008 - 2013 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008, dan dilantik tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan tersebut untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 2003 - 2008 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/M Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003. Hartadi A. Sarwono memulai karier sebagai staf di Bank Indonesia pada 1980 dan pada 2000 dipercaya sebagai Direktur di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Pada 2003 Hartadi A. Sarwono menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo.

Hartadi A. Sarwono was named Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2008-2013 in accordance with Presidential Decree No. 43/P of 2008, dated 10th June 2008, and sworn in on 26th June 2008. This represents Hartadi A. Sarwono's second term as Deputy Governor after serving as Deputy Governor from 2003-2008 based on Presidential Decree No. 102/M, 2003, dated 13th June 2003. Hartadi A. Sarwono began his career at Bank Indonesia as a member of staff in 1980 and in 2000 he was entrusted with the position of Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy. In 2003, Hartadi A. Sarwono was posted to Tokyo as Head of the Bank Indonesia Representative Office there.

03 ARDHAYADI MITROATMODJO Deputi Gubernur - mengakhiri masa jabatan tanggal 29 November 2012 Deputy Governor - tenure ended on November 29th, 2012

Ardhayadi Mitroatmodjo dilantik pada 29 November 2007 sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 untuk masa jabatan lima tahun. Pada 2004 – 2007, Ardhayadi Mitroatmodjo menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia London dan sebagai Direktur Pengawasan Bank di Bank Indonesia pada 2007. Ardhayadi Mitroatmodjo memulai karier di Bank Indonesia sebagai programmer pada 1978.

Ardhayadi Mitroatmodjo was sworn in as Deputy Governor of Bank Indonesia on 29th November 2007 based on Presidential Decree No. 95/P of 2007, dated 6th October 2007, for a five-year term. From 2004-2007, Ardhayadi Mitroatmodjo was the Head of the Bank Indonesia Representative Office in London and was then installed as Director of Banking Supervision at Bank Indonesia in 2007. Ardhayadi Mitroatmodjo began his career at Bank Indonesia as a programmer in 1978.

Profil Dewan Gubernur

Profile of the Board of Governors

04 HALIM ALAMSYAH

Deputi Gubernur | Deputy Governor

Halim Alamsyah diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010, dan dilantik pada 17 Juni 2010. Sebelumnya, pada periode Juli 2002 – Mei 2010, Halim Alamsyah menjabat sebagai Direktur di beberapa Direktorat di Bank Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Statistik dan Moneter, dan terakhir di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Halim Alamsyah memulai karier sebagai staf di Bank Indonesia pada tahun 1982.

Halim Alamsyah was promoted to Deputy Governor of Bank Indonesia based on Presidential Decree No. 63/P of 2010, dated 1st June 2010, and sworn in on 17th June 2010. Prior to that, from July 2002 to May 2010, Halim Alamsyah was the Director of several directorates at Bank Indonesia, namely the Centre for Education and Central Banking Studies, the Directorate of Economic Research and Monetary Policy, the Directorate of Strategic Planning and Public Relations, the Directorate of Economic and Monetary Statistics and finally the Directorate of Banking Research and Regulation. Halim Alamsyah began his career at Bank Indonesia as a member of staff in 1982.

05 RONALD WAAS

Deputi Gubernur | Deputy Governor

Ronald Waas diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2011-2016 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011, dan dilantik pada 29 Desember 2011. Pada periode 2004 – 2011, Ronald Waas menjabat Direktur di beberapa Direktorat di Bank Indonesia yaitu Direktorat Teknologi Informasi, Unit Khusus Manajemen Informasi, dan terakhir di Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. Pada periode 2001-2004, Ronald Waas menjabat sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Informasi di Bank Indonesia. Ronald Waas mulai berkarier di Bank Indonesia sebagai staf pada tahun 1981.

Ronald Waas was named Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2011-2016 pursuant to Presidential Decree No. 75/P of 2011, dated 21st December 2011, and sworn in on 29th December 2011. During the period from 2004-2011, Ronald Waas held the position of Director of several directorates at Bank Indonesia, namely the Directorate of Information Technology, the Special Unit for Information Management and finally the Directorate of Accounting and the Payment System. For the period from 2001-2004, Ronald Waas served as Head of the Bureau of Technology and Information Research and Development at Bank Indonesia. Ronald Waas began his career at Bank Indonesia as a member of staff in 1981.

06 MULIAMAN D. HADAD

Deputi Gubernur - mengundurkan diri tanggal 18 Juli 2012

Deputy Governor - resigned on 18th July 2012

Muliaman D. Hadad dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011, dan dilantik pada 29 Desember 2011. Pada 18 Juli 2012, Muliaman D. Hadad mengundurkan diri dari jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sehubungan dengan jabatan baru yang diemban sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Muliaman D. Hadad pertama kali diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006. Pada 2005, Muliaman D. Hadad menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, setelah sebelumnya sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan. Muliaman D. Hadad memulai karier di Bank Indonesia sebagai staf pada 1986.

Muliaman D. Hadad was named Deputy Governor of Bank Indonesia for his second term based on Presidential Decree No. 75/P of 2011, dated 21st December 2011, and sworn in on 29th December 2011. On 18th July 2012, Muliaman D. Hadad resigned from his post as Deputy Governor of Bank Indonesia as a result of his new appointment as Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (FSA). Muliaman D. Hadad's first term as Deputy Governor was based on Presidential Decree No. 69/P, 2006, dated 22nd December 2006. In 2005, Muliaman D. Hadad served as Head of the Financial System Stability Bureau. Muliaman D. Hadad began his career at Bank Indonesia as a member of staff in 1986.



BUDI MULYA

Deputi Gubernur - mengakhiri masa jabatan tanggal 29 November 2012

Deputy Governor - Tenure ended on 29th November 2012

Budi Mulya dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 29 November 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 untuk masa jabatan lima tahun. Pada periode 2003 - 2007, Budi Mulya menempati sejumlah posisi di Bank Indonesia, yakni Direktur Pengelolaan Moneter, Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat, serta pernah menjabat sebagai Managing Director Bank Ekspor Indonesia pada periode 1999 - 2003. Budi Mulya memulai karier di Bank Indonesia sebagai staf pada 1980.

Budi Mulya was sworn in as Deputy Governor of Bank Indonesia on 29th November 2007 based on Presidential Decree No. 95/P of 2007, dated 6th October 2007, for a five-year term. During the period from 2003-2007, Budi Mulya held a number of positions at Bank Indonesia, namely Director of Monetary Management and Director of Strategic Planning and Public Relations as well as Managing Director of Bank Exposure in Indonesia from 1999-2003. Budi Mulya began his career at Bank Indonesia as a member of staff in 1980.

Rangkaian Peristiwa 2012

2012 Events Highlight

Januari January	Februari February	April April	Mei May	Juni June	Juli July	Agustus August	September September	November November	Desember December
--------------------	----------------------	----------------	------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Bank Indonesia memfasilitasi terselenggaranya interkoneksi jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dua bank besar di Indonesia (Mandiri dan BCA).

Interkoneksi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan layanan sistem pembayaran yang handal, efisien dan berkualitas.

Bank Indonesia facilitated the implementation of an interconnected Automated Teller Machine (ATM) network between two large banks in Indonesia (Bank Mandiri and BCA).

This form of interconnectivity is the realisation of efforts to actualise a quality payment system that is reliable and efficient.



Bank Indonesia menyelenggarakan workshop EMEAP (The Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks) Information Technology Directors Meeting.

Bank Indonesia hosted an EMEAP (the Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks) Workshop to facilitate an Information Technology Directors' Meeting.

The Asian Banker memberikan predikat Bank Indonesia sebagai *"The Best Systemic and Prudential Regulator"*.

Penghargaan diberikan karena pencapaian Bank Indonesia dalam mengarahkan industri perbankan Indonesia untuk menerapkan aturan berstandar internasional dalam menjaga ketahanan perbankan dalam menghadapi krisis ekonomi global.

The Asian Banker awarded Bank Indonesia the accolade of "Best Systemic and Prudential Regulator". The recognition was due to Bank Indonesia's achievement of successfully guiding the banking industry in Indonesia through the application of international standards regarding the preservation of bank resilience in the face of the global economic crisis.



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKBTB) 2011. Dengan opini tersebut, LKBTB dinilai telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan oleh bank sentral.

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) gave an unqualified opinion for the 2011 Annual Financial Statement of Bank Indonesia (LKBTB). As a result, the 2011 Annual Financial Statement of Bank Indonesia was deemed true and fair in accordance with prevailing accounting principles in general and accounting policy specifically for the transactions performed by the central bank.

Rapat Koordinasi Nasional III Tim Pengendalian Inflasi Daerah diselenggarakan sebagai wadah koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Rapat koordinasi merumuskan langkah konkrit dan aplikatif pengendalian inflasi dalam bentuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis.

The Third National Coordination Meeting for Regional Inflation Control Teams was hosted as a form of coordination between Bank Indonesia as well as local and central government. Concrete and applicative inflation control measures were formulated at the coordination meeting in the form of a Strategic Food Prices Information Centre.

Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Badan Pertanahan Nasional untuk memperluas program keuangan inklusif.

Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia as well as the National Land Agency in order to expand the program of financial inclusion.

Bank Indonesia menandatangani dua Nota Kesepahaman mengenai pengawasan perbankan lintas negara (cross border banking supervision) dengan otoritas pengawas perbankan Australia (Australian Prudential Regulation Authority), dan Korea (Financial Services Commission Korea dan Financial Supervisory Service Korea).

Bank Indonesia signed two Memorandums of Understanding on cross-border banking supervision with Australia (the Australian Prudential Regulation Authority) and Korea (the Financial Services Commission of Korea of the Financial Supervisory Service of Korea).

Bank Indonesia dan People Bank of China menandatangani Agency Agreement on Bond Investment in the Interbank Bond Market of China.

Bank Indonesia and the People's Bank of China signed an Agency Agreement on Bond Investment on the Interbank Bond Market of China.

Museum Bank Indonesia dinobatkan sebagai Museum Terbaik 2012 se-DKI Jakarta.

The Bank Indonesia Museum was named the Best Museum of 2012 in the Jakarta area.

Bank Indonesia menyelenggarakan Pekan Kegiatan Keuangan Inklusif. Dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden mencanangkan hari Rajin Menabung.

Bank Indonesia hosted the Financial Inclusion Activity Week. At the event, the Vice President of the Republic of Indonesia launched National Savings Day.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati Mekanisme Koordinasi dalam Perencanaan, Pencetakan, Pemusnahan Uang sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bank Indonesia and the Ministry of Finance agreed a Coordination Mechanism for the Planning, Printing and Destruction of Money as a follow-up measure to Act No. 7 of 2011 concerning Currency.



Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh uang pecahan kecil menjelang perayaan Idul Fitri, Bank Indonesia bekerjasama dengan sembilan bank memperkenalkan penukaran uang dengan menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM dan Debet (non tunai).

Bank Indonesia coordinated with nine banks to introduce currency exchange using ATM/ATM and debit cards (non-cash) in order to help the general public access smaller denominations of money in the run up to the Muslim religious holiday of Eid al-Fitr.



Bank Indonesia meluncurkan program kerja Penciptaan Wirausaha Baru.

Bank Indonesia launched the 'Creating New Entrepreneurs' work program.



Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Perbankan guna menyampaikan hasil evaluasi kinerja perbankan selama 2012 dan arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun mendatang.

Bank Indonesia hosted the Annual Bankers' Meeting to present the results of assessments into banking performance in 2012 and the planned policy direction for the upcoming year.

Bank Indonesia dan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) menyelenggarakan Asian Central Bank's Watchers Conference kedua di Jakarta.

Bank Indonesia and the Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) hosted the second Asian Central Banks' Watchers Conference in Jakarta.

Indonesia mempererat kerjasama dengan bank sentral Filipina (Bangko Ng Pilipinas) melalui forum *Bilateral Meeting*.

Indonesia tightened coordination with the Central Bank of the Philippines (Bangko Ng Pilipinas) through a bilateral meeting.

Bank Indonesia menyelenggarakan seminar akhir tahun perbankan syariah dengan tema "Peran dan Prospek Perbankan Syariah dalam Pemerataan Ekonomi".

Bank Indonesia hosted a yearend seminar on Islamic banking entitled "The Role and Prospects of Islamic Banking in an Equitable Economy".

Kebijakan Strategis 2012

Strategic Policies in 2012

Januari

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan (BI *Rate*) pada level 6% dan memperlebar koridor bawah suku bunga operasi moneter (*deposit facility*) dari semula 150 bps menjadi 200 bps di bawah BI *Rate*.

Bank Indonesia held its policy rate (BI Rate) at a level of 6% and widened the lower interest rate corridor on its deposit facility from 150 bps to 200 bps below the BI Rate.

Februari

BI *Rate* diturunkan 25 bps menjadi 5,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditengah menurunnya kinerja ekonomi global.

The BI Rate was lowered by 25 bps to 5.75% in order to catalyse economic growth in Indonesia amid languid global economic performance.

Maret

BI *Rate* dipertahankan pada level 5,75%. Bank Indonesia menilai level BI *Rate* tersebut masih sesuai dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pencapaian sasaran inflasi.

Bank Indonesia menerbitkan aturan rasio maksimum Kredit Kepemilikan Rumah dan uang muka minimum Kredit Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit. Aturan mengenai Produk Qardh Beragun Emas diterbitkan guna memberikan acuan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menjalankan bisnis pembiayaan beragun emas.

The BI Rate was maintained at 5.75%, a level considered appropriate by Bank Indonesia to stimulate economic growth in Indonesia and meet the inflation target.

Bank Indonesia issued a regulation determining the maximum loan-to-value ratio for mortgage loans and minimum downpayments for automotive loans in order to enhance bank prudence in the allocation of credit.

A regulation was also issued concerning gold-backed Qardh products as a reference for Islamic banks and Islamic business units engaged in the gold-backed financing business.

Juli

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum guna memperkuat aspek tata kelola yang baik dalam pengelolaan bank.

Bank Indonesia promulgated regulations concerning shareholdings at commercial banks in order to underpin aspects of good governance in terms of bank management.

Agustus

Bank Indonesia memperlonggar aturan Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank guna memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi di Indonesia.

Bank Indonesia loosened restrictions on rupiah transactions and the disbursement of foreign currency credit by banks in order to provide greater flexibility for market players involved in hedging economic activity in Indonesia.

Desember

Bank Indonesia mempertahankan BI *Rate* pada level 5,75% dalam 10 bulan terakhir.

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan penyediaan modal minimum yang disesuaikan dengan profil risiko bank, dan kewajiban bagi kantor cabang bank asing untuk memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).

Bank Indonesia menyempurnakan aturan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*).

Bank Indonesia mengatur kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh bank.

Guna mendorong peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap lembaga keuangan, Bank Indonesia mengatur pemberian kredit/ pembiayaan dan bantuan teknis oleh bank umum kepada UMKM.

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang membatasi penguanaan suku bunga kepada nasabah kartu kredit.

Bank Indonesia held its BI Rate at a level of 5.75% for the past ten months. Bank Indonesia issued regulations concerning capital adequacy based on the risk profile of the bank as well as the requirement for foreign bank branches to meet Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Bank Indonesia amended its regulation concerning single presence policy for banks in Indonesia.

Bank Indonesia regulated bank business activity and office network based on core capital.

Bank Indonesia regulated the extension of credit/financing and provision of technical assistance by commercial banks to micro, small and medium enterprises (MSMEs) in order to broaden MSME access to banking services.

Bank Indonesia issued a regulation restricting the level of interest imposed upon customers of credit cards.

April

Bank Indonesia meluncurkan Kliring Kilat guna mempercepat penyelesaian kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Melalui mekanisme yang baru, frekuensi penyelesaian transaksi ditingkatkan dari dua kali menjadi empat kali sehari sehingga proses transfer dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, murah dan handal.

Bank Indonesia launched a close to real-time clearing system known as Kliring Kilat (Express Clearing) to expedite clearing settlement through the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI). Through the new mechanism, the frequency of transaction settlements increased from twice to four times per day. Consequently, fund transfers initiated by the general public are processed more quickly, inexpensively and reliably.

Juni

Bank Indonesia menerbitkan instrumen *Term Deposit* valas sebagai instrumen moneter dan mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

Bank Indonesia issued foreign currency Term Deposits as a monetary instrument to help deepen domestic financial markets.

Sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan memburuknya krisis Eropa, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga terus melanjutkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, penerbitan *Term Deposit* valas, dan pengembangan instrumen-instrumen transaksi valas di dalam negeri lainnya.

As an anticipatory measure to the possibility of a deterioration in the crisis affecting Europe, Bank Indonesia strengthened policy coordination with the government in order to create and maintain financial system stability. Bank Indonesia also persevered with rupiah stabilisation measures through the purchase of tradeable government securities (SBN) on the secondary market, the introduction of foreign currency Term Deposits and the development of other foreign exchange domestic transaction instruments.

September

Bank Indonesia mengembangkan sistem transfer kredit elektronik yang memberikan akses kepada nasabah BPR untuk melakukan transfer dana antar BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Bank Indonesia menerapkan aturan kepemilikan kartu kredit oleh nasabah dengan meningkatkan aspek kehati-hatian dan manajemen risiko pemberian kredit.

Bank Indonesia developed an electronic credit transfer system that provides the customers of rural banks greater access to fund transfers between participating rural banks and/or commercial banks through the National Clearing System.

Bank Indonesia applied regulations concerning credit card ownership by enhancing aspects of prudence and risk management in the allocation of credit.

November

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) guna meningkatkan daya saing perbankan dalam negeri, dalam mengelola devisa.

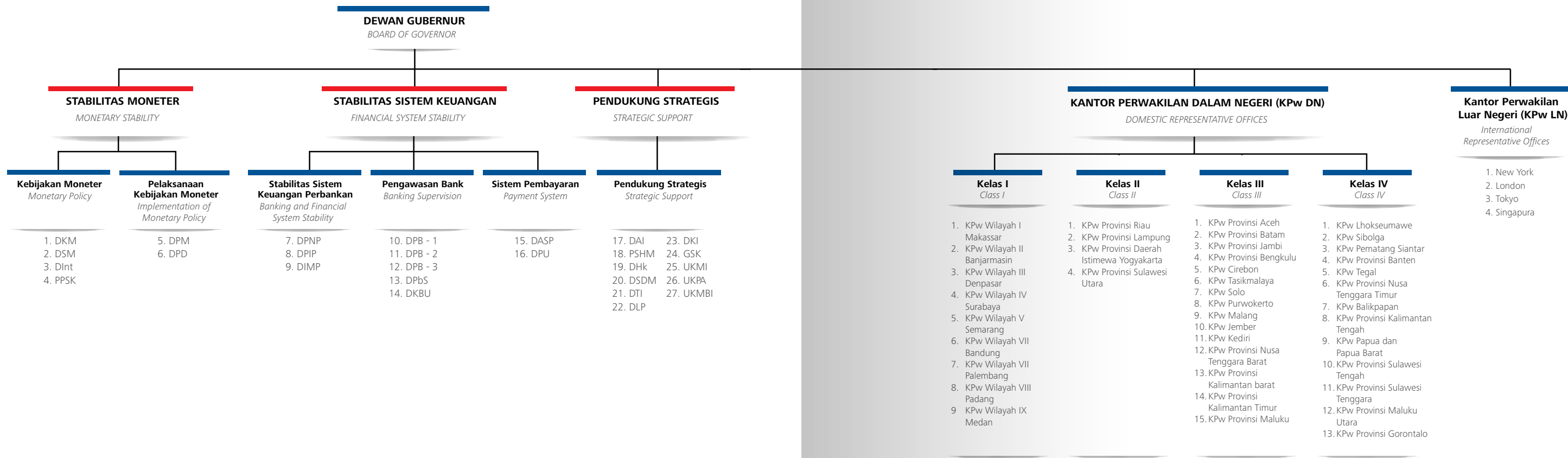
Kondisi ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, mendorong Bank Indonesia untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur akses bagi bank umum untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Bank Indonesia issued regulations concerning Trust Management at Banks in order to boost the competitiveness of domestic banks in terms of managing foreign exchange.

Favourable macroeconomic conditions and maintained financial system stability encouraged Bank Indonesia to refine guidelines that regulate commercial bank access to the Short-Term Funding Facility.

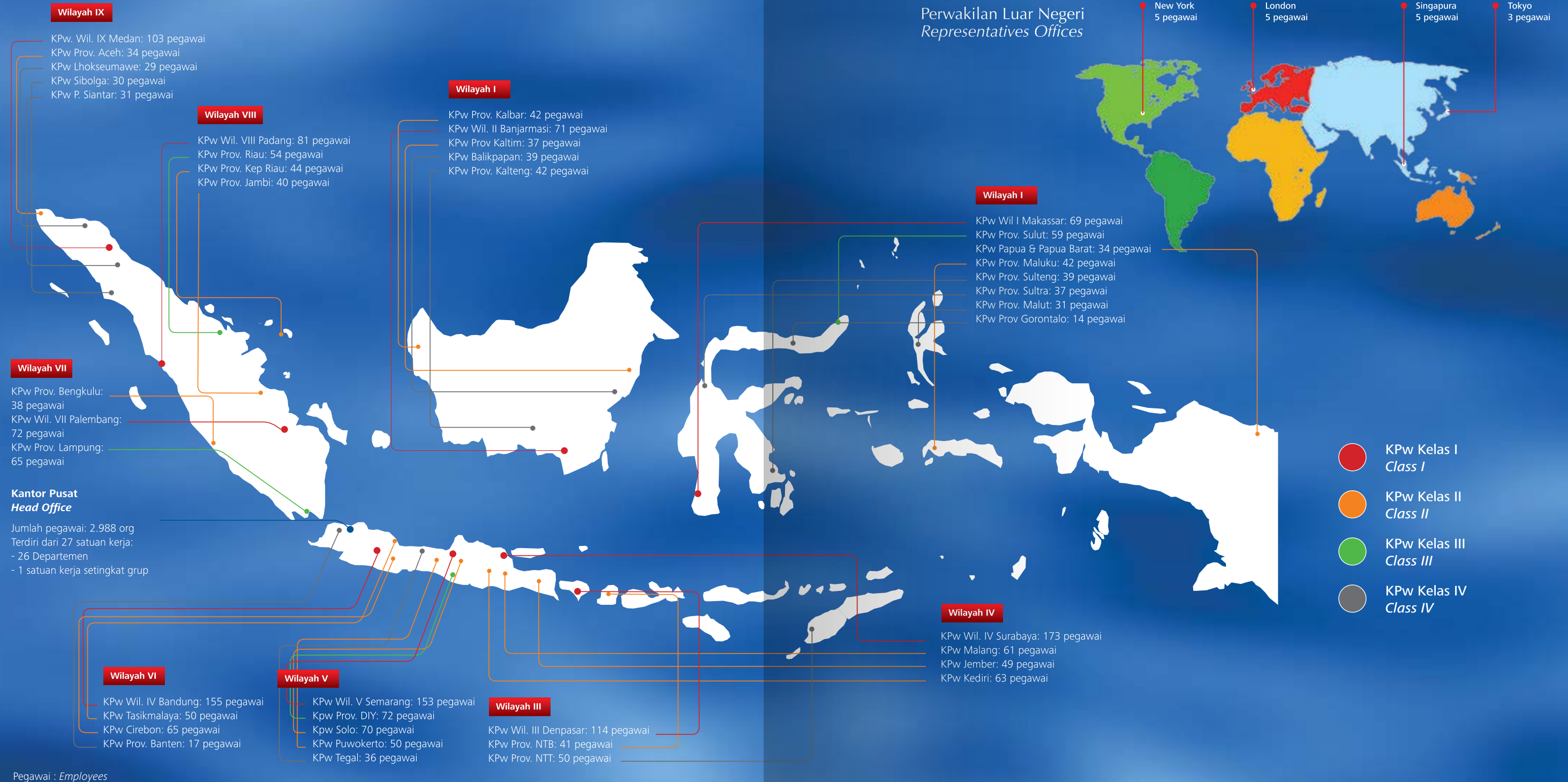
Struktur Organisasi Bank Indonesia

The Organizational Structure of Bank Indonesia



Peta Wilayah Kerja Bank Indonesia

The Map of Working Area of Bank Indonesia



Tata Kelola Bank Indonesia *Bank Indonesia Governance*

Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mencapai tujuan merupakan amanat yang dipercayakan oleh bangsa, sehingga hasil dan proses dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Menyadari pentingnya hal tersebut, Bank Indonesia membangun dan mengelola struktur dan tatanan kerja organisasi berdasarkan tiga pilar Tata Kelola Bank Sentral yang Baik yakni Independensi, Akuntabilitas, dan Tranparansi.

The task and authority of Bank Indonesia in achieving its core purpose is the mandate trusted by the general public, therefore the outcomes and processes in achieving that goal must be performed properly and correctly to ensure accountability. Acknowledging the importance of such aspects, Bank Indonesia developed and manages an organisational structure based on three pillars of Central Bank Governance, namely independence, accountability and transparency.

Pilar Independensi dimaksudkan sebagai kewenangan untuk secara mandiri mengelola kebijakan dan sumber daya dengan tetap berkoordinasi bersama lembaga publik lainnya. Pilar akuntabilitas dimaknai sebagai kejelasan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik melalui perwakilan rakyat. Sementara itu, pilar transparansi menjamin keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah diambil Bank Indonesia.

Independence represents the authority to independently manage policy and resources through coordination with other public institutions. The second pillar covers the accountability of Bank Indonesia task implementation and authority to the general public through public representation. Meanwhile, transparency guarantees the openness of information regarding task implementation and the policies instituted by Bank Indonesia.

Tata Kelola Bank Indonesia

Bank Indonesia Governance

Dewan Gubernur

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sesuai Undang-undang Bank Indonesia terdiri dari Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Anggota Dewan Gubernur menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan mulai dari proses pemilihan hingga penilaian kinerja Dewan Gubernur. Proses pemilihan Anggota Dewan Gubernur dilakukan melalui mekanisme yang sejalan dengan konsep pemerintahan yang demokratis. Anggota Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Gubernur, DPR-RI melakukan proses seleksi yang dikenal sebagai *fit and proper test* untuk mendalami visi, misi, keahlian dan pengalaman kandidat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis secara kolektif kolegial yang penetapannya dilakukan melalui forum Rapat Dewan Gubernur. Dalam operasionalnya, Dewan Gubernur melakukan pembagian bidang tugas dan wewenang untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Gubernur. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja pelaksanaan tugas Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama, yang penilaiannya dilakukan oleh DPR-RI secara tahunan.

Pada akhir 2012, jumlah Anggota Dewan Gubernur yang aktif sebanyak empat orang, terdiri dari Darmin Nasution sebagai Gubernur dan tiga Deputy Gubernur yaitu Hartadi A. Sarwono, Halim Alamsyah, dan Ronald Waas.

Badan Supervisi Bank Indonesia

Untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas, Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi

Board of Governors

A Board of Governors heads Bank Indonesia pursuant to the Bank Indonesia Act, comprising of a Governor, a Senior Deputy Governor and four to seven Deputy Governors. The tenure of the Board is five years with reappointment possible in the subsequent period.

Principles of good governance are applied through a selection process and performance assessments of the Board. Board members are selected through a mechanism congruous to the concept of a democratic government. Accordingly, board members are nominated and appointed by the President in agreement with the House of Representatives (DPR-RI). To ensure the availability of deserving and appropriate candidates, the House of Representatives conducts a selection process in accordance with fit and proper tests in order to deepen the vision, mission, expertise and experience of candidates.

The Board of Governors collectively and collegially determines principal and strategic policy through Board of Governors' Meetings. Operationally, the Board divides its tasks and authority in order to clarify the responsibility of each member of the Board. As a form of accountability, the performance of the Board and its members is measured through key performance indicators, which are evaluated annually by the House of Representatives.

At the end of the reporting year, the Board of Governors comprised of four individuals as follows: Darmin Nasution as the Governor and three Deputy Governors, namely Hartadi A. Sarwono, Halim Alamsyah and Ronald Waas.

Bank Indonesia Supervision Body

The Bank Indonesia Act mandates the establishment of a Bank Indonesia Supervision Body (BSBI) that functions to assist the House of Representatives supervise certain

Bank Indonesia (BSBI) yang berfungsi membantu DPR-RI melakukan pengawasan di bidang tertentu. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional dan investasi, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan dilaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI. Secara berkala, Dewan Gubernur dan Pemimpin Satuan Kerja melakukan pertemuan dengan anggota BSBI guna membahas hasil telaahan serta mendiskusikan hal-hal yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Keanggotaan BSBI terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden. Keanggotaan BSBI dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum. Anggota BSBI diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pada 2012, jumlah Anggota BSBI sebanyak lima orang yang terdiri dari Umar Juoro sebagai Ketua dan Ahmad Erani Yustika, Marsuki, Akhmad Syakhroza, serta Rama Pratama masing-masing sebagai anggota.

Rapat Dewan Gubernur

Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis yang berdampak luas baik keluar maupun ke dalam Bank Indonesia. Pengambilan keputusan dalam RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, mekanisme dalam RDG diatur dengan tatanan yang jelas dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola bank sentral yang baik. Waktu penyelenggaraan RDG diatur secara jelas yakni sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

activities in order to enhance accountability, independence, transparency and credibility. The supervision function performed by BSBI covers the findings of the Annual Financial Statement of Bank Indonesia, the operating and investment budget, as well as the decision-making process for operational activity excluding monetary policy and asset management at Bank Indonesia. The findings are reported to the House of Representatives quarterly or upon request. Periodically, the Board of Governors and the Head of Departements meet with members of BSBI to discuss the findings and other issues that support effective task implementation at Bank Indonesia.

The Bank Indonesia Supervision Body consists of one Chairman, also serving as a member, and four other members selected by the House of Representatives and appointed by the President. Prospective BSBI members are chosen with respect to their integrity, morality, capacity/capability/expertise, professionalism and experience in economics, finances, banking or the law. The tenure of BSBI members is three years with reappointment possible in the subsequent period. Five members served on the Supervisory Board in 2012, namely Umar Juoro as Chairman and Ahmad Erani Yustika, Marsuki, Akhmad Syakhroza, as well as Rama Pratama as members.

Board of Governors Meeting

The Board of Governor's Meeting (RDG) represents the highest decision-making forum at Bank Indonesia. Through this forum, the Board of Governors determines principal and strategic policy that has wide-reaching impacts externally as well as internally at Bank Indonesia. Decision-making at the Board of Governors' Meeting is based on deliberation to reach consensus, however, the Governor has the final decision if consensus cannot be reached.

As the highest decision-making forum, the RDG has a clear structure based on the principles of good central banking governance. The schedule for RDG meetings is also clearly structured, with meetings regularly held at least monthly in order to determine monetary policy stance

untuk menetapkan *stance* kebijakan moneter (RDG Bulanan). Selain itu, sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, RDG wajib diselenggarakan untuk mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter yang diputuskan dalam RDG Bulanan atau untuk menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam RDG, materi yang akan dibahas wajib dilengkapi dengan asesmen risiko dan mitigasi pengendaliannya. Sebelum RDG, materi dikaji dan dibahas secara matang dalam forum pembahasan/koordinasi di level yang lebih rendah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek hukum. Melalui cara tersebut, Dewan Gubernur akan memiliki pertimbangan yang komprehensif sebelum mengambil keputusan.

Selanjutnya, sebagai bentuk transparansi dalam proses pengambilan keputusan, Bank Indoneia mengumumkan secara awal jadwal pelaksanaan RDG Bulanan untuk satu tahun mendatang, sebelum berakhirnya tahun berjalan. Selain itu, kebijakan moneter yang diambil dalam RDG Bulanan dipublikasikan kepada masyarakat pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RDG Bulanan. Selama 2012, Bank Indonesia menyelenggarakan 12 RDG Bulanan dan 56 kali RDG Mingguan.

Komite

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pengambilan keputusan dalam RDG dan mendukung pelaksanaan tugas Anggota Dewan Gubernur, Bank Indonesia membentuk beberapa komite. Komite dimaksudkan sebagai media koordinasi antar Anggota Dewan Gubernur dan pemimpin satuan kerja terkait untuk membahas, mematangkan dan memberikan rekomendasi terhadap materi yang bersifat prinsipil-strategis yang akan diputuskan dalam RDG. Komite juga dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan operasional yang akan diputuskan oleh Anggota Dewan Gubernur yang membidangi. Dalam keanggotaannya, masing-masing komite diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Gubernur dan beranggotakan Anggota Dewan Gubernur yang lain serta beberapa Pemimpin Satuan Kerja terkait.

Saat ini, terdapat tujuh komite yang dimiliki oleh Bank Indonesia yakni: Komite Kebijakan Moneter, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, Komite Internasional, Komite Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Manajemen Krisis.

(Monthly Board of Governors’ Meeting). In addition, at least once per week the Board will convene to determine other policies that are principal and strategic in nature. The material discussed at Board of Governors’ Meetings is supplemented by risk assessments and mitigation in order to bolster the quality of decision-making. Prior to a meeting, the materials are thoroughly reviewed and discussed at a lower level discussion/coordination forum, paying due regard to several aspects, including legal aspects. Through this process the Board of Governors has access to comprehensive deliberations before taking any decisions.

As a form of transparency in the decision-making process, Bank Indonesia announces the planned schedule for monthly meetings for the upcoming year. In addition, monetary policy taken at the monthly meetings is published immediately to the general public on the same day as the meeting. In 2012, Bank Indonesia convened 12 monthly RDG meetings and 56 weekly meetings.

Committees

Bank Indonesia has established several committees in order to enhance the effectiveness and quality of the decision-making process at RDG meetings and to support task implementation by members of the Board of Governors. The committees are a means for the Board of Governors to coordinate with heads of relevant departements to discuss, develop and offer recommendations regarding the principal/strategic materials to be decided upon at the RDG meeting. Committees also suggest recommendations concerning operating policy to be decided upon by the respective members of the board. In their make up, each respective committee is headed by a member of the Board and involves other board members as well as the heads of related departements.

Currently, there are seven committees at Bank Indonesia, namely the Monetary Policy Committee, the Financial System Stability Committee, the Banking Supervision and Regulation Committee, the International Committee, the Strategic Planning and Performance Management Committee, the Human Resources Committee and the Crisis Management Committee.

Arah kebijakan dan strategi tahun berikutnya ditetapkan dalam Forum Strategis (Forstra) Bank Indonesia.

Policy directions and strategies for next year determined in Strategic Forum (Forstra) Bank Indonesia.



Manajemen Strategis

Bank Indonesia menerapkan manajemen strategis yang diawali dengan melakukan analisis terhadap misi, visi, serta lingkungan eksternal dan internal. Selanjutnya, Bank Indonesia merumuskan strategi jangka panjang dan tahunan yang kemudian dijabarkan menjadi strategi operasional, termasuk alokasi anggaran dan sumber daya manusia. Bersamaan dengan implementasi strategi, Bank Indonesia melakukan *review* dan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi itu berjalan sesuai rencana. Seluruh tahapan proses tersebut dikenal sebagai Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK).

Melalui pendekatan *Balanced Scorecard* sebagai perangkat manajemen strategis, Bank Indonesia menuangkan strateginya dalam beberapa sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya, serta program kerja inisiatif. Hubungan antar sasaran strategis tersebut tergambar dalam suatu peta strategi.

Pada tahun 2012, Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan empat sasaran strategis sebagai pencapaian utama pelaksanaan tugas Bank Indonesia yaitu stabilitas nilai rupiah, bauran kebijakan moneter yang efektif, sistem perbankan yang stabil, sehat, dan efisien, serta sistem pembayaran yang aman dan efisien.

Manajemen Risiko

Bank Indonesia menerapkan fungsi manajemen risiko guna memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dalam proses pengambilan keputusan dan operasional kegiatan. Fungsi manajemen risiko mencakup pengidentifikasian, pengukuran,

Strategic Management

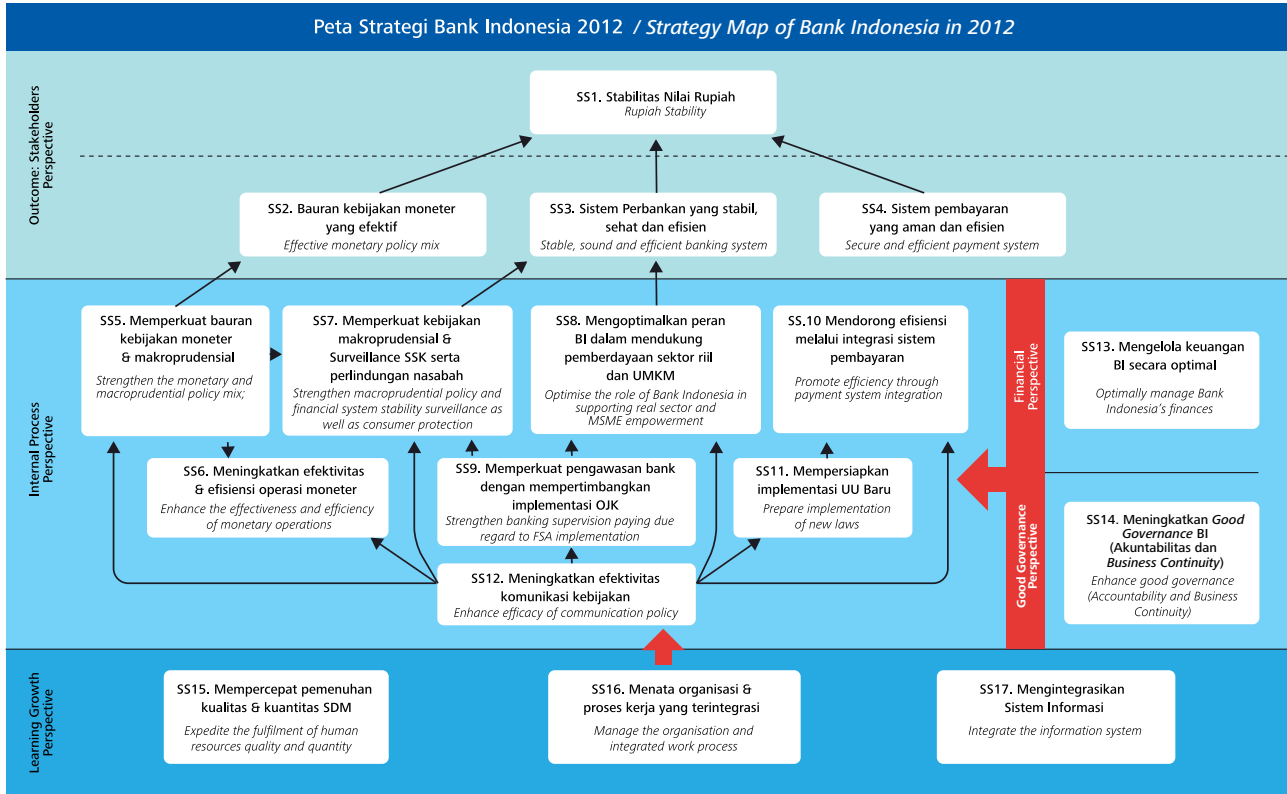
Bank Indonesia applies strategic management that begins with analysing the mission, vision as well as the internal and external environment. Bank Indonesia subsequently formulates long-term and annual strategy, which is then translated into operating strategy, including budgetary and human resources allocation. Simultaneously, Bank Indonesia conducts periodic reviews and assessments to ensure that the implementation of the strategy is proceeding as planned. Holistically, the various stages of this process are known collectively as the Planning, Budgeting and Performance Management System (SPAMK).

Through a Balanced Scorecard approach as a rating system for strategic management, Bank Indonesia moulds its strategy into a number of strategic targets following Key Performance Indicators (KPI) and their targets as well as an initiative work program. The relationships between strategic targets can be illustrated in a strategy map.

In 2012, the Board of Governors of Bank Indonesia determined four strategic targets as the main achievements for task implementation at Bank Indonesia, namely rupiah stability, an effective monetary policy mix, a stable, sound and efficient banking system as well as a secure and efficient payment system.

Risk Management

Bank Indonesia applies risk management in order to meet the demands of good governance in terms of the decision-making process and operating activity. The risk management function incorporates identifying, measuring,



pengendalian dan pemantauan atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi. Melalui upaya tersebut, tingkat risiko yang dihadapi dapat diantisipasi dan dikendalikan pada batas yang dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Manajemen Risiko Bank Indonesia dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko non-keuangan dan keuangan. Pada kelompok risiko non-keuangan termasuk didalamnya adalah risiko operasional, hukum, strategi dan reputasi. Berdasarkan *database* risiko yang dikelola oleh Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko, eksposur risiko yang dihadapi didominasi oleh risiko non-keuangan, dengan risiko terbesar pada risiko operasional.

Sumber risiko non-keuangan diantaranya dipengaruhi oleh ketergantungan pada ketersediaan sistem operasional, perubahan arah kebijakan dan peraturan antar otoritas, serta insiden atau potensi insiden yang menyebabkan penurunan kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Bank Indonesia. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeliharaan dan pengujian sistem

controlling and monitoring the risks faced by Bank Indonesia holistically and in an integrated fashion. Through such endeavours the level of risk faced can be anticipated and controlled within normal levels and accounted for.

Bank Indonesia risk management is performed by identifying, measuring and mitigating financial and non-financial risk. Non-financial risks include operational risk, legal risk, strategic risk and reputational risk. Based on the database of risk maintained by Bank Indonesia through the Risk Management Information System, risk exposure is dominated by non-financial risk, with operational risk as the most significant element.

Sources of non-financial risk are influenced by, among others, dependence on availability of the operational system, changes in policy direction and regulations between authorities, as well as incidents and potential incidents that undermine the satisfaction of stakeholders in terms of Bank Indonesia's services. To mitigate such risks, Bank Indonesia maintains and periodically reviews

operasional secara berkala, koordinasi dan komunikasi lintas otoritas dan menyelenggarakan survei untuk memetakan tingkat kepuasan *stakeholder*.

Pada risiko keuangan, secara umum faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank Indonesia bersumber dari faktor eksternal yakni fluktuasi nilai tukar, suku bunga dan nilai aset. Kelompok risiko keuangan yang meliputi risiko kredit, pasar dan likuiditas ini dikelola oleh satuan kerja yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan aset dan kewajiban Bank Indonesia. Melalui tindakan mitigasi yang optimal, eksposur risiko ini dapat dijaga pada tingkat yang dapat ditoleransi.

Audit Internal

Sebagai salah satu elemen tata kelola bank sentral yang baik, Bank Indonesia melaksanakan fungsi audit internal. Ruang lingkup fungsi audit internal meliputi pelaksanaan audit dan konsultasi terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Keberadaan fungsi audit internal adalah untuk memberikan keyakinan bahwa proses tersebut mampu mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta taat pada ketentuan yang berlaku.

Kegiatan audit Bank Indonesia menggunakan metodologi audit yang berbasis risiko. Semakin tinggi risiko sasaran audit, maka semakin tinggi keharusan untuk dilakukannya audit internal. Agar hasil audit lebih berkualitas dan bermutu, sejak 2002 Bank Indonesia menerapkan ISO 9001:2000 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2008.

Dalam menunjang pelaksanaan audit, Bank Indonesia menerapkan konsultasi sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis proses berlandaskan pada tata kelola yang baik. Kegiatan konsultasi mencakup pemberian rekomendasi dalam penyusunan dan implementasi ketentuan, serta tindak lanjut hasil audit intern maupun ekstern. Kegiatan konsultasi juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan.

Hubungan Dengan Pemerintah

Tata kelola Bank Indonesia diperkuat dengan kejelasan hubungan antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan strategis terutama dengan pemerintah. Hal tersebut diatur secara jelas dalam perundang-undangan baik Undang-Undang Bank Indonesia maupun undang-undang yang lain.

the operational system and inter-authority coordination and communication as well as conducts surveys to map stakeholder satisfaction.

Referring to financial risks, in general the factors that affect activities at Bank Indonesia stem from external factors, like fluctuations in the exchange rate, interest rates and the value of assets. Work units responsible for managing Bank Indonesia's assets and liabilities manage financial risks, including credit risk, market risk and liquidity risk. Through optimal mitigation, risk exposure is maintained at tolerable levels.

Internal Audit

As one element of good central banking governance, Bank Indonesia implements an internal audit. The scope of the internal audit covers actual audit implementation as well as consultation regarding the governance process, risk management and control. The internal audit function instils confidence that the aforementioned processes support the achievement of Bank Indonesia's goals and are implemented effectively and efficiently in adherence to prevailing regulations.

The internal audit at Bank Indonesia utilises a risk-based methodology. As the risk associated with the target of the internal audit increases so does the necessity to perform the audit. To ensure the quality of the outcome of the internal audit, Bank Indonesia updated its application of ISO 9001:2000 to ISO 9001:2008 in 2002.

Bank Indonesia applies a consultation system for internal control that aims to enhance the quality of business processes based on good governance in order to support implementation of the internal audit. Consultation activities include providing recommendations for the formulation and implementation of regulations, as well as follow-up measures based on the outcome of the internal and external audits. Consultation activities also include socialisation, workshops and training.

Relationship with the Government

Governance at Bank Indonesia is reinforced through clear relationships between Bank Indonesia and strategic stakeholders, primarily the government. This relationship is clearly defined legally through Bank Indonesia regulations as well as other prevailing laws and regulations.

Hubungan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah bertujuan agar masing-masing kebijakan dapat bersinergi dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Koordinasi tersebut antara lain berupa keikutsertaan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan serta masalah lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), termasuk pada saat pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Bank Indonesia juga dapat mengundang wakil pemerintah untuk hadir dalam RDG Bulanan guna memberikan pandangan dari sisi kebijakan fiskal.

Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan pemerintah memiliki protokol koordinasi yang dilakukan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Melalui forum tersebut, secara jelas diatur mengenai koordinasi dan peran masing-masing pihak baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan memberikan remunerasi atas saldo kas pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah juga menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Namun demikian, Bank Indonesia dilarang memberi kredit kepada pemerintah. Di bidang pengelolaan mata uang rupiah, Bank Indonesia dan pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dalam perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang.

Hubungan Dengan Parlemen

Dalam hubungannya dengan parlemen, DPR-RI merupakan pihak yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. DPR-RI sebagai perwakilan rakyat Indonesia memastikan bahwa tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkelola secara efektif dan efisien.

Pada setiap awal tahun, Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada DPR-RI yang memuat antara lain informasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya, rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah

Cooperation and coordination between Bank Indonesia and the government aims to ensure policy synergy in the accomplishment of macroeconomic targets. Coordination is implemented in the form of, among others, Bank Indonesia participation at cabinet meetings to discuss economic, banking and financial problems as well as other issues that fall within the remit of Bank Indonesia's tasks and authority. Furthermore, Bank Indonesia provides input to the government regarding the state budget, including when the government plans to issue government bonds. Bank Indonesia also invites government representatives to its monthly Board of Governors' meeting to provide their opinion from a fiscal standpoint.

Bank Indonesia and the government adhere to a coordination protocol in the form of a Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK) in order to help maintain financial system stability in Indonesia. Through this forum, coordination and the respective roles of each institution under normal and crisis conditions are clearly defined to prevent and resolve a crisis.

At the operational level, Bank Indonesia holds the government's cash and provides remuneration on the government's cash balance. On behalf of the government, Bank Indonesia receives foreign loans, provides administration and settles outstanding invoices with international parties. However, Bank Indonesia is strictly prohibited from providing credit to the government. In terms of managing rupiah currency, Bank Indonesia and the government share a coordination mechanism for the planning, printing and destruction of money.

Relationship with the Parliament

In relationship with the parliament, the House of Representatives is responsible for supervising the management of Bank Indonesia's tasks and authority. The House of Representatives, as representatives of the Indonesian people, ensure that the tasks and authority of Bank Indonesia are managed effectively and efficiently.

At the beginning of each year, Bank Indonesia is required to submit a written report to the House containing, among others, information regarding task implementation in the previous year, planned policy, the targets set as well as planned task implementation for the upcoming year.

pelaksanaan tugas serta wewenang untuk tahun yang akan datang. Bank Indonesia juga menyampaikan laporan tertulis kepada DPR-RI mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulanan. Dalam hal diperlukan, DPR-RI juga dapat meminta penjelasan langsung kepada Bank Indonesia melalui berbagai forum rapat kerja DPR-RI.

Pertanggungjawaban terhadap rencana dan penggunaan anggaran oleh Bank Indonesia juga menjadi bagian fungsi *check and balance* oleh DPR-RI. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan anggaran operasional dan DPR-RI akan mengevaluasi pelaksanaan anggaran operasional pada tahun berjalan serta memberikan persetujuan terhadap anggaran operasional Bank Indonesia untuk tahun mendatang. Selain itu, Bank Indonesia wajib melaporkan anggaran kebijakan kepada DPR-RI. Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pedoman Perilaku Bank Indonesia

Untuk memastikan bahwa pengelolaan kewenangan dan tugas dilaksanakan secara profesional dan berintegritas, Bank Indonesia memiliki aturan pedoman perilaku bagi pegawai dan Anggota Dewan Gubernur. Pedoman tersebut mengatur mengenai cara bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan Bank Indonesia.

Adanya kejelasan pedoman perilaku tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyimpangan yang mungkin timbul karena jabatan. Pedoman perilaku sekaligus memberikan kejelasan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dan sanksi dalam hal terbukti adanya pelanggaran perilaku. Dengan demikian, setiap penyimpangan perilaku di Bank Indonesia ditindaklanjuti secara tuntas. Bagi pegawai, penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sesuai aturan disiplin pegawai. Sementara bagi Dewan Gubernur, dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Etik yang melibatkan pihak eksternal yang kompeten dan memiliki kredibilitas.

Bank Indonesia also submits a written report to the House concerning task implementation on a quarterly basis. As necessary, the House can also request direct explanations from Bank Indonesia through a variety of working meetings.

Accountability for the planned and actual budget of Bank Indonesia is also part of the checks and balances put in place by the House. Furthermore, Bank Indonesia is required to submit a report on the operating budget, which the House evaluates for the ongoing year and provides approval for the upcoming year. Additionally, Bank Indonesia is required to report the policy budget to the House. The annual financial statement produced by Bank Indonesia represents the outcome of the audit performed by the State Audit Board of the Republic of Indonesia.

Bank Indonesia Code of Conduct

Bank Indonesia adheres to a code of conduct applicable to all employees and board members in order to ensure that the tasks and authority are implemented professionally and with integrity. These guidelines outline the responsibilities and code of ethics for individuals in terms of task implementation as well as interaction with Bank Indonesia's stakeholders.

The purpose of a code of conduct is to prevent conflicts of interest and digressions that could emerge as a result of one's position within the organisation. The code of conduct also clarifies a mechanism to deal with suspected violations and the subsequent sanctions if sufficient evidence is found. Therefore, each and every violation of the code of conduct at Bank Indonesia is thoroughly investigated. For the employees of Bank Indonesia, any alleged violations are dealt with according to prevailing disciplinary rules. Meanwhile, the Board of Governors is subject to the Honorary Council of Ethics (Majelis Kehormatan Etik) involving competent and credible external parties.

Kinerja dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia *Bank Indonesia Performance And Task Implementation*

Berbagai indikator memperlihatkan selama 2012 kondisi perekonomian Indonesia tetap solid, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, serta sistem pembayaran berjalan lancar dan aman. Di tengah gejolak perekonomian global yang masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, capaian tersebut tentunya patut disyukuri. Capaian itu sekaligus menyiratkan hasil kerja keras berbagai pihak termasuk Bank Indonesia melalui berbagai respons kebijakan yang telah ditempuh.

A number of key indicators revealed that the economy of Indonesia remain solid in 2012, financial system stability was maintained and the payment system was secure and free of disruptions. Amid recurring shocks in a global economy that showed few signs of recovery, the domestic economic accomplishments are even more impressive. Moreover, domestic economic achievements also demonstrate the hard work and diligence of various parties, including Bank Indonesia, through the range of policy responses instituted.

Hal ini juga merupakan hasil koordinasi Bank Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk secara berkala dengan pemerintah. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan bank sentral lain baik di tingkat regional, multilateral maupun internasional untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di kawasan.

This is also the propitious result of Bank Indonesia coordination with various stakeholders, including periodically with the government. Bank Indonesia also collaborated with other central banks at the regional, multilateral and international level to maintain financial system stability in the region.

Kinerja dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia Performance And Task Implementation

Pencapaian Strategis 2012

Strategic Achievements in 2012

Kinerja perekonomian Indonesia pada 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yakni 6,2% dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah yaitu 4,3%.

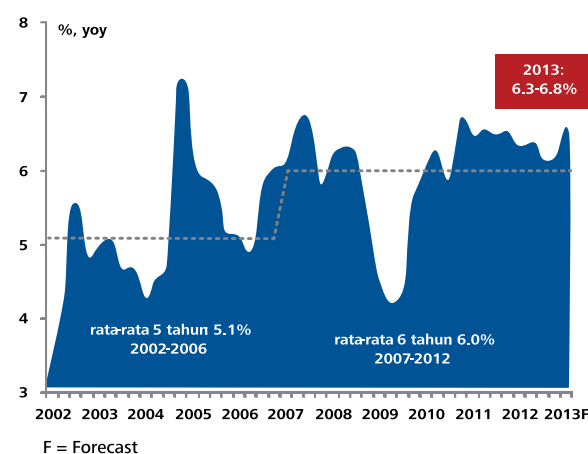
Dalam enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,0% per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata lima tahun sebelumnya (Grafik 1). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi didukung oleh ekonomi rumah tangga dan dunia usaha yang bergairah serta sistem keuangan yang kondusif dan stabil.

Inflasi sepanjang 2012 tetap rendah dan terkendali pada kisaran sasaran 4,5% \pm 1%. Kondisi ini didukung oleh inflasi inti yang stabil, *volatile food* yang terkendali dan *administered prices* yang rendah. Dengan capaian tersebut, inflasi Indonesia berada pada tren menurun (Grafik 2).

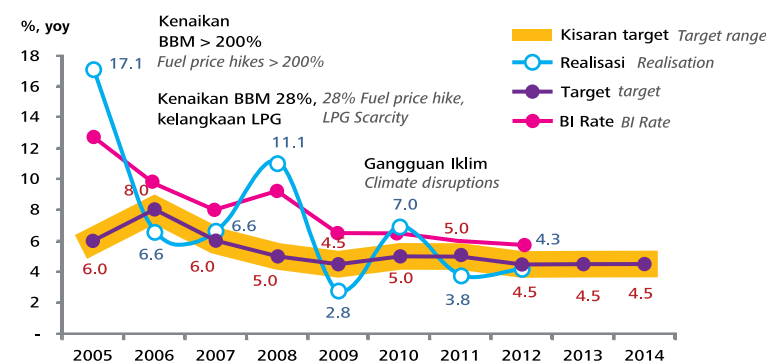
Impressive economic performance was reported in Indonesia during the past year of 2012 amid global economic conditions marred by ubiquitous uncertainty. Robust domestic economic growth was maintained at 6.2%, coupled with a low and stable level of inflation at 4.3%.

Over the past six years, the economy of Indonesia has maintained an annual level of growth in excess of 6.0%, surpassing the average posted in the five years prior to that (Figure 1). Such conditions ensure Indonesia's place among a select handful of countries that have continued to enjoy strong and stable growth. Flourishing household and corporate sectors continue to bolster sustainable economic expansion, buttressed by a stable financial system conducive to growth.

Inflation in 2012 was low and maintained within the target corridor of 4.5% \pm 1%. Such conditions were further supported by stable core inflation, controlled volatile foods and low administered prices. Accordingly, inflation in Indonesia is following a persistent downward trend (Figure 2).



Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi
Figure 1. Economic Growth



Grafik 2 Perkembangan Inflasi
Figure 2. Inflation

Sepanjang 2012, rupiah mengalami depresiasi sejalan dengan kuatnya impor akibat masih tingginya permintaan domestik. Rupiah juga melemah akibat pasokan ekspor yang menurun sejalan dengan kondisi ekonomi global yang belum pulih. Secara rata-rata, rupiah terdepresiasi sebesar 6,29% (yoy) ke Rp9.358 per dolar AS dari Rp8.768 per dolar AS pada tahun sebelumnya. Meskipun melemah, rata-rata volatilitas nilai tukar rupiah tetap dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah yakni 0,27%, lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,38%.

Kinerja perekonomian yang solid didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Pada akhir 2012, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang mencerminkan ketahanan stabilitas keuangan tercatat sebesar 1,62, lebih rendah dibanding batas maksimal 2,00. Capaian ini disumbang oleh penurunan *Non Performing Loan* (NPL) serta volatilitas di pasar SUN dan saham.

Stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari positifnya kinerja perbankan selama 2012. Hal itu tercermin pada ketahanan dalam menghadapi krisis global, peningkatan fungsi intermediasi, dan perbaikan efisiensi. Permodalan bank tercatat mengalami peningkatan dan didominasi oleh modal inti (89,51% dari total modal bank umum sebesar Rp510,50 triliun). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank umum pada 2012 tercatat sebesar 17,16%, jauh di atas batas minimal aturan rasio kecukupan modal sebesar 8%. Rasio NPL Bank Umum secara gross tercatat sebesar 1,87% pada akhir 2012, merupakan rasio NPL terendah dalam sejarah perbankan nasional.

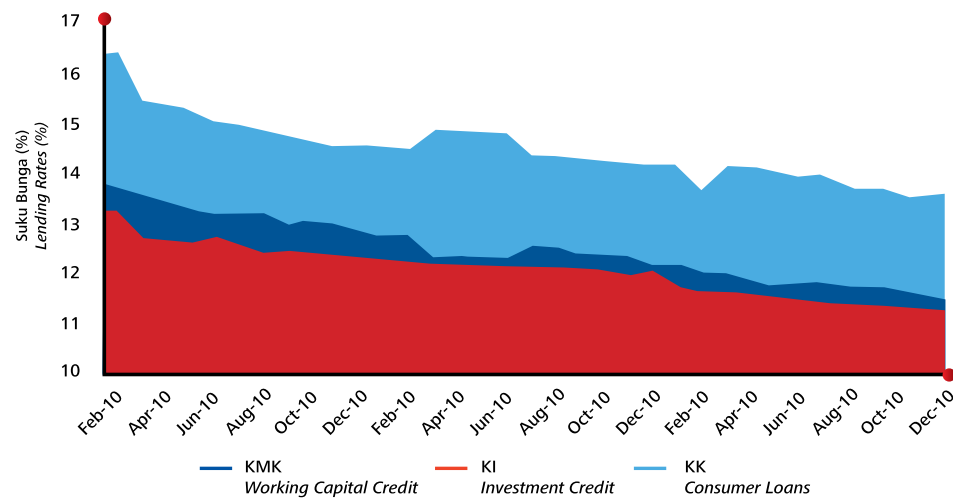
Selama 2012 intermediasi perbankan makin optimal yang ditunjukkan oleh dominannya kredit di sektor produktif, meskipun pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit bank umum mencapai 23,1% atau sebesar Rp507,8 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar 24,6%. Pertumbuhan kredit selama 2012 didominasi oleh penyaluran kredit pada sektor produktif, khususnya kredit modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing 23,2% dan 27,4%. Seiring dengan peningkatan kredit, penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp552,2 triliun atau meningkat Rp72,3 triliun (15,1%) dibanding Desember 2011 (Rp479,9 triliun). Dengan jumlah tersebut maka pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 19,9%, dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Umum tercatat pada kisaran 84%, yang masih berada pada level aman bagi perekonomian.

The value of the rupiah depreciated during 2012 in line with strong imports due to doggedly high domestic demand. The rupiah also weakened due to a slowdown in exports in harmony with the languorous global economic recovery. On average, the rupiah depreciated by around 6.29% (yoy) to Rp9,358 per US dollar from Rp8,768 per US dollar in the previous year. Despite moderate depreciation, average exchange rate volatility was maintained at the relatively low level of 0.27%, which marks an improvement on the preceding year at 0.38%.

Solid economic performance was underpinned by preserved financial system stability. At yearend 2012, financial system stability index that reflects financial stability resilience was 1.62, lower than the maximum threshold of 2.00. This performance was contributed by lowering Non Performing Loan (NPL) and volatilities in the government bond and stock market.

Positive banking performance in 2012 also gave contribution to financial system stability. Banking performance was reflected by resilience to the global crisis, improvements in the intermediation function as well as gains in efficiency. Bank capital increased and was dominated by core capital (89.51% of commercial bank capital totalling Rp510.50 trillion). The Capital Adequacy Ratio (CAR) of commercial banks was 17.16% in 2012, well above the minimum threshold of 8%. Furthermore, the gross NPL ratio of commercial banks was just 1.87%, its lowest level in the history of national banking in Indonesia.

In 2012, bank intermediation was more optimal than in previous years, as evidenced by the dominance of credit extended to productive sectors despite a moderate slowdown in overall credit growth. Credit growth at commercial banks achieved 23.1%, equivalent to Rp507.8 trillion, which is slower than that posted in 2011 at 24.6%. Credit growth in 2012 was dominated by credit allocated to productive sectors, particularly working capital credit and investment credit, which achieved 23.0% and 27.4% respectively. Congruous with the growth in credit, credit extended to micro, small and medium enterprises (MSMEs) amounted to Rp552.2 trillion, up Rp72.3 trillion or 15.1% on the position in December 2011 (Rp479.9 trillion). Of the total, the share of credit allocated to MSMEs accounted for 19.9% and the loan-to-deposit ratio of commercial banks was around 84%, which is a level considered safe for the economy.



Grafik 3
Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan

Figure 3
Average Lending Rates by Credit Types

Kondisi perbankan Indonesia makin efisien yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi 74,15%, dari 85,3% pada tahun 2011. Membaiknya efisiensi industri perbankan berkontribusi positif pada suku bunga dasar kredit yang menunjukkan tren menurun selama 2012 untuk seluruh jenis kredit yakni Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi (KK) (Grafik 3). Efisiensi juga mendukung perbankan untuk membukukan laba bersih sebesar Rp92,83 triliun, meningkat 23,7% dibandingkan laba pada tahun sebelumnya.

Seperti Bank Umum, kinerja yang positif juga ditunjukkan oleh perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada 2012, ketahanan modal perbankan syariah tetap berada di atas batasan minimal rasio kecukupan modal dengan CAR BUS dan UUS tercatat sebesar 14,13%, sementara CAR BPRS dan CAR BPR masing-masing tercatat sebesar 25,16% dan 27,55%.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS meningkat sebesar Rp44,85 triliun atau 43,69%, sedangkan pembiayaan oleh BPRS meningkat sebesar Rp0,87 triliun atau 32,46%. Meningkatnya pembiayaan didukung oleh menurunnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) gross perbankan syariah, masing-masing tercatat sebesar 2,22% untuk BUS dan UUS serta 6,15% untuk BPRS. Sementara itu, penyaluran kredit BPR tumbuh 21,46% dengan NPL gross yang menurun dari 5,22% menjadi 4,75%.

Seiring dengan perekonomian yang tumbuh tinggi pada 2012, transaksi melalui sistem pembayaran juga meningkat.

Efficiency gains in the banking industry of Indonesia were evidenced by a corresponding decline in the BOPO efficiency ratio from 85.3% in 2011 to 74.15% in the reporting year. The advances in efficiency in the banking industry contributed favourably to a downward trend in prime lending rates throughout 2012 for all types of credit, namely working capital credit, investment credit and consumer loans (Figure 3). Greater efficiency also enabled banks to book net profits amounting to Rp92.83 trillion in the reporting period, up 23.7% on that booked in the previous year.

Similar to commercial banks, upbeat performance was also reported for the Islamic banking industry, comprised of Islamic Commercial Banks (BUS), Islamic Business Units (UUS) and Islamic Rural Banks, as well as the rural banking industry. In 2012, the resilience of capital in the Islamic banking industry remained well above the capital adequacy ratio, with the CAR of BUS and UUS recorded at 14.13%, while the CAR of Islamic rural banks and conventional rural banks was 25.16% and 27.55% respectively.

Financing disbursed by Islamic commercial banks and Islamic business units increased by Rp44.85 trillion or 43.69%, while financing extended by Islamic rural banks increased by Rp0.87 trillion or 32.46%. Solid growth in financing was buttressed by declines in gross non-performing financing in the Islamic banking industry, to just 2.22% for BUS and UUS as well as 6.15% for Islamic rural banks. Meanwhile, credit allocation at rural banks grew by 21.46% with a decrease in gross NPL from 5.22% to 4.75%.

In accordance with robust domestic economic growth during the past year of 2012, transactions processed

Nilai transaksi mencapai Rp104,8 ribu triliun, meningkat 46,5% dibandingkan tahun 2011. Dari sisi volume transaksi, terjadi pula peningkatan sebesar 24,4% dengan volume transaksi sepanjang tahun 2012 mencapai 3,3 miliar transaksi.

Peningkatan transaksi melalui sistem pembayaran yang telah berlangsung aman dan lancar, tidak terlepas dari keandalan infrastruktur pendukung yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Kecepatan setelmen antar-bank di *Systemically Important Payment System* yang dioperasikan oleh Bank Indonesia dapat dijaga sesuai target, dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,77%. Di samping itu, ketersediaan layanan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai 100%.

Transaksi menggunakan uang kartal sebagai salah satu alat pembayaran di masyarakat juga meningkat. Jumlah rata-rata Uang Yang Diedarkan (UYD) meningkat 15,7% menjadi Rp370,6 triliun pada tahun 2012. Pemenuhan uang kartal dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan layak edar dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia dengan baik, terutama menjelang hari raya keagamaan.

through the payment system also increased. The value of transactions totalled Rp104.8 thousand trillion, up 46.5% on the previous year. On the other hand, transaction volume increased by 24.4% during 2012 to 3.3 billion transactions.

Growth in transactions through the payment system, which has remained secure and free from disruption, is inextricably linked to the reliability of supporting infrastructure operated by Bank Indonesia. The speed of interbank settlements in the Systemically Important Payment System hosted by Bank Indonesia was maintained in line with prevailing targets, with a success rate of 99.77%. Furthermore, the availability of the Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system, the Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), and the Bank Indonesia-National Clearing System (SKNBI) was 100%.

Transactions involving currency as a form of legal tender by the general public also increased. The average amount of money in circulation increased by 15.7% to Rp370.6 trillion in 2012. Bank Indonesia successfully met the public requirement for currency in appropriate denominations and fit for circulation, especially in the run up to religious holidays.



Strategi bauran kebijakan yang ditempuh mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan, yang tercermin pada momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali serta nilai tukar yang stabil dan terpelihara.

The policy mix strategy taken by Bank Indonesia was capable to maintain macroeconomic and financial system stability, as reflected by economic growth, stable inflation and maintained exchange rate.

Kegiatan Strategis *Strategic Activities*

Bauran Kebijakan Moneter yang Efektif

Bank Indonesia secara konsisten menempuh kebijakan yang dapat menjaga inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang merupakan kombinasi kebijakan suku bunga, nilai tukar, dan makroprudensial. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat strategi komunikasi dan mempererat koordinasi kebijakan dengan pemerintah.

Penetapan BI Rate, penyesuaian koridor bawah suku bunga *Deposit Facility* (DF) dan penguatan operasi moneter digunakan sebagai kebijakan *countercyclical*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak perlambatan ekonomi global dengan tetap mengarah pada pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Pada awal 2012, Bank Indonesia menurunkan koridor bawah suku bunga DF sebesar 50 bps menjadi 3,75%, disusul penurunan BI Rate sebesar 25 bps dari 6% menjadi 5,75% pada Februari 2012. Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia mempertahankan tingkat BI Rate tersebut hingga akhir tahun 2012. Menyikapi risiko ketidakseimbangan eksternal yang mulai terasa dampaknya pada paruh kedua 2012, Bank Indonesia melakukan langkah taktis di tataran operasi moneter dengan mempersempit koridor bawah suku bunga operasi moneter sebesar 25 bps menjadi 4,00% pada Agustus 2012.

Bank Indonesia merespons tekanan depresiasi yang cukup intens selama 2012 dengan melakukan intervensi secara terukur sehingga volatilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga. Selain intervensi di pasar, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki struktur pasokan devisa di dalam negeri.

Mulai awal tahun 2012, Bank Indonesia mewajibkan eksportir untuk menerima seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui bank devisa di dalam negeri. Upaya tersebut telah meningkatkan pasokan valas di dalam negeri. Selama tahun 2012, aliran DHE melalui bank devisa di dalam negeri terus menunjukkan tren yang meningkat. Sampai

An Effective Monetary Policy Mix

Bank Indonesia consistently promulgates policy to maintain inflation within its target corridor as well as to safeguard economic growth momentum. To this end, Bank Indonesia applies a policy mix consisting of a combination of interest rate policy, exchange rate policy and macroprudential policy. In addition, Bank Indonesia continuously strives to reinforce its communication strategy and bolster policy coordination with the government.

Setting the BI Rate, adjusting the lower interest rate corridor on the deposit facility (DF) and strengthening monetary operations are used as countercyclical policy. Countercyclical policy aims to alleviate the impact of the global economic downturn by consistently striving to achieve the inflation target set.

At the beginning of 2012, Bank Indonesia reduced the lower corridor on the DF rate by 50 bps to 3.75%, followed by a 25 bps reduction in the BI Rate from 6% to 5.75% in February 2012. Thereafter, Bank Indonesia held its benchmark policy rate until the end of the reporting year in order to maintain national economic growth momentum. In response to the risk of external imbalances that became more pronounced during the second semester on 2012, Bank Indonesia introduced tactical measures into monetary operations by narrowing the lower level of the interest rate corridor on monetary operations by 25 bps to 4.00% in August 2012.

Bank Indonesia responded to relatively intense depreciatory pressures in 2012 through measured intervention until exchange rate volatility was brought under control. In addition to market intervention, Bank Indonesia issued an array of policies to improve the structure of domestic foreign exchange supply.

At the beginning of 2012, Bank Indonesia required all exporters to receive foreign exchange from export proceeds through domestic foreign exchange banks. Consequently, the domestic supply of foreign exchange increased. In 2012, the flow of export proceeds through domestic foreign exchange banks followed an upward

akhir 2012, DHE yang diterima melalui bank devisa di dalam negeri mencapai USD128,5 miliar, atau 82,8% dari keseluruhan DHE 2012. Seiring penguatan pasokan valas melalui kebijakan DHE, Bank Indonesia juga menerbitkan *Term Deposit* (TD) valas sebagai *outlet* penempatan valas perbankan, termasuk valas yang bersumber dari DHE.

Strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga dilakukan melalui relaksasi ketentuan Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Perubahan ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (*hedging*) guna memitigasi risiko nilai tukar. Selain untuk memitigasi risiko, relaksasi aturan bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar valas dan mengurangi dominasi aktivitas *hedging* melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Bank Indonesia juga menjaga kestabilan sistem keuangan serta keseimbangan internal dan eksternal melalui kebijakan makroprudensial. Pada tahun 2012, Bank Indonesia menerapkan aturan rasio *Loan-To-Value* (LTV) maksimum untuk Kredit Pemilikan Rumah dan uang muka minimum untuk Kredit Kendaraan Bermotor. Kebijakan tersebut ditempuh untuk meminimalisasi risiko sistem keuangan yang bersumber dari kedua kelompok kredit tersebut. Digulirkannya kebijakan uang muka minimum diharapkan dapat menekan permintaan impor kendaraan bermotor sehingga mengurangi defisit transaksi berjalan.

Pelaksanaan bauran kebijakan diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan berbagai instansi terkait. Komunikasi kebijakan bertujuan mengarahkan ekspektasi publik agar searah dengan sasaran kebijakan moneter, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah terutama bertujuan untuk menjaga inflasi dan stabilitas sistem keuangan.

Penguatan koordinasi dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bank Indonesia membantu memelopori terbentuknya TPID di berbagai daerah. Sampai akhir tahun 2012, telah terbentuk 56 TPID, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Di tingkat pusat, forum TPI secara aktif melakukan pemantauan harga serta merumuskan dan merekomendasikan respons kebijakan yang diperlukan

trend, reaching Rp128.5 billion by yearend 2012, which accounted for 82.8% of all export proceeds in 2012. In line with the strength of foreign exchange supply in 2012 as a result of the new policy, Bank Indonesia also issued foreign currency Term Deposits (TD) as an outlet for bank placements in foreign currency, including that sourced from export proceeds.

Strategy to maintain rupiah exchange rate stability was also implemented by relaxing restrictions on rupiah transactions and the allocation of foreign currency credit by banks. The change to the regulation provides greater flexibility for market players in terms of hedging to mitigate exchange rate risk. In addition to mitigating risk, relaxing the regulation also aims to promote forex market deepening and reduce the dominance of hedging activity through non-deliverable forward transactions performed outside of Indonesia.

Bank Indonesia also maintained financial system stability as well as the internal and external balance through macroprudential policy. In 2012, Bank Indonesia applied a maximum loan-to-value ratio for mortgage loans and introduced minimum downpayments on automotive loans. This policy was adopted in order to minimise financial system risk stemming from both credit lines. Rolling out the new downpayment policy is expected to suppress demand for imported motor vehicles and reduce the current account deficit.

The implementation of a policy mix was strengthened by regular communication and coordination with a number of relevant institutions. Effectively communicating policy aims to steer the public's expectations in line with the objectives of monetary policy, while concomitantly broadening understanding of the policies taken by Bank Indonesia. Coordination between Bank Indonesia and the government aims primarily to control inflation and maintain financial system stability.

Reinforcing coordination in terms of inflation control at the central and local levels is achieved through Inflation Control Teams (TPI) and Regional Inflation Control Teams (TPID). During the reporting year, Bank Indonesia pioneered the establishment of inflation control teams in many areas of the country, with 56 new inflation control teams created throughout the archipelago.

At the central level, the Inflation Control Team actively monitors prices as well as formulates and offers recommendations on appropriate policy responses

Penguatan koordinasi dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Strengthening coordination in terms of inflation control at the central and local levels is achieved through Inflation Control Teams (TPI) and Regional Inflation Control Teams (TPID)

untuk mengendalikan tekanan inflasi. Di tingkat daerah, forum TPID melakukan kegiatan yang difokuskan untuk mendorong stabilisasi harga melalui operasi pasar, penguatan pasokan dan distribusi barang serta penguatan strategi komunikasi.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada area ini, Bank Indonesia bersama pemerintah dan otoritas terkait di bawah payung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) membangun Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang terintegrasi.

Strategi bauran kebijakan yang ditempuh sepanjang 2012 telah membuahkan hasil yang cukup efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini terefleksikan pada momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali serta nilai tukar yang tetap stabil dan terpelihara.

required to alleviate inflationary pressures. At the local level, regional inflation control teams focus on stabilising prices through market operations, strengthening the supply and distribution of goods as well as bolstering the communication strategy.

Bank Indonesia coordinates with several relevant authorities in order to maintain financial system stability. In this area, Bank Indonesia, in conjunction with the government and other relevant authorities developed an integrated Crisis Management Protocol (CMP) under the umbrella of the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK).

The policy mix implemented in 2012 was effective in maintaining macroeconomic stability and financial system stability during the reporting period, which is reflected by tenacious economic growth momentum, controlled inflation and stable exchange rates.



Jurus Mengendalikan Inflasi Daerah

Controlling Regional Inflation



Inflasi bisa diibaratkan seperti pencuri di siang bolong. Bahaya inflasi yang tercermin pada kenaikan harga barang-barang tanpa disadari telah menggerogoti daya beli dan menekan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah Bank Indonesia sangat fokus memerangi inflasi dengan menjaga stabilitas harga hingga ke daerah-daerah, antara lain dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Terkendalnya inflasi di daerah merupakan bukti nyata kerja TPID yang merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah. Salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam melaksanakan pengendalian inflasi adalah Provinsi Jawa Barat. Komunikasi serta koordinasi yang baik dan erat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Beberapa kebijakan stabilisasi harga, seperti operasi pasar, percepatan raskin, kunjungan lapangan, dan rapat tingkat tinggi (*high level*) diputuskan secara informal, cepat dan tanggap – melalui telepon antar-pimpinan. Sejak tahun 2008, Bank Indonesia telah menjalin komunikasi yang intensif untuk memerangi inflasi. Pada awal pembentukan TPID, setiap pertemuan diarahkan untuk membekali dan meningkatkan kepedulian anggotanya terkait inflasi, sehingga istilah seperti *administered price*, *volatile foods*, maupun inflasi inti sudah tidak asing di dalam diskusi rapat internal.

Inflation could be described as a thief operating in broad daylight. The dangers of inflation are reflected in rising prices of goods without realising the corresponding erosion of public purchasing power and the pressures on public welfare. Against this unpropitious backdrop, Bank Indonesia is particularly focused on combatting inflation by maintaining stable prices in local areas through, among others, the establishment of Regional Inflation Control Teams (TPID).

Controlled inflation in local areas is real proof that the regional inflation control teams are working in the form of collaboration between Bank Indonesia and local government. One such area where inflation control has been successful is in the province of West Java. Clear communication and tight coordination are the keys to successful inflation control. Several price stabilisation policies have been implemented, like market operations, accelerating the rice for the poor (raskin) program, field visits and informal high-level meetings over the telephone. Since 2008, Bank Indonesia has conducted intensive communication activities in order to combat inflation. During the initial establishment of regional inflation control teams, each meeting is guided towards ensuring the members know and care about inflation, therefore, terms like administered prices, volatile foods and core inflation are no longer foreign terms at the meetings.



Kerjasama dan kesadaran akan pentingnya pengendalian inflasi oleh seluruh pihak membawa Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat menjadi TPID terbaik dan memperoleh deretan prestasi lainnya, seperti pelaksana sistem resi gudang beras terbaik se-Nasional.

Strategi pengendalian inflasi yang selama ini diterapkan oleh FKPI Jawa Barat terutama adalah komunikasi melalui media massa. Dalam beberapa kesempatan, pimpinan FKPI melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional, gudang-gudang beras, dan pemotongan hewan dengan mengajak awak media massa. Langkah ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi tentang ketersediaan pasokan kepada masyarakat. Pada hari besar keagamaan nasional, informasi harga dirilis dengan intensif sehingga berita yang diperoleh masyarakat Jawa Barat lebih berimbang.

Pada 2013, FKPI Jawa Barat mencanangkan program unggulan di antaranya meningkatkan kerjasama perdagangan dengan daerah lain di Jawa dan diversifikasi konsumsi masyarakat. Selain itu, FKPI Jawa Barat akan lebih meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk sosialisasi kebijakan, serta transparansi informasi harga, stok, dan produksi dalam pengambilan keputusan stabilisasi harga.

Cooperation and awareness on the importance of inflation control by all parties helped make the Inflation Control Coordination Forum in West Java the best Regional Inflation Control Team and achieve a series of other accomplishments, like implementation of the best rice warehousing receipt system nationwide.

The inflation control strategy applied by the Inflation Control Coordination Forum in West Java primarily involves communication through the mass media. On several occasions, the head of the Forum has made unannounced visits and inspections to traditional markets, rice warehouses and slaughterhouses in the company of the mass media. This measure is effective in communicating information concerning the availability of supply to the general public. On the main national religious holidays, price information is released intensively, thereby balancing the information obtained by residents in West Java.

In 2013, the West Java Inflation Control Coordination Forum announced a flagship program to bolster cooperation among traders in other areas of Java and to diversify public consumption. In addition, the West Java Inflation Control Coordination Forum will further reinforce cooperation with print and electronic media to socialise policy and to provide transparent information on prices, stock and production in the price stabilisation decision-making process.



Fungsi intermediasi perbankan diperkuat untuk mendorong pembiayaan yang lebih merata serta menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM
Strengthening bank intermediary function to support more equitable financing and to reach low-income communities and MSMEs

Kebijakan Perbankan yang Efektif

Bank Indonesia terus menjaga stabilitas sistem keuangan untuk memberikan peluang agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga koridor kebijakan yaitu pemeliharaan ketahanan sistem keuangan, efisiensi dan daya saing perbankan, serta optimalisasi fungsi intermediasi.

Pada koridor pertama, Bank Indonesia fokus pada pemeliharaan ketahanan sistem keuangan dengan memitigasi risiko pada sistem keuangan dan memperkuat tata kelola internal bank. Bank Indonesia menerbitkan aturan rasio LTV maksimum untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan uang muka minimum untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan kegiatan usaha bank yang terkait dengan penitipan dengan pengelolaan (*trust*). Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan eksportir untuk menerima seluruh DHEnya melalui perbankan di dalam negeri. Melalui aturan *trust*, perbankan memiliki landasan hukum untuk mengelola devisa yang dititipkan termasuk yang bersumber dari DHE.

Upaya untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dilakukan pula dengan menyempurnakan kebijakan permodalan bank umum. Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank. Selain kepada bank umum, Bank Indonesia juga menerapkan aturan permodalan yang baru terhadap Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). KCBA yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara *Capital Equivalency Maintained Asset* (CEMA), yaitu alokasi modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu dan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Masih dalam kerangka pemeliharaan ketahanan sistem keuangan, pada 2012 Bank Indonesia menyempurnakan aturan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (FPJP), antara lain terkait persyaratan untuk memperoleh FPJP.

Pemeliharaan ketahanan sistem keuangan juga dilakukan melalui penataan struktur kepemilikan bank dan pengaturan kegiatan usaha bank, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik. Batas maksimum kepemilikan saham dikurangi untuk menghilangkan dominasi kepemilikan yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap operasional bank.

Effective Banking Policy

Bank Indonesia continuously maintains financial system stability in order to provide the opportunity for sustainable and inclusive economic growth. Such efforts are realised through three policy corridors, namely by maintaining financial system resilience, enhancing the efficiency and competitiveness of the banking sector as well as optimising the intermediation function.

Through the first corridor, Bank Indonesia focuses on maintaining financial system resilience by mitigating risk in the financial system and strengthening internal bank governance. Bank Indonesia issued policy regulating the maximum loan-to-value ratio for mortgage loans as well as the minimum downpayments on automotive loans. Bank Indonesia also introduced policy to regulate trust management activity at commercial banks, which is a follow-up measure to Bank Indonesia policy requiring exporters to receive all export proceeds through domestic banks. Through the trust regulation, banks now have a solid legal foundation to manage foreign exchange, including that sourced from export proceeds.

Efforts to maintain financial system resilience were also realised through amendments to the capital policy for commercial banks. Accordingly, Bank Indonesia requires commercial banks to maintain a minimum level of capital in accordance with the risk profile of each respective bank. In addition to commercial banks, Bank Indonesia also enforced new capital requirements for foreign bank branches operating in Indonesia. Consequently, foreign banks operating in Indonesia are now required to meet a minimum level of Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA), namely by allocating a certain amount of capital that meets the requirements in the form of business funds mandatorily placed in financial assets.

Under a framework of maintaining financial system resilience, in 2012 Bank Indonesia amended the regulation concerning its short-term funding facility for commercial banks (FPJP), among others by adjusting the eligibility requirements to access the short-term funding facility.

The resilience of the financial system was also maintained by restructuring bank ownership and regulating bank business activity through the application of prudential principles and good governance. The maximum shareholding was lowered in order to reduce dominant shareholders with potentially adverse effects on the operation of the corresponding bank.

Selain itu, modal inti digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan usaha tertentu dan memperluas jaringan kantor bank. Pengaturan jaringan kantor bank juga dimaksudkan agar bank memperluas jaringan kantornya di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Melalui ketentuan ini, Bank Indonesia juga menunjukkan keberpihakan pada UMKM dengan memberikan insentif kepada bank yang proporsi kredit UMKMnya signifikan dalam persyaratan perluasan jaringan kantor bank. Selain kedua kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga menyempurnakan aturan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*).

Pada koridor kedua, Bank Indonesia berupaya memperkuat efisiensi dan daya saing perbankan, di antaranya dengan tetap mewajibkan bank mempublikasikan suku bunga dasar kredit (SBDK). Pada 2012, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang mewajibkan pelaporan SBDK untuk tipe-tipe kredit korporasi, ritel, dan UMKM. Implementasi aturan tersebut dibarengi dengan pengawasan yang intensif oleh Bank Indonesia, guna memastikan tercapainya tujuan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit.

Pada koridor ketiga, Bank Indonesia memperkuat fungsi intermediasi perbankan dengan mendorong pembiayaan yang lebih merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Untuk itu, pada 2012 Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang mewajibkan bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia memberikan kredit/pembiayaan UMKM minimum sebesar 20% dari total portofolio kreditnya. Pemenuhan proporsi tersebut dilakukan secara bertahap dengan menerapkan mekanisme insentif-disinsentif.

Sebagai payung program besar keuangan inklusif, pada 2012 Bank Indonesia bekerjasama dengan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, berhasil menyelesaikan Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Cetak biru yang disetujui oleh Wakil Presiden ini menjadi pedoman berbagai instansi pemerintah dalam mengimplementasikan program-program keuangan inklusif. Salah satu program yang telah diimplementasikan yakni pencanangan Hari RABU (RAjin menaBUng) setiap awal bulan sebagai hari menabung bagi para pelajar Indonesia.

Bank Indonesia masih melanjutkan program TabunganKu untuk memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan baru 49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Pada akhir 2012, jumlah rekening TabunganKu mencapai 3,6 juta rekening

Furthermore, core capital is used by Bank Indonesia to measure the capacity of a bank in terms of certain business activities and expanding the office network. The office network regulation intends to ensure the even expansion of office networks into previously unbanked and underbanked areas. Through this regulation, Bank Indonesia also favours MSMEs by providing incentives through less stringent requirements, to banks with a large portion of their credit extended to MSMEs, to expand their office network. On top of the two policies mentioned, Bank Indonesia also re-affirmed single presence policy.

Through the second corridor, Bank Indonesia strives to strengthen banking sector efficiency and competitiveness by requiring banks to transparently publish their prime lending rates. In 2012, Bank Indonesia issued regulations requiring the prime lending rates of corporate loans, retail credit and MSME credit to be published. Implementation of this policy is accompanied by intensive supervision by Bank Indonesia in order to achieve the desired goal of lower lending rates.

Through the third corridor, Bank Indonesia underpins the bank intermediation function by promoting more equitable and affordable financing for lower income residents and MSMEs. To this end, in 2012 Bank Indonesia issued a regulation requiring banks operating in Indonesia to allocate at least 20% of their total credit/financing portfolio to MSMEs. This is being implemented gradually through an incentive/disincentive mechanism.

In 2012, as part of the wider financial inclusion program, Bank Indonesia in conjunction with the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia completed a Blueprint of the National Financial Inclusion Strategy. The Blueprint, agreed by the Vice President, is a set of guidelines for government institutions in the implementation of programs associated with financial inclusion. One of the programs implemented is the Hari RABU (RAjin menaBUng) (Savings Day) program, which designates one day at the beginning of each month for students in Indonesia to save.

Bank Indonesia also continued its TabunganKu (MySavings) program during the reporting year that aims to expand public access to formal banking services. A World Bank Survey (2010) found that only 49% of the Indonesian populace have access to formal financial institutions. At yearend 2012, the number of TabunganKu accounts

dengan dana yang dihimpun sebesar Rp3,9 triliun. Di samping itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional menandatangani Nota Kesepahaman Program Sertifikasi Tanah, yang bertujuan untuk membuka akses kredit perbankan kepada masyarakat dengan menggunakan tanah sebagai agunan.

Seperti bank umum konvensional, Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan di perbankan syariah. Penataan perbankan syariah semakin ditekankan pada upaya untuk meningkatkan tata kelola perbankan yang lebih baik seiring dengan meningkatnya jumlah aset. Pada 2012, Bank Indonesia menyempurnakan aturan *fit and proper test* bagi Pengurus Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) guna menyederhanakan mekanisme dan memperjelas pengaturan bank yang ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada tahun yang sama, Bank Indonesia juga menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan perbankan syariah. Bank Indonesia menerapkan kebijakan makprudensial berupa pengaturan *rasio financing to value* maksimum dan uang muka minimum untuk pembiayaan kepemilikan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor bagi BUS dan UUS. Bank Indonesia juga menyempurnakan aturan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). Beberapa aturan kehati-hatian kegiatan usaha syariah juga diterbitkan, yaitu aturan gadai emas, produk pembiayaan kepemilikan emas, dan produk qardh beragun syariah.

Untuk memperkuat pengawasan terhadap perbankan syariah, Bank Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Perbankan Syariah. Sistem informasi tersebut mengintegrasikan beberapa aplikasi perbankan syariah yang digunakan dalam proses pengawasan bank, baik dari *on site supervision* maupun *off site supervision*. Bank Indonesia juga menyesuaikan standar pelaporan sehingga mampu mengakomodasi aturan Basel II dengan mempertimbangkan pengawasan berbasis risiko.

Upaya untuk memujudkan industri perbankan yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi serta berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian juga diwujudkan melalui pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada 2012, Bank Indonesia merumuskan kebijakan permodalan dengan mengelompokkan zona lokasi BPR berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga keuangan berbasis wilayah. Bank Indonesia juga menyempurnakan sistem penilaian studi kelayakan pendirian BPR untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses perizinan BPR.

reached 3.6 million amounting to Rp3.9 trillion. Furthermore, Bank Indonesia collaborated with the National Land Agency (BPN) and signed a Memorandum of Understanding (MoU) for a Land Certification Program that aims to expand public access to bank credit using certified land as a form of collateral.

Similar to conventional banks, Bank Indonesia also instituted a number of new polices in the Islamic banking industry. Islamic banking regulation increasingly emphasises efforts to enhance good banking governance in line with the ongoing increase in total assets. In 2012, Bank Indonesia refined its fit and proper tests for the management of Islamic commercial banks and Islamic business units in order to simplify the mechanism and clarify regulations for banks handled by the Deposit Insurance Corporation.

In the same year, Bank Indonesia also issued a number of regulations to reinforce Islamic banking financial system stability. Bank Indonesia applies macroprudential policy in the form of enforcing a maximum financing-to-value ratio and a minimum downpayment on automotive financing for Islamic commercial banks and Islamic business units. Bank Indonesia also refined its requirements for the Islamic short-term funding facility (FPJPS). Several regulations were also issued to promote prudence in the Islamic banking industry, in the form of rules for pawning gold, gold-backed financing products and gold-backed qardh products.

Bank Indonesia developed an Islamic Banking Information System in order to advance the supervision of Islamic banks. The information system integrates a number of Islamic banking applications used to supervise such banks through on-site and off-site supervision. Bank Indonesia also refined its reporting standards to accommodate risk-based supervision under Basel II.

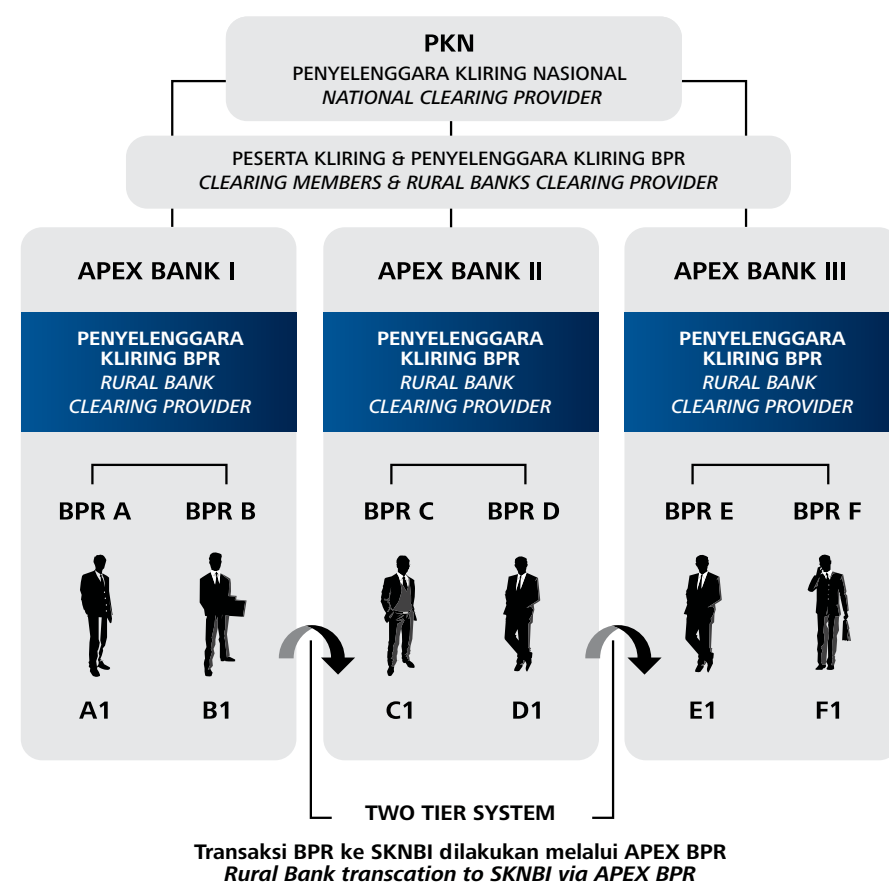
Efforts to realise a resilient and competitive banking industry that contributes to economic activity were also taken by regulating the rural banking industry. In 2012, Bank Indonesia formulated capital policy that pays due regard to which zone the rural bank is located based on economic potential and the level of competition. Furthermore, Bank Indonesia also refined the feasibility study system applicable to the establishment of new rural banks in order to enhance the quality and efficacy of the licensing process.

Dalam meningkatkan kualitas layanan BPR yang lebih baik, Bank Indonesia mengembangkan pola kerjasama APEX BPR. Dalam pola kerjasama tersebut, bank umum bertindak sebagai lembaga APEX BPR dan mengayomi BPR yang menjadi anggotanya. APEX BPR memiliki tiga fungsi utama yaitu pengelolaan dana likuiditas (*pooling of fund*), bantuan keuangan (*financial assistance*), dan bantuan teknis (*technical assistance*). Selama 2012, terbentuk dua lembaga APEX BPR sehingga secara keseluruhan terdapat tujuh lembaga APEX BPR.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia di bidang perbankan efektif dalam menjaga ketahanan perbankan. Selama 2012, kondisi perbankan Indonesia relatif aman dari imbas krisis global. Fungsi intermediasi perbankan juga berjalan pada jalur yang tepat. Atas capaian tersebut, The Asian Banker memberikan predikat Bank Indonesia sebagai “*The Best Systemic and Prudential Regulator*”.

Bank Indonesia developed a working model for APEX rural banks in order to enhance the quality of rural banking services. Through the working model, a commercial bank acts as an APEX rural bank to protect and nurture other rural banks as its members. An APEX bank has three main functions, namely the pooling of funds, financial assistance and technical assistance. In 2012, two new APEX banks were established, bringing the total to seven.

The full panoply of banking policies instituted by Bank Indonesia during the reporting year was effective in maintaining bank resilience. In 2012, the condition of banks in Indonesia remained relatively safe from global crisis spillover effects. Additionally, the bank intermediation function progressed as expected. As a result of the aforementioned accomplishments achieved in 2012, the Asian Banker awarded Bank Indonesia the accolade of “Best Systemic and Prudential Regulator”.



Meningkatkan Daya Saing BPR melalui Pengembangan Sistem Transfer Kredit Elektronik APEX BPR

Enhancing the Competitiveness of Rural Banks Through the Development of an Electronic Credit Transfer System APEX Banks

Kecil bukan berarti lemah! Istilah itu mungkin cocok bagi industri BPR. Meski kecil ditinjau dari pangsa asetnya dibandingkan bank umum, bukan berarti BPR tidak diberikan kesempatan untuk maju. BPR tetap harus *exist* dan berperan dalam perekonomian.

Melalui pelayanan nasabah yang lebih baik, daya saing BPR dapat ditingkatkan. Untuk itu, sebagai lanjutan dari program APEX BPR, Bank Indonesia mengembangkan Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) APEX BPR. STKE APEX BPR merupakan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana antar-anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penyelenggaraan STKE oleh lembaga APEX BPR merupakan perwujudan salah satu fungsi lembaga APEX BPR yakni menyediakan bantuan teknis kepada BPR anggota berupa penyediaan jasa sistem pembayaran.

Pengembangan STKE APEX BPR dimaksudkan agar daya saing BPR dapat meningkat dengan memberikan pelayanan yang lebih maju kepada nasabahnya. Melalui sistem tersebut, nababah BPR menjadi mudah melakukan pemindahan dana (transfer kredit) kepada nasabah BPR lainnya atau nasabah di bank umum, di seluruh Indonesia. Selain itu, pengembangan STKE APEX BPR juga bertujuan untuk menciptakan pasar uang antar-BPR anggota APEX.

Pengembangan STKE APEX BPR dimulai pada awal Juli 2012 melalui pilot project, bekerjasama dengan Bank Jatim yang merupakan APEX BPR di wilayah Jawa Timur. *Pilot project* tersebut melibatkan 18 BPR anggota APEX dari total anggota APEX BPR Jawa Timur yang mencapai 278 BPR. Pasca-*pilot project*, STKE APEX BPR akhirnya diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution pada 29 November 2013 di Surabaya.

Saat ini, STKE APEX BPR baru diimplementasikan oleh Bank Jatim sebagai APEX BPR wilayah Jawa Timur. Ke depannya, pengembangan STKE akan dilakukan terhadap APEX BPR di wilayah lain. Dengan demikian, pemindahan dana secara mudah dan efisien tersebut dapat dilakukan oleh BPR-BPR di wilayah lain. Pada akhirnya, implementasi STKE APEX BPR mampu mengangkat citra dan daya saing BPR dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Small does not mean weak! An apt phrase for the rural banking industry. Although small in terms of asset share to commercial banks, the rural banking industry has clear opportunities to advance. As such, rural banks must continue to exist and function in the economy.

Through better customer service the competitiveness of rural banks could be improved. To this end and as a follow-up measure to the APEX Bank Program, Bank Indonesia developed an Electronic Credit Transfer System for APEX banks, which is a system to transfer funds between members of an APEX bank and/or commercial banks through the national clearing system. Hosting the electronic credit transfer system by APEX banks is the manifestation of one function of APEX banks, namely to provide technical assistance to member rural banks in the form of payment system services.

The development of an electronic credit transfer system for APEX banks intends to boost the competitiveness of rural banks through the provision of more advanced services to their customers. Through this system, the customers of rural banks can more conveniently transfer funds (transfer credit) to customers at other rural banks and/or customers at commercial banks throughout Indonesia. In addition, the development of an electronic credit transfer system for APEX banks also aims to create an inter-rural bank money market among APEX members.

The development of an electronic credit transfer system for APEX banks began in July 2012 through a pilot project under the aegis of Bank Jatim, which is an APEX bank in East Java. The pilot project involves the participation of 18 rural bank APEX members from a total of 278 in the province. After completion of the pilot project, the Governor of Bank Indonesia, Darmin Nasution, will officially launch the electronic credit transfer system for APEX banks on 29th November 2013 in Surabaya.

Hitherto, only Bank Jatim in the province of East Java has implemented the electronic credit transfer system for APEX banks. Looking ahead, however, the electronic credit transfer system for APEX banks will be developed in other regions. Consequently, the convenient and efficient transfer of funds will also be achievable through rural banks in other regions. Ultimately, the implementation of an electronic credit transfer system for APEX banks will improve the image and competitiveness of rural banks in terms of the services they provide to their customers.



Bank Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lima bank umum untuk menerapkan program *e-ticketing* pada Transjakarta
Bank Indonesia has signed an agreement with Provincial Government of DKI Jakarta and five commercial banks to implement *e-ticketing* programme for Transjakarta

Sistem Pembayaran yang Aman dan Efisien

Peran sistem pembayaran yang andal, aman, dan efisien turut mendukung keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi dan terjaganya kestabilan sistem keuangan. Peran tersebut ditempuh oleh Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan, termasuk berkolaborasi dengan pelaku industri sistem pembayaran. Beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2012 diantaranya menyusun standar penggunaan *chip* kartu ATM/Debit, mengimplementasikan kerjasama jaringan ATM dua bank besar di Indonesia (BCA dan Mandiri), dan mengembangkan Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) bagi nasabah BPR melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Bank Indonesia juga mendorong terwujudnya interkoneksi uang elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Melanjutkan implementasi *e-ticketing* di bidang transportasi yang diterapkan di bus Transjogja dan kereta Prambanan Ekspres, pada 2012 Bank Indonesia menandatangani kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan lima bank (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan Bank DKI) untuk menerapkan program serupa pada TransJakarta.

Pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya penggunaan kartu kredit di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang lebih baik terhadap penyelenggara kartu kredit dengan menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Di dalam ketentuan mengenai APMK, Bank Indonesia mengatur batasan kepemilikan kartu kredit yang disesuaikan dengan beberapa persyaratan yakni batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan maksimum jumlah kartu kredit yang dapat dimiliki nasabah. Ketentuan tersebut juga menekankan aspek perlindungan konsumen kartu kredit dengan mengatur batas maksimum suku bunga yang dapat dikenakan oleh penyelenggara kartu kredit. Aspek perlindungan konsumen juga diperkuat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi berupa penyeragaman perhitungan bunga, pengenaan biaya atau denda, serta pengaturan kerjasama dengan pihak lain misal dalam hal penagihan.

Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam aturan anti pencucian uang bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank, dan aturan kegiatan transfer dana. Aturan anti-pencucian uang bertujuan untuk melindungi

Secure and Efficient Payment System

A payment system that is reliable, secure and efficient helps maintain economic growth momentum and financial system stability. This is achieved through a variety of Bank Indonesia policies, including collaboration with payment system industry players. The range of efforts undertaken in 2012 include, among others, setting standards for the use of chip technology on ATM/debit cards, implementing an interconnecting ATM network between two large banks in Indonesia (BCA and Bank Mandiri), and developing an electronic credit transfer system for the customers of rural banks through the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI).

Bank Indonesia also promoted electronic money interconnectivity to simplify transactions made by the general public. To continue the implementation of e-ticketing in the transportation sector, currently implemented by Transjogja buses and Prambanan Express trains, Bank Indonesia signed an agreement in 2012 with the provincial government of DKI Jakarta and five banks (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA and Bank DKI) to expand the initiative to the TransJakarta.

Domestic economic growth has stimulated an increase in the use of credit cards in Indonesia. As a result, Bank Indonesia enforces prudential principles and better risk management on credit card providers by amending regulations concerning card-based payment instruments.

Contained within the regulations on card-based payment instruments, Bank Indonesia regulates restrictions on credit card ownership in accordance with a number of requirements, like enforcing a minimum age, minimum income, maximum credit limit and maximum number of credit cards per person. The regulation also emphasises aspects of consumer protection by regulating the maximum level of interest that can be imposed by credit card providers. In addition, consumer protection is also bolstered by the application of prudential principles and transparency in the form of universal interest calculations, fees and fines as well as regulating cooperation with a third party in terms of billing and collecting.

Prudential principles are also applied to anti-money laundering measures for providers of payment system services besides banks as well as provisions for fund transfers. Anti-money laundering aims to protect the

penyelenggara dan pengguna jasa agar tidak terjebak dalam kegiatan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Sementara ketentuan transfer dana mengatur secara komprehensif kegiatan transfer dana termasuk hak dan kewajiban penyelenggara dan pengirim/penerima.

Selain melalui regulasi, Bank Indonesia juga melakukan fungsi pengawasan untuk memperkuat sistem pembayaran. Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI) maupun oleh pihak lain (APMK, uang elektronik, dan penyelenggara Transfer Dana/Kegiatan Usaha Pengiriman Uang). Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran dititikberatkan pada kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia antara lain terkait keamanan, efisiensi, perlindungan konsumen, manajemen risiko serta penerapan program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Di bidang pengedaran uang, fokus kebijakan Bank Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Bank Indonesia berupaya agar pemenuhan kebutuhan uang rupiah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya termasuk pada periode-periode dimana permintaan uang kartal mengalami peningkatan tajam, antara lain menjelang hari raya keagamaan. Tidak hanya itu, pemenuhan uang juga dilakukan dengan menjangkau wilayah-wilayah terpencil seperti daerah perbatasan dan kepulauan terluar Indonesia.

Untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang berkualitas di masyarakat, berbagai strategi dimulai dari proses perencanaan kebutuhan uang, pengadaan bahan baku, pencetakan uang, pemantauan kualitas uang hingga pengolahan uang layak edar. Bank Indonesia secara konsisten juga berupaya menanggulangi peredaran uang palsu antara lain bekerjasama dengan pihak penegak hukum, termasuk sosialisasi keaslian uang rupiah kepada masyarakat. Bank Indonesia juga meningkatkan kualitas rupiah dengan menyempurnakan desain uang dan fitur keamanannya.

Selain itu, untuk memujudkan distribusi dan pengolahan uang rupiah yang aman dan terpercaya, Bank Indonesia mendistribusikan uang secara efektif dan efisien, serta memantau sortasi dan layanan nasabah yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan *cash in transit*, termasuk pemantauan optimalisasi kinerja sarana pengolahan uang.

providers and users of services and prevent them from becoming trapped in money laundering activities or financing terrorism. Meanwhile, the comprehensive regulation concerning the transfer of funds includes the rights and responsibilities of the host as well as the sender/recipient.

In addition to regulations, Bank Indonesia also actively conducts banking supervision to strengthen the payment system. Supervision covers the providers of payment system services, including those provided by Bank Indonesia (BI-RTGS system, BI-SSSS and SKNBI) as well as third parties (card-based payment instruments, electronic money and providers of fund transfers/remittances). The scope of payment system supervision focuses on compliance to Bank Indonesia regulations relating to, among others, security, efficiency, consumer protection, risk management and the implementation of the anti-money laundering and prevention of financing terrorism program.

Regarding money supply, the focus of Bank Indonesia policy aims to meet the public requirement for currency of appropriate denominations in a timely manner and fit for circulation. Furthermore, Bank Indonesia strives to meet the requirement for rupiah during periods when demand spikes significantly, like in the run up to religious holidays. In addition, meeting the public requirement for money also includes supplying remote borderlands and the outer islands.

To guarantee the availability of quality money supply for the general public, a number of strategies are in place covering requirement planning, procuring raw materials, printing banknotes, monitoring quality and processing money fit for circulation. Bank Indonesia consistently strives to overcome the circulation of counterfeit money, among others, through cooperation with law enforcement, including the socialisation of genuine rupiah banknotes to the general public. Bank Indonesia also regularly enhances the quality of the rupiah by refining the design and security features.

In addition, Bank Indonesia effectively and efficiently distributes rupiah currency, while concomitantly monitoring sorting and the customer services offered by banks and cash in transit companies, including monitoring the optimisation of money management.

Di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL melaksanakan program layanan kas di wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

In terms of money circulation, Bank Indonesia in coordination with the Indonesian Navy, implementing program cash services in remote areas and the leading edge of the Republic of Indonesia.



Bank Indonesia juga melanjutkan program Layanan Kas Prima dalam pendistribusian uang layak edar. Program tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan layanan penukaran uang rupiah pecahan kecil bekerjasama dengan perbankan dan pihak lainnya, dan meneruskan layanan kas di wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memperkuat kerjasama layanan kas keliling, pada 2012, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menyepakati peningkatan kerjasama yang diwujudkan dalam Piagam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Selain melakukan kegiatan layanan kas, melalui kerjasama tersebut kedua pihak juga melaksanakan program kegiatan sosial (Bank Indonesia Social Responsibility) di daerah terpencil dan terdepan NKRI. Pada 2012, layanan kas keliling Bank Indonesia dengan TNI AL melayani wilayah kepulauan Maluku dan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu layanan kas keliling juga dilakukan dalam rangka ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat (Bhakesra) Nusantara 2012 dan Sail Morotai 2012.

Selain bekerjasama dengan TNI AL, layanan kas keliling di wilayah terpencil dan terdepan NKRI juga melibatkan Kepolisian Air dan Udara. Pada 2012, kerjasama tersebut diwujudkan pada kegiatan kas keliling penukaran uang rupiah layak edar di daerah terpencil di wilayah Kepulauan Seribu pada lima lokasi tujuan yaitu Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang dan Pulau Harapan.

Bank Indonesia is continuing its Prime Cash services program in the distribution money fit for circulation. This program is implemented by optimising currency exchange for rupiah of small denominations in conjunction with the banking sector and other parties as well as by continuing cash services in remote areas. In 2012, Bank Indonesia and the Indonesian Navy agreed to bolster cooperation in the form of a Joint Charter Agreement and a Cooperation Agreement in order to strengthen collaborative mobile cash services. In addition to cash services, through the agreements signed both parties also implement Bank Indonesia Social Responsibility in remote areas of the Republic of Indonesia. In 2012, mobile cash services provided by Bank Indonesia and the Navy reached the Maluku Islands and the province of East Nusa Tenggara (NTT). In addition, mobile cash services were also provided for Bhakti Kesejahteraan Rakyat (Bhakesra) Nusantara 2012 and Sail Morotai 2012.

In addition to cooperation with the Navy, providing mobile cash services in remote areas also involves the cooperation of the Harbour Patrol and Air Police. In 2012, such cooperation was realised through mobile cash services and rupiah exchange fit for circulation in five remote areas of The Thousand Islands, located on Tidung Island, Pramuka Island, Untung Java island, Panggang Island and Harapan Island.



Rute Layanan Kas di Wilayah Terpencil/Terluar NKRI 2012 Kerjasama Bank Indonesia-TNI AL

*The Route of Mobile Cash Services to Remote Areas and
Outer Islands in Conjunction with the Indonesian Navy*



Melayani Hingga ke Pelosok Negeri

Serving Up All Over the Country



Uang merupakan simbol kedaulatan suatu negara sehingga penggunaannya harus menjangkau seluruh wilayah yang menjadi teritori negara tersebut. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan dibatasi oleh perairan yang luas, tidak menghalangi upaya Bank Indonesia melayani kebutuhan uang layak edar untuk masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Salah satu contoh layanan kas yang menjangkau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPw BI Provinsi NTT). NTT merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau dan hanya 3,61% atau 43 pulau yang telah dihuni. Kawasan NTT yang cukup luas dan tersebar dalam pulau dan kepulauan serta jauh dari pusat pemerintah memiliki implikasi pada kurang tersedianya sarana fisik dan prasarana yang memadai. Hal ini membawa dampak serius bagi pengembangan akses ekonomi karena terbatasnya sarana transportasi.

Akses transportasi yang sangat minim khususnya ke pulau-pulau terpencil tidak dipungkiri merupakan kendala terbesar bagi kegiatan Bank Indonesia terutama dalam pemenuhan kebutuhan uang layak edar di wilayah tersebut. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi untuk melaksanakan tugas. Pada 2012, KPw BI Provinsi NTT melakukan kegiatan kas keliling sekaligus melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah di empat pulau yang merupakan wilayah terpencil dan sangat sulit untuk akses transportasi. Empat pulau tersebut yakni Pulau Solor, Pulau Ndao, Pulau Palue dan Pamana.

Untuk mengakses wilayah tersebut, moda transportasi yang digunakan tidak hanya satu jenis saja. Seperti halnya di Pulau Palue, perjalanan dimulai dari Kota Kupang dengan menggunakan pesawat jenis Fokker ke Kota Maumere di Sikka. Setelah mendarat di Kota Maumere, perjalanan masih harus dilanjutkan dengan menggunakan mobil menuju dermaga Ropa yang berjarak ± 60 km

Money is a symbol of a nation’s sovereignty and, as such, its use must extend to all areas of the nation’s territory. The geographical circumstances of Indonesia, comprised of thousands of islands surrounded by vast swathes of water, do not prevent Bank Indonesia from serving the public requirement for money fit for circulation in all corners of the immense Indonesian archipelago.

One example of cash services that reached remote areas is that implemented by the Bank Indonesia Representative Office in East Nusa Tenggara (NTT) (KPw Bank Indonesia NTT Province). NTT is an island province consisting of 1,192 islands with only 43 of the islands (3.61%) inhabited. The NTT region is vast and located far from the central government in Jakarta, which implies a lack of adequate physical infrastructure. This has serious implications on the development of economic access as a result of limited transportation facilities.

Minimal transportation access, especially to remote islands, is undeniably the most binding constraint for Bank Indonesia to overcome, particularly in terms of meeting the public requirement for money fit for circulation in such areas. However, such circumstances do not discourage the Bank Indonesia Representative Office from implementing its tasks. In 2012, the Bank Indonesia Representative Office in NTT rolled out mobile cash services while concomitantly socialising aspects of genuine rupiah currency on four of the most remote islands with very limited access to transportation. The four islands were Solor Island, Ndao Island, Palue Island and Pamana Island.

Not only one type of vessel could be used to access the area. Similar to Palue Island, the journey began from Kupang City abroad a Fokker plane to the city of Maumere in Sikka. From there, a vehicle is taken approximately 60 km to the harbour at Ropa, along a winding and heavily potholed road that takes about one hour. From the harbour at Ropa, a wooden seafaring fishing vessel owned

dan ditempuh selama satu jam perjalanan. Jalan menuju dermaga Ropa berkelok-kelok khas daerah pegunungan dengan kondisi rusak parah, aspal jalan yang mengelupas serta lubang-lubang yang tersebar di sepanjang jalan. Setelah sampai di dermaga Ropa, untuk menuju Pulau Palue, tim masih harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal kayu milik nelayan setempat. Waktu tempuh dari Pelabuhan Ropa menuju Pulau Palue sekitar 2 jam perjalanan. Sungguh perjuangan yang panjang dan melelahkan.

Kerja keras untuk mencapai wilayah tersebut terbayarkan. Sesampainya di Palue, tim disambut langsung oleh Sekretaris Camat Palue dan warga yang sudah tidak sabar untuk menukar uang. Lokasi penukaran dan sosialisasi keaslian uang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, dan untuk menuju kesana, tim harus beriringan dengan menggunakan ojek motor. Antusiasme warga dalam melakukan penukaran uang serta kegiatan sosialisasi keaslian uang rupiah menjadi pengobat setelah perjalanan yang melelahkan.

Hampir semua uang yang ada di Pulau Palue dan Pulau lainnya dapat dikategorikan sebagai uang tidak layak edar. Geografis daerah Kepulauan dan dekat dengan laut menyebabkan kondisi uang di NTT lebih cepat rusak dan lusuh. Akses untuk penukaran uang ke kota besar pun dirasa cukup sulit mengingat akses transportasi antar-pulau sangat terbatas. Kondisi inilah yang mendasari kegigihan KPw BI Provinsi NTT untuk memprioritaskan kegiatan kas keliling ke wilayah terpencil. Walaupun dengan modal Rp 750.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00 setiap Pulau, manfaat yang didapat oleh masyarakat di wilayah tersebut tidak ternilai harganya. Sungguh suatu kebanggaan melayani masyarakat hingga ke pelosok negeri.

by locals was taken for the two-hour journey to Palue Island. Overall it was a long and exhausting journey.

Eventually, all the hard work to reach the area paid off. Upon arriving in Palue, the team was welcomed directly by the Secretary of the District Head of Palue as well as local residents determined to exchange their money. The money exchange and socialisation activities were conducted in a room located in the district offices, to which the team was forced to ride motorcycle taxi. The enthusiasm of local residents to exchange money and absorb the socialisation activities was an elixir after the tiresome and arduous journey.

Nearly all the currency found on the Island of Palue and on other islands in the region was not really fit for circulation. The geographic conditions of the area coupled with its proximity to the sea caused money in NTT to degrade quickly. Access to money exchanges, even in the larger cities, is extremely limited considering that interisland transportation access is also limited. It is those conditions that underlie the persistence and determination of the Bank Indonesia Representative Office in NTT to prioritise mobile cash services in such remote areas. With capital totalling Rp750 million to Rp1 billion per island, the benefits felt by the local residents are invaluable. It is truly an honour to serve local residents in all corners of the large Indonesian archipelago.



Melalui pengembangan klaster, Bank Indonesia berupaya agar akses pasar terhadap berbagai komoditas semakin luas.
By developing cluster of commodities, Bank Indonesia is committed to widen market access.

Pengembangan Sektor Riil & Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja perekonomian Indonesia yang tetap solid tidak terlepas dari kontribusi sektor riil dan UMKM. Seperti halnya sektor keuangan, selama 2012 sektor riil tetap tumbuh. Sektor-sektor yang berorientasi domestik, antara lain sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi, tumbuh tinggi seiring kuatnya aktivitas transaksi domestik. Untuk sektor yang berorientasi ekspor, mengalami sedikit tekanan karena pengaruh pelemahan permintaan global. Salah satu pelaku ekonomi yang turut menggerakkan kinerja sektor riil adalah UMKM. Kinerja UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Realisasi kredit UMKM selama 2012 mencapai Rp552,2 triliun, meningkat 15,1% dari tahun sebelumnya.

Signifikannya peran sektor riil dan UMKM dalam perekonomian nasional, mendorong Bank Indonesia untuk turut berperan dalam meningkatkan kapasitas sektor tersebut. Upaya yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan teknis melalui penelitian, penyediaan informasi dan fasilitasi.

Pada 2012, Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian terkait UMKM, di antaranya penelitian mengenai komoditi/produk/jenis usaha unggulan UMKM dan pola pembiayaan/lending model usaha kecil. Kedua penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyediakan informasi bagi perbankan, investor dan wirausahawan mengenai komoditas UMKM yang layak untuk dikembangkan dan dibiayai. Untuk mempermudah akses informasi mengenai UMKM, juga disediakan informasi UMKM dalam website Bank Indonesia.

Pada tataran praktis, pengembangan UMKM dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kegiatan fasilitasi. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan berbagai klaster komoditas pangan yang dilakukan secara nasional maupun per daerah sesuai karakteristik masing-masing daerah. Pilihan untuk mengembangkan komoditas pangan tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Besarnya jumlah penduduk Indonesia yakni lebih dari 240 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 1,49% per tahun, serta tingginya pertumbuhan ekonomi diatas 6%, menyebabkan kebutuhan pangan masyarakat meningkat. Untuk itu, diperlukan upaya konkrit guna memperkuat ketahanan pangan.

Real Sector and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Development

Persistently robust economic performance in Indonesia is linked to the contribution of the real sector and MSMEs. Similar to the financial sector, the real sector in 2012 continued to expand. Domestic oriented sectors, including the trade sector, hotels and restaurants, as well as transportation and communications grew solidly in line with strong domestic transactional activity. Export-oriented sectors experienced slight pressures stemming from weaker global demand. One economic agent that has continued to drive real sector performance is the MSME sector. The performance of MSMEs should not be underestimated. Credit realisation to MSMEs in 2012 totalled Rp552.2 trillion, up 15.1% on the previous year.

The significance of the real and MSME sectors' role in the national economy encourages Bank Indonesia to expand the capacity of both sectors. Bank Indonesia's efforts to empower the real sector and MSMEs are realised in the form of providing technical assistance through research as well as providing information and facilitation.

In 2012, Bank Indonesia initiated a range of research into micro, small and medium enterprises regarding leading commodities/products/business types and potential lending models for small businesses. The research aims to provide detailed information to the banking sector, investors and entrepreneurs concerning financially feasible MSME commodities to develop. The information collated on MSMEs is conveniently presented on Bank Indonesia's official website.

From a practical standpoint, Bank Indonesia implements MSME development through facilitation. Accordingly, Bank Indonesia develops food commodity clusters nationally and locally in line with the specific characteristics of each region. The choice to develop food commodities is linked to Bank Indonesia's efforts to maintain price stability. The population of Indonesia exceeds 240 million people with annual growth at around 1.49%, coupled with 6% economic growth; therefore, the food requirement is also increasing. In this context, concrete efforts are required to ensure food security.

Klaster yang dikembangkan secara nasional oleh Bank Indonesia adalah klaster cabai dan bawang merah. Kondisi harga cabai dan bawang merah yang melambung akibat kurangnya pasokan, gangguan distribusi dan struktur pasar yang terdistorsi pada gilirannya memberikan tekanan pada inflasi. Untuk itu, melalui kantor pusat maupun kantor perwakilannya di daerah, Bank Indonesia mengembangkan klaster kedua komoditas tersebut. Untuk program klaster cabai di daerah, dilaksanakan oleh tujuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu Makassar, Bandung, Lampung, Bengkulu, Malang, Tasikmalaya dan Kediri. Sedangkan untuk klaster bawang merah dilaksanakan di dua Kantor Perwakilan yaitu Cirebon dan Tegal. Selain cabai dan bawang merah, Bank Indonesia juga memperkuat ketahanan untuk komoditas beras.

Sejalan dengan pengembangan klaster nasional, melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dikembangkan pula klaster daerah. Komoditas yang dibudidayakan adalah komoditas yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan dinilai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Komoditas tersebut meliputi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan.

Dalam program klaster tersebut, Bank Indonesia memberikan pendampingan pada aspek sistem produksi, manajemen klaster, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan. Melalui pengembangan klaster tersebut, Bank Indonesia berupaya agar akses pasar terhadap kedua komoditas tersebut semakin luas, antara lain dengan memperpendek rantai pemasaran yang diidentifikasi berkontribusi terhadap peningkatan harga.

Selain berpartisipasi mendorong pengembangan sektor riil dan UMKM dari sisi komoditas, Bank Indonesia juga memberikan perhatian terhadap pelaku usahanya. Mulai 2012, Bank Indonesia menjalankan program “Penciptaan Wirausaha Baru”. Sebagai *pilot project*, program tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Indonesia dan tujuh Kantor Perwakilan Bank Indonesia yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Yogyakarta. Dalam program tersebut, Bank Indonesia menghimpun mahasiswa, eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan masyarakat umum untuk dilatih menjadi wirausahawan baru. Melalui program tersebut, diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi. Program tersebut sekaligus diharapkan dapat mendukung upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain pelatihan, Bank Indonesia

The clusters developed nationally by Bank Indonesia include chilli pepper clusters and shallot clusters. Price bubbles affecting chilli peppers and shallots due to limited supply, disruptions to distribution and a distorted market structure ultimately intensify inflationary pressures. Consequently, through head office and regional offices, Bank Indonesia developed clusters for the two commodities mentioned. The local chilli cluster program was implemented by seven Bank Indonesia Representative Offices, namely Makassar, Bandung, Lampung, Bengkulu, Malang, Tasikmalaya and Kediri. While shallot clusters were developed by two Bank Indonesia offices in Cirebon and Tegal. In addition to chilli peppers and shallots, Bank Indonesia also helped strengthen the resilience of rice.

In harmony with the development of national clusters, through Bank Indonesia Representative Offices, a number of local clusters were also developed. The commodities selected are those that are suitable to local characteristics in each respective locale and considered to have strong economic potential. The chosen commodities stem from the processing industry and agricultural sector, including livestock, forestry and fisheries.

In the cluster program, Bank Indonesia provides assistance regarding the production system, and cluster management as well as facilitating marketing and financing. Through the development of clusters, Bank Indonesia strives to broaden the market access of both commodities by, among others, truncating elements of the supply chain deemed responsible for raising prices.

In addition to fostering real sector and MSME development through commodities, Bank Indonesia also pays due consideration to the human component of such businesses. Commencing in 2012, Bank Indonesia rolled out a “Create New Entrepreneurs” program. As a pilot project, this program is implemented at Bank Indonesia head office and seven representative offices, namely Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang and Yogyakarta. Through the program, Bank Indonesia gathers students, ex-migrant workers and the general public to train as new entrepreneurs. Furthermore, participants of the program are expected to have the capacity to create centres of economic activity. The program is also expected to buttress efforts to reduce unemployment and bolster sustainable economic growth. In addition to training, Bank Indonesia, through Social Responsibility, also provides seed capital assistance to eligible participants. Symbolically,

Selain berpartisipasi mendorong pengembangan sektor riil dan UMKM dari sisi komoditas, Bank Indonesia juga memberikan perhatian terhadap pelaku usahanya, antara lain melalui program “Penciptaan Wirausaha Baru”.

In addition to fostering real sector and MSME development through commodities, Bank Indonesia also pays due consideration to the human component of such businesses. Commencing in 2012, Bank Indonesia rolled out a “Create New Entrepreneurs” program



melalui Program Sosial Bank Indonesia juga menyediakan bantuan *seed capital* bagi peserta yang layak. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, kepada perwakilan peserta pelatihan pada saat penyelenggaraan *Global Entrepreneurship Week* Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada 12 November 2012, di Jakarta.

assistance was handed over by the Vice President of the Republic of Indonesia, Boediono, to trainee representatives during the Global Entrepreneurship Week hosted by Bank Indonesia on 12th November 2012 in Jakarta.

Mengolah Potensi Daerah

Cultivating Local Potential

Tidak hanya sebatas menjaga stabilitas ekonomi, peran nyata Bank Indonesia juga diwujudkan dengan menggerakkan roda perekonomian. Keberadaan Bank Indonesia di berbagai wilayah mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah dan Yogyakarta) yang turut mengembangkan komoditas potensial di daerahnya.

Sapi perah dan sapi potong merupakan komoditas sub-sektor peternakan yang sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Jawa Tengah. Tingginya permintaan daging dan susu sapi yang berkualitas belum sepenuhnya mampu dipenuhi dari pasokan dalam negeri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menempuh kebijakan membuka kran impor susu, sapi hidup atau bahkan daging sapi dari negara lain. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan perbankan, mendorong pengembangan klaster sapi perah dan sapi potong melalui pendekatan *value chain* (klaster) di Getasan, Kabupaten Semarang.

Melalui program klaster sapi tersebut, para peternak diperkenalkan cara mengelola kandang secara komunal dan model bisnis tata niaga sapi. Pengelolaan kandang secara komunal tersebut berhasil meningkatkan modal sosial antar-anggota kelompok, karena pemeliharaan kandang dan pembuatan pakan dilakukan bergiliran, sehingga lebih maksimal. Sistem tersebut sekaligus menjamin kredit program yang disalurkan perbankan karena transaksi dilakukan melalui rekening yang dimiliki oleh kelompok. Sistem tersebut mengilhami terciptanya skim kredit baru oleh perbankan yaitu KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sapi).

Model bisnis tata niaga sapi juga diperkenalkan sebagai bagian dari pengembangan klaster sapi. Melalui model tersebut, para peternak akan memperoleh keuntungan yang lebih baik karena ada kejelasan mekanisme penjualan yang didasarkan pada timbang berat dan bukan berdasarkan perkiraan semata. Selain itu, diperkenalkan pula sistem pemasaran berupa sistem rantai pemasaran tertutup dimana peternak dan pembeli terikat dalam perjanjian/kesepakatan yang saling mengikat, sehingga segala sesuatunya terukur, terprogram dan transparan.

Not limited to merely maintaining economic stability, the real purpose of Bank Indonesia is also to ensure that the wheels of the economy keep on turning. Bank Indonesia's presence throughout Indonesia helps provide value added for the economies in surrounding areas. One such office is the Bank Indonesia Representative Office for Central Java and Yogyakarta, where potential commodities are being developed in their local environs.

Dairy cows and beef cattle are a subsector with strong development potential in Central Java. Strong demand for high-quality beef and milk is not fully met by domestic supply. Consequently, the government implements policy to open the flow of imported cow milk, livestock and beef from other countries. In a departure from such conventional thinking, the Bank Indonesia Representative Office for Central Java and Yogyakarta, in conjunction with local government institutions and the banking sector, developed dairy cow and beef cattle clusters through a value chain approach in Getasan, Semarang.

Through the clusters, beef and dairy farmers were introduced to communal shed management and a business model for a cattle trading system. Communal shed management boosts the level of social capital among members of the group due to rotating shed maintenance and food production. The program simultaneously guarantees the credit program extended by the banks because the transactions are processed through the group account. The system inspired the creation of a new credit scheme from the banks, namely Cattle Housing Loans (KPRS).

The cattle trading system business model was also introduced as part of beef cattle cluster development. Through this model, breeders could realise greater profit due to clarification of the sales mechanism based on actual weight and not merely estimates. Furthermore, a marketing system was also introduced in the form of a closed marketing chain where breeders and purchasers are bound by mutually binding agreements, where all elements are measures, programmed and transparent.

Bersama sejumlah pihak, Bank Indonesia juga melakukan repopulasi bibit sapi dengan cara inseminasi sperma beku dari bibit sapi unggul impor. Sebelum program pengembangan klaster sapi perah diimplementasikan, rata-rata susu yang dapat dihasilkan dari satu ekor sapi Getasan hanya empat sampai lima liter per hari. Melalui berbagai upaya peningkatan mutu dan produktivitas, angka tersebut meningkat menjadi tujuh sampai sepuluh liter. Meningkatnya produksi susu juga menciptakan peluang usaha baru bagi beberapa peternak. Tak sekadar menjual susu segar, peternak juga dapat memproduksi sabun susu yang dihasilkan dari pengolahan susu dengan campuran minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan madu. Selain itu peternak juga berkreasi membuat kerupuk susu, dodol susu, dan steak susu.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pembangunan kandang komunal dan digester (alat pengolah limbah organik). Pembangunan sarana tersebut sekaligus menciptakan Desa Mandiri Energi di wilayah setempat. Dengan 1 (satu) unit *digester* dapat dihasilkan bio gas untuk 15 kepala keluarga. Energi yang tercipta juga dapat dimanfaatkan pula untuk penerangan kandang, penggerak mesin *rice mill*, dan mesin *chopper*. Dalam perkembangannya, proyek kandang komunal dan *digester* biogas ini tidak hanya menjawab masalah lingkungan, namun juga menciptakan nilai tambah ekonomi yang berasal dari peningkatan penghasilan peternak dari produksi pupuk organik.

Together with a number of parties, Bank Indonesia is repopulating beef and dairy herds through artificial insemination using imported frozen sperm from superior animals. Prior to implementation of dairy cattle cluster development, the average amount of milk produced by one dairy cow in Getasan was four to five litres per day. Through a variety of efforts undertaken to augment quality and productivity, dairy cows in the region now produce as much as seven to ten litres per day. The increase in milk production has also created a number of downstream business opportunities for the farmers, no longer merely selling milk but also milk soap, made from milk processed with palm oil, olive oil and honey. In addition, farmers can also produce milk crackers, milk sweets and milk steak.

Through the Bank Indonesia Social Responsibility Program, Bank Indonesia has also developed communal and digester sheds (organic waste processing). The development of such facilities also concomitantly helped create energy self-sufficient areas in the region. One digester unit can produce enough biogas for 15 families. The energy created can also be used to light the cattle sheds as well as power rice mills and choppers. In its development, the communal shed and biogas digester project not only answers environmental problems but also creates economic value added from increased farmer output and the production of organic fertilisers.

Mengolah Potensi Daerah

Cultivating Local Potential



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan perbankan, mendorong pengembangan kluster sapi perah dan sapi potong melalui pendekatan *value chain*.

The Bank Indonesia Regional Office for Central Java and Yogyakarta, in collaboration with local government institutions and the banking sector, developed dairy cow and beef cattle clusters through a value chain



Lokasi / Location

Kecamatan / Sub District : Getasan,
Kabupaten / District : Semarang
Provinsi / Province : Jawa Tengah



Tahapan Pembangunan Desa Mandiri Energi

Stages Development of Independent Rural Energy

<p>Bibit</p> <p>Sperma Beku Import</p> <p>Seeds</p> <p>Imported Frozen Sperm</p>	<p>Lingkungan</p> <p>Kandang komunal yang menghasilkan energi biogas</p> <p>Environment</p> <p>Communal based cowshed producing biogas energy</p>	<p>Pakan</p> <p>Energi berbasis alfaafa</p> <p>Feed</p> <p>Energy-based alfaafa</p>	<p>Pengembangan Produk</p> <p>Sabun susu Steak susu Dodol susu</p> <p>Product Development</p> <p>Milk soap Milk steak Milk lunthead</p>	<p>Produktivitas</p> <p>5.000 liter/minggu (distribusi via Gapoktan)</p> <p>Productivity</p> <p>5000 litres/week (distributed via cow farmer union)</p>
--	---	---	---	---



Isu percepatan pemulihan ekonomi global dan upaya untuk menjaga stabilitas dikawasan menjadi fokus pembahasan dalam berbagai fora kerjasama.
The issue of expediting the global economic recovery and efforts to maintain stability in the region were the primary focus of discussions at several collaborative fora.

Kerjasama Internasional

Upaya menjaga tetap kondusifnya situasi perekonomian Indonesia juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kerjasama dengan otoritas lain baik secara bilateral, regional maupun internasional. Pada 2012, isu percepatan pemulihan ekonomi global dan upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan menjadi fokus pembahasan dalam berbagai fora kerjasama tersebut.

Dalam tataran bilateral, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai bank sentral lain secara langsung. Pada 2012, Bank Indonesia mempererat kerjasama dengan menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Pertemuan tersebut berhasil menyepakati upaya untuk meningkatkan jalinan kerjasama antar kedua bank sentral dalam bentuk tukar-menukar informasi dan pengalaman.

Bank Indonesia juga menjalin kerjasama pengawasan bank lintas negara (*cross border banking supervision*) dengan otoritas pengawas bank negara lain yang diformalkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama tersebut meningkatkan efektivitas Bank Indonesia dan *counterpart*-nya dalam melakukan pengawasan terhadap bank yang beroperasi lintas negara. Kedua belah pihak dapat melakukan pertukaran informasi, konsultasi dan pemeriksaan bersama. Pada 2012, Bank Indonesia menandatangani MoU kerjasama dengan dua otoritas pengawasan yakni Australian Prudential Regulatory Authority dan Financial Service Commission – Korean Financial Supervisory Services. Pada periode sebelumnya, Bank Indonesia telah menjalin kerjasama serupa dengan Bank Negara Malaysia, China Banking Regulatory Commission dan Monetary Authority of Singapore.

Pada lingkup regional, peningkatan stabilitas sektor keuangan dan liberalisasi serta integrasi sektor keuangan ASEAN menuju pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 menjadi tema besar ASEAN selama 2012. Di kawasan Asia Pasifik, Bank Indonesia bersama dengan bank sentral negara-negara anggota ASEAN dan tiga mitra dialog yakni China, Jepang dan Korea (ASEAN + 3) berupaya untuk memperkuat jaring pengaman keuangan kawasan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan peran Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)³ sebagai jaring pengamanan keuangan regional.

³ CMIM merupakan *pooling of funds* negara anggota dengan kontribusi yang berasal dari cadangan devisa negara. Kontribusi tersebut disampaikan melalui penyerahan *commitment letter* oleh masing-masing bank sentral.

International Cooperation

Efforts to maintain a favourable economy in Indonesia are also undertaken by Bank Indonesia through cooperation with other authorities bilaterally, regionally and internationally. In 2012, the issue of expediting the global economic recovery and efforts to maintain stability in the region were the primary focus of discussions at several collaborative fora.

Bilaterally, Bank Indonesia cooperates directly with a number of other central banks. In 2012, Bank Indonesia tightened coordination through bilateral meetings with Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Consensus was reached at the meeting to reinforce cooperation between the two central banks in the form of exchanging information and experiences.

Bank Indonesia also partakes in cross-border banking supervision with other banking supervisors in the region formalised through a Memorandum of Understanding (MoU). This form of cooperation boosts the effectiveness of Bank Indonesia and counterpart when supervising banks operating across borders. Both parties exchange information, consult with one another and conduct joint inspections. In 2012, Bank Indonesia signed a MoU with two supervisory authorities, namely the Australian Prudential Regulatory Authority and the Financial Service Commission-Korean Financial Supervisory Services. In the previous year, Bank Indonesia initiated similar collaborative efforts with Bank Negara Malaysia, the China Banking Regulatory Commission and the Monetary Authority of Singapore.

Regionally, the main themes of ASEAN in 2012 covered enhancing financial sector stability and liberalization as well as ASEAN financial sector integration in preparation for the inauguration of the ASEAN Economic Community in 2015. In the Asia-Pacific Region, Bank Indonesia, under the auspices of other central banks from ASEAN member countries and three dialogue partners (China, Japan and Korea) (ASEAN+3), strives to strengthen the regional financial safety net. Such efforts are realised by expanding the role of the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)³ as a regional financial sector safety net.

³ CMIM represents a *pooling of funds* among member countries stemming from foreign exchange reserves. The contribution is delivered through a *commitment letter* by each respective central bank.

Pada lingkup kerjasama antar bank sentral, Bank Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan di kawasan melalui berbagai forum internasional.

Within the scope of international cooperation between central banks, Bank Indonesia plays an active role in maintaining regional stability through international forums.



Kapasitas pendanaan CMIM ditingkatkan dari semula USD120 miliar menjadi USD240 miliar. Selain itu, jenis fasilitas yang semula hanya untuk penanganan krisis diperluas sehingga mencakup pula aspek pencegahan krisis. Terkait peningkatan kapasitas tersebut, Bank Indonesia meningkatkan komitmen pendanaan dari semula USD4,55 miliar menjadi USD9,1 miliar. Untuk mendukung upaya penciptaan stabilitas ekonomi dan keuangan di kawasan, anggota ASEAN + 3 juga meningkatkan peran dan kapasitas ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai unit *surveillance* independen di kawasan.

Dalam tataran internasional, penguatan kerjasama antar otoritas moneter juga dilakukan melalui fora Internasional Monetary Fund (IMF). Salah satu isu yang mengemuka adalah penguatan kapasitas pendanaan IMF untuk pemulihan krisis. Terkait itu, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, memberikan komitmen untuk turut meningkatkan kapasitas pendanaan IMF. Hal tersebut merupakan langkah konkret solidaritas negara ASEAN dalam upaya mencegah dan menanggulangi krisis global.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan juga berperan aktif dalam fora internasional yang lain seperti G-20. Beberapa isu yang dibahas dalam fora tersebut antara lain (i) kerangka kerja untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan dan seimbang, (ii) reformasi arsitektur keuangan internasional, (iii) reformasi sektor keuangan, (iv) pasar komoditas energi, dan (v) keuangan inklusif.

Pada lingkup kerjasama antar bank sentral, Bank Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan di kawasan melalui forum EMEAP, SEACEN dan BIS. Dalam forum kerjasama tersebut, dibahas pula isu-isu yang relevan dengan Indonesia, diantaranya implikasi krisis di Eropa dan reformasi keuangan global bagi negara berkembang.

The funding capacity of CMIM has increased from USD120 billion to USD240 billion. In addition, the types of facilities offered have expanded from mere crisis resolution to now include aspects of crisis prevention. In line with the increase in capacity, Bank Indonesia has increased its funding commitment from USD4.55 billion to USD9.1 billion. In support of efforts to create and maintain financial and economic stability in the region, ASEAN+3 also expanded the role and capacity of the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) as an independent surveillance unit in the region.

On the international stage, cooperation with other monetary authorities is strengthened through a number of International Monetary Fund (IMF) fora. One issue found was strengthening IMF funding capacity for crisis recovery. To this end, ASEAN countries, including Indonesia, gave their commitment to expand the funding capacity of the IMF. This represents a concrete measure of solidarity between ASEAN countries to prevent and overcome global crises.

Bank Indonesia, together with the Ministry of Finance, plays an active role in other international fora, like the G-20. Several salient issues discussed at such fora include: (i) a framework to create growth that is robust, sustainable and balanced; (ii) international financial architecture reform; (iii) financial sector reform; (iv) domestic commodity markets; and (v) financial inclusion.

Within the scope of international cooperation between central banks, Bank Indonesia plays an active role in maintaining regional stability through EMEAP, SEACEN and BIS. A number of issues relevant to Indonesia are discussed at such fora, including the implications of the crisis in Europe and global financial reforms on developing countries.

10-11 Januari Prudential Borrowing Assessment on Corporate Financial Data Deutsche Bundesbank	11 April Workshop Executive Leadership Chung Kong Graduate School of Business	17-19 April International Financial Crisis and Crisis Management Protocol Workshop Deutsche Bundesbank
		13-14 Juni Budgeting System Management Deutsche Bundesbank
22-27 Juni 6th SEACEN Intermediate Leadership Course: Leadership in Times of Uncertainty SEACEN	22-27 Juni Macroprudential Supervision Deutsche Bundesbank	18-22 Juni Forensic Accounting ADB/APEC
11-13 Juli International Cooperation Deutsche Bundesbank		
6-8 November Seminar Security Settlement System Deutsche Bundesbank	17-19 November Seminar Security Settlement, Payments and Market Monitoring De Nederlandsche Bank	19-22 November Systemic Risk Surveillance and Crisis Management Deutsche Bundesbank

Selama 2012, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami berbagai isu terkini terkait dengan pelaksanaan tugas bank sentral.

During 2012, Bank Indonesia organised and hosted a number of seminars/workshops in order to boost the competence of human resources in terms of their understanding of various recent issues relating to task implementation at the central bank.



Melalui penyesuaian organisasi dihasilkan arsitektur proses kerja fungsi utama Bank Indonesia, mekanisme perumusan kebijakan dan koordinasi yang lebih solid. The organizational restructuring undertaken by Bank Indonesia has created a new architecture of major business process, a solid decision making process as well as more effective coordination.

Pengelolaan Organisasi

Dukungan kapabilitas internal memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Bank Indonesia selama 2012. Berbagai penyempurnaan dan penyesuaian manajemen internal dilakukan untuk mendukung arah dan strategi Bank Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada 2012 adalah penataan ulang organisasi Bank Indonesia. Penataan tersebut bertujuan untuk mendukung peran Bank Indonesia ke depan pasca-pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Bank Indonesia menata kembali Struktur Organisasi Level Atas (SOLA) dengan menyusun struktur dan peta proses bisnis di level tertinggi. Proses penyesuaian organisasi tersebut didasarkan pada prinsip *structure follows strategy and processes*. Dengan demikian, struktur organisasi tersebut mengakomodasi peran Bank Indonesia ke depan di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Melalui penyesuaian organisasi tersebut, dihasilkan pula arsitektur proses kerja fungsi utama Bank Indonesia dan mekanisme perumusan kebijakan serta koordinasi yang lebih solid lintas sektor dan area.

Penataan organisasi tersebut sekaligus merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk mengawal masa transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Hal tersebut diwujudkan dengan menyiapkan organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia yang merupakan *mirroring* organisasi pengawasan perbankan di OJK ke depan. Bank Indonesia juga membentuk *Task Force* Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK dan menugaskan sejumlah pegawai untuk melaksanakan fungsi *shared function* di OJK guna menyiapkan mekanisme kerja OJK.

Program penataan organisasi, diikuti dengan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan Program Penyelarasan Kultur sebagai bagian dari upaya mengawal perubahan organisasi. Untuk menunjang manajemen SDM-nya, di 2012 Bank Indonesia juga telah mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMASDAM) dengan sistem lainnya. Salah satu hasilnya yakni sentralisasi sistem penggajian baik yang dilaksanakan di kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

Organisational Management

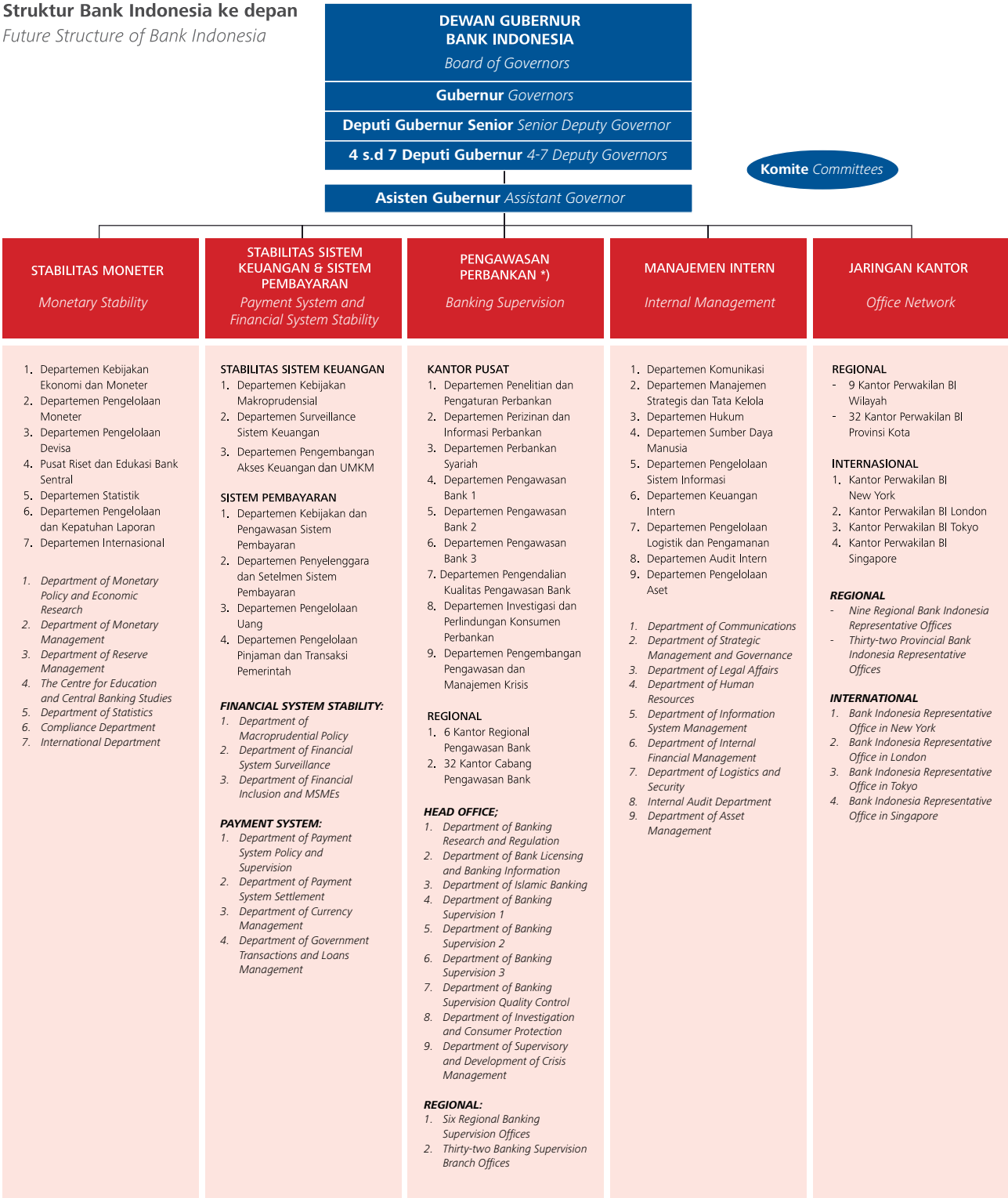
Supporting internal capacity played a key role in task implementation and performance achievements at Bank Indonesia in 2012. An array of adjustments and refinements to internal management were introduced during the reporting year to shore up the direction and policy of Bank Indonesia.

One strategic measure implemented during 2012 was organisational restructuring at Bank Indonesia. Restructuring aims to reinforce the future role of Bank Indonesia subsequent to the transfer of the banking supervision function to the Financial Services Authority (FSA). Bank Indonesia restructured the Top-Level Organisational Structure by formulating new organisational arrangements and mapping business processes at the highest administrative levels. The restructuring process at Bank Indonesia is based on the principles of *structure follows strategy and processes*. Therefore, the new organisational structure accommodates the future role of Bank Indonesia in the monetary sector, as well as in terms of financial system stability and the payment system. Organisational restructuring has produced a more solid work process architecture for the core purposes of Bank Indonesia as well as a policymaking and coordination mechanism across sectors and areas.

Organisational restructuring also represents Bank Indonesia commitment to oversee the transition period for the transfer of the banking supervision function to the FSA. This was realised through preparations for banking sector organisation at Bank Indonesia that mirror those at the FSA in future. Furthermore, Bank Indonesia also established a Task Force for the transfer of the banking supervision function from Bank Indonesia to the FSA and assigned a number of employees with implementing a shared function at the FSA in preparation of the FSA work mechanism.

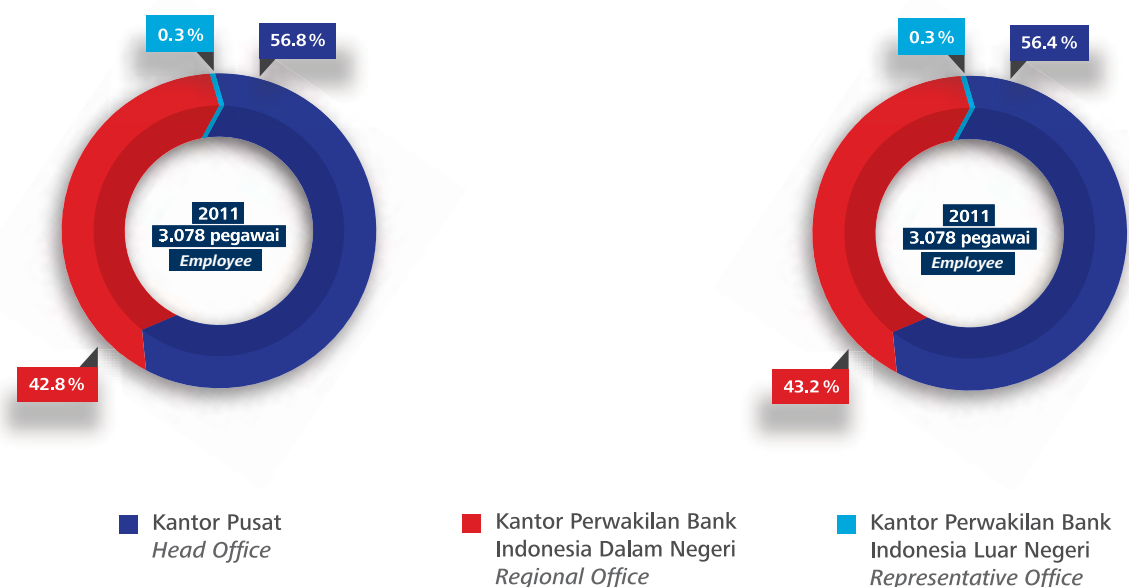
The organisational restructuring program was followed by initiatives to ensure adequate human resources of high quality. In addition, Bank Indonesia also continued its Culture Harmonisation Program as part of the efforts to oversee organisational change. In 2012, Bank Indonesia integrated its Human Resources Information Management System (SIMASDAM) with other systems in order to support the management of human resources. One outcome is centralisation of the payroll system at head office and representative offices.

Struktur Bank Indonesia ke depan
Future Structure of Bank Indonesia



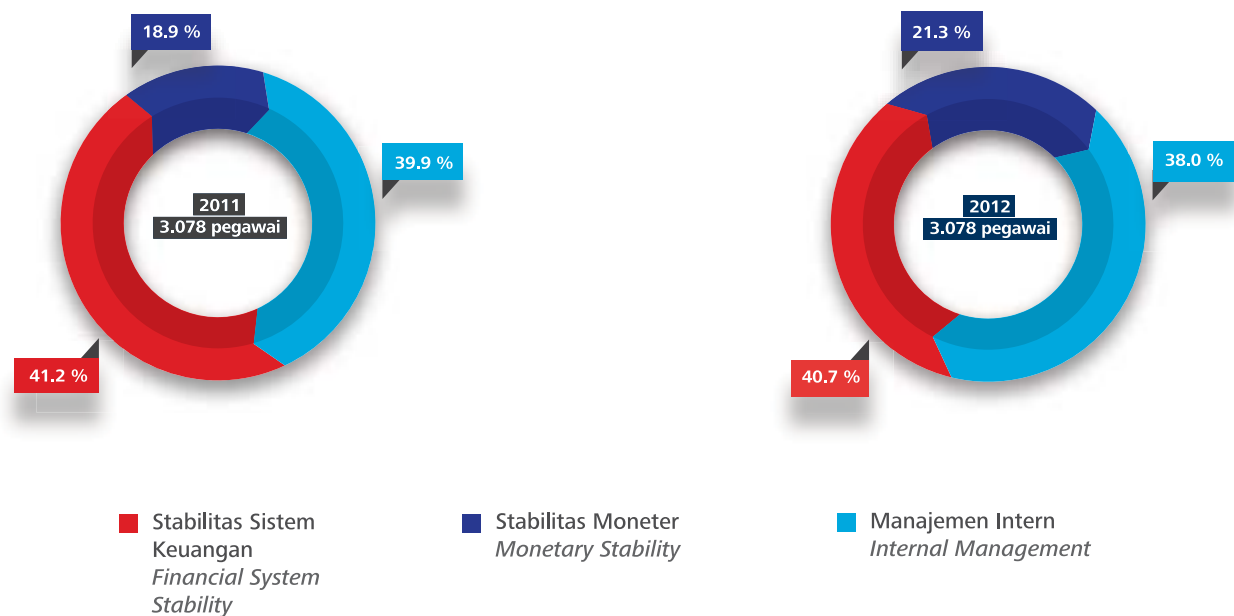
Berdasarkan Lokasi Penugasan

Based on Location



Berdasarkan Bidang Penugasan di Kantor Pusat

Based on Assignments at Head Office



Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, Bank Indonesia mengelola keuangan secara terencana dan akuntabel. Guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, aspek pengelolaan keuangan Bank Indonesia diperkuat dengan diterapkannya *Performance Based Budgeting* pada 2012. Melalui metoda tersebut, Bank Indonesia meningkatkan integrasi sistem perencanaan strategis dengan sistem anggaran. Dengan demikian kontribusi penggunaan anggaran Bank Indonesia terhadap pencapaian tugas diharapkan menjadi dapat diukur lebih jelas.

Selain itu, Bank Indonesia juga mulai menerapkan standar cost secara bertahap dalam penyusunan program kerja dan anggarannya. Seluruh upaya ini dilaksanakan guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran Bank Indonesia baik dari sisi sisi efektivitas maupun efisiensinya. Selanjutnya, seluruh satuan kerja akan mengimplementasikan rencana program kerja dengan disertai pelaksanaan *review* secara berkala.

Salah satu bentuk pengakuan tata kelola yang baik terhadap pengelolaan keuangan internal Bank Indonesia, yakni diberikannya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTB) 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini tersebut memiliki arti bahwa LKTBI dinyatakan bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan Bank Indonesia sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan yang kesepuluh kali diraih oleh Bank Indonesia sejak tahun 2003. Pencapaian opini tersebut penting tidak hanya dari sisi akuntabilitas anggaran, namun juga berkontribusi positif terhadap kredibilitas kebijakan Bank Indonesia.

Pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia juga tidak terlepas dari aspek pengelolaan sistem informasi yang efektif dan terencana. Untuk itu, Bank Indonesia melanjutkan berbagai program pengembangan sistem informasi dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Sistem Informasi Bank Indonesia yang dilaksanakan mulai 2011 hingga 2014. Sementara untuk menjamin keberlangsungan kegiatan, Bank Indonesia menyiapkan program Manajemen Kelangsungan Kegiatan Bank Indonesia (MKK-BI). Melalui program tersebut, Bank Indonesia berupaya memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat berbagai insiden termasuk bencana. Dengan demikian, gangguan tersebut tidak menghambat operasional Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya termasuk memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat.

Bank Indonesia utilises planned and accountable financial management to support effective and efficient task implementation. Furthermore, aspects of financial management were strengthened by Bank Indonesia through the application of Performance Based Budgeting in 2012 in order to emphasise budgetary accountability. Through that method, Bank Indonesia successfully integrated the strategic planning system with the budgeting system. Consequently, the budgetary contribution to task achievement at Bank Indonesia will be more clearly measurable.

Bank Indonesia also started to gradually implement standard costs when formulating its work program and budget. Such efforts are implemented to raise the level of budgetary accountability at Bank Indonesia in terms of effectiveness and efficiency. Furthermore, all work units will implement planned work programs accompanied by periodic reviews.

One way in which good corporate governance is acknowledged at Bank Indonesia in terms of internal financial management is through the unqualified opinion given by the Audit Board of the Republic of Indonesia for the 2012 Bank Indonesia Financial Report (LKTBI). An opinion that is unqualified means that the 2012 Bank Indonesia Financial Report gives a true and fair view of the financial position of Bank Indonesia in accordance with prevailing accounting standards. An unqualified opinion has now been given for 10 consecutive years since 2003. The achievement of an unqualified opinion is important not only in terms of budgetary accountability but also contributes favourably to the policy credibility of Bank Indonesia.

Bank Indonesia's achievements in terms of performance and task implementation are also inseparable from planned and effective information system management. In this context, Bank Indonesia continued a number of information system development programs that began in 2011 and will be completed in 2014. Meanwhile, to maintain business continuity Bank Indonesia formulated Business Continuity Management (MKK-BI). Through this program Bank Indonesia strives to mitigate risk that might emerge due to a range of incidents, including disasters. Therefore, such disruptions do not impede Bank Indonesia in its task implementation, including providing services to the banking sector and the general public.

Bank Indonesia dan Publik *Bank Indonesia and Public*

Efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia tidak terlepas dari peran publik. Untuk itu, Bank Indonesia secara transparan mengkomunikasikan kebijakan yang telah diambil, sekaligus memberikan edukasi kepada publik untuk menciptakan *public awareness* dan *public understanding*. Keterlibatan Bank Indonesia dengan publik tidak hanya sebatas mengkomunikasikan kebijakan, tetapi juga peduli dengan kondisi sosial masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan.

The efficacy of policy implementation at Bank Indonesia is inextricably linked to the role of the general public. In this context, Bank Indonesia transparently communicates the policies taken, while simultaneously educating the general public in order to raise public awareness and create public understanding. Bank Indonesia's relationship with the general public is not merely limited to communicating policy but also involves caring about the social condition of the general public in order to sustainably ameliorate public welfare.

Bank Indonesia dan Publik

Bank Indonesia and Public



Dalam program edukasi kebanksentralan, Bank Indonesia mengembangkan kerjasama dengan kalangan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. In cultivating the understanding of central bank, Bank Indonesia develop cooperation with education authorities from the elementary up to tertiary level education

Bagi Bank Indonesia, komunikasi kebijakan yang dilakukan melalui berbagai media tidak hanya memenuhi pilar transparansi bank sentral, tetapi telah menjadi bagian dari piranti kebijakan. Program komunikasi yang secara intens dilakukan Bank Indonesia memberikan kontribusi positif dalam mengarahkan ekspektasi masyarakat dan menjaga persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fundamental ekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Komunikasi dan edukasi kebijakan dilakukan melalui berbagai media, antara lain penyampaian publikasi, siaran pers, pidato Dewan Gubernur, konferensi pers, dan pencantuman data dan informasi melalui website Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada *stakeholders* yang terkait langsung dengan kebijakan (misal: perbankan, asosiasi, kalangan industri, investor dan akademisi) maupun kepada masyarakat melalui pesan layanan masyarakat di berbagai media komunikasi.

Komunikasi kebijakan juga dilakukan melalui forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, serta rapat

At Bank Indonesia, policy is communicated through an array of media not only to meet the transparency pillar of the central bank but also as a wider part of the policy tools. The intense communication program conducted by Bank Indonesia contributes favourably to guiding public expectations and maintaining the perception of market players regarding economic fundamentals and the financial system in Indonesia.

Policy communication and education is achieved through a variety of media, including the publication of research, press releases, speeches made by the board of governors and press conferences as well as posting data and information on Bank Indonesia's official website. Additionally, Bank Indonesia also engages in socialisation activity, education and training of stakeholders directly related to policy (for instance: the banking industry, various associations, industry groups, investors and academia) as well as the general public through a public message service using a range of communication media.

Policy communication is also achieved through working meetings and hearings with the House of Representatives,

koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi dengan lembaga negara lain melalui berbagai forum diantaranya Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) dan Forum Penghubung Antar Lembaga Negara (8 lembaga negara dan Sekretariat Negara).

Selain melakukan komunikasi mengenai berbagai kebijakan Bank Indonesia, upaya untuk memberikan pemahaman dilakukan melalui program edukasi kebanksentralan. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan kerjasama dengan kalangan pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bersama dengan beberapa perguruan tinggi, Bank Indonesia mengembangkan kerjasama pengajaran kebanksentralan, kegiatan Training of Trainers (TOT) kebanksentralan bagi dosen, pemberian bantuan dana penelitian, kegiatan magang bagi mahasiswa khususnya di bidang penelitian. Untuk tingkat menengah, dilaksanakan beberapa Lokakarya kebanksentralan untuk guru SMA/SMK bidang studi ekonomi, sedangkan untuk tingkat dasar dan menengah pertama diselenggarakan Olimpiade Perbankan.

Selain kepada kalangan pendidikan, program edukasi juga dilakukan bagi kalangan media. Untuk itu, Bank Indonesia menggulirkan program Bincang Bareng Media. Melalui program tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk memberikan pemahaman kebanksentralan atau pelaksanaan tugas Bank Indonesia termasuk kebijakan yang diterbitkan secara menyeluruh kepada kalangan media.

Selain melakukan komunikasi langsung, penyampaian informasi mengenai Bank Indonesia dan kebijakannya disalurkan melalui media cetak dan media *online*, termasuk melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id). Tidak ketinggalan, Bank Indonesia juga memanfaatkan media jejaring sosial seperti Twitter.

Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Bank Indonesia juga mengelola Museum Bank Indonesia yang berlokasi di kawasan kota lama Jakarta. Pengelolaan museum tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan gedung tua bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Prestasi yang membanggakan berhasil diraih oleh Museum Bank Indonesia. Pada 2012, Museum Bank Indonesia memperoleh predikat Museum Terbaik 2012 Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan tersebut melengkapi predikat sebagai Museum Terfavorit di Indonesia pada 2011 yang diberikan oleh Majalah National Geographic Traveler.

as well as coordination meetings with the government. In addition, Bank Indonesia also communicates with institutions in other countries through an array of fora, including a Coordination Agency for Government Relations (Bakohumas) and a State Inter-Agency Liaison Forum (with eight state institutions and the State Secretariat).

On top of communicating the various Bank Indonesia policies instituted, a central banking education program also aims to help broaden understanding. Through this activity, Bank Indonesia builds cooperation with education authorities from the elementary level up to tertiary education. In conjunction with a number of colleges, Bank Indonesia builds cooperation to teach central banking studies through the training of trainers (TOT) for lecturers, as well as the provision of research funds and apprentice programs, especially in the field of research. At the middle level, central banking workshops are organised for the teachers of economics to secondary school students. Finally, at the elementary and junior high school level, Bank Indonesia hosts the Banking Olympics.

In addition to education authorities, the education program is also conducted in conjunction with the media. To this end, Bank Indonesia initiated talk shows with the media. Through this program of talk shows, Bank Indonesia hosts educational activities with the media on central banking and task implementation at Bank Indonesia, including the overall policies issued.

In addition to direct communication, information on Bank Indonesia and its policies is also distributed through print media and online through Bank Indonesia's official website (www.bi.go.id). Furthermore, Bank Indonesia also exploits social media, like Twitter, to deliver pertinent information.

To help Bank Indonesia ingratiate itself with the general public, the Central Bank also manages the Bank Indonesia Museum located in the Old Town of Jakarta. Managing the Bank Indonesia Museum also supports government efforts to conserve historical buildings as cultural heritage. This is a proud achievement for the Museum. In 2012, the Bank Indonesia Museum was declared the Best Museum in Jakarta. This honour complements the accolade of Favourite Museum in Indonesia in 2011 awarded by the National Geographic Traveller Magazine.

Selain melalui museum, Bank Indonesia juga membuka layanan Perpustakaan Bank Indonesia yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Disamping itu, secara rutin Bank Indonesia menerima kunjungan dari sekolah/ perguruan tinggi/ instansi baik dari dalam maupun luar negeri ke Kantor Pusat untuk menggali pengetahuan mengenai lembaga dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga melakukan komunikasi kebijakan dengan *stakeholders* internasional seperti investor dan lembaga pemeringkat. Fungsi tersebut dilakukan oleh *Investor Relation Unit* (IRU) yang mulai dibentuk oleh Bank Indonesia sejak 2005. Upaya komunikasi ini khususnya bertujuan untuk meningkatkan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia, sehingga membuka peluang investasi yang lebih luas di Indonesia. Komunikasi yang dilakukan dengan lembaga pemeringkat juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia pada 2012. Guna memberikan akses informasi yang lengkap kepada investor, Bank Indonesia juga menyediakan data dan informasi ekonomi Indonesia terkini melalui *website* IRU Bank Indonesia.

Selain melakukan komunikasi dan edukasi, Bank Indonesia sebagai bagian dari komunitas sosial berupaya agar keberadaannya memberikan manfaat lebih bagi publik. Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), digulirkan beberapa program kemasyarakatan baik yang bersifat pemberdayaan maupun bantuan untuk menangani masalah sosial di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan serta penanggulangan bencana alam.

Pada program pemberdayaan masyarakat, Bank Indonesia berupaya agar kualitas hidup masyarakat di wilayah tertentu meningkat dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial. Melalui pemberian bantuan modal, pendampingan dan pelatihan diharapkan masyarakat setempat memiliki peluang untuk maju. Adanya peluang dan kemauan berusaha dari masyarakat setempat diharapkan akan melahirkan sebuah keberhasilan.

Pada 2012, PSBI diprioritaskan pada pengembangan sektor riil, UMKM dan ekonomi regional. Dengan demikian, selain bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program tersebut mendukung penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penentuan jenis bantuan program pemberdayaan ekonomi di suatu wilayah didasarkan pada kajian dan pertimbangan dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan kelompok

In addition to the Museum, Bank Indonesia also runs a library open to the general public. Furthermore, Bank Indonesia also regularly receives visitors from domestic and international schools, colleges and institutions to Head Office for those seeking to acquire knowledge regarding the institutions of Bank Indonesia as well as task implementation.

Bank Indonesia also communicates policy to international stakeholders, like investors and rating agencies. The Investor Relation Unit (IRU) formed by Bank Indonesia in 2005 performs this function. Such communications specifically aim to garner positive perceptions regarding the Indonesian economy, hence opening broader opportunities for investment in Indonesia. Moreover, communication undertaken with rating agencies during the reporting period and beyond contributed positively to the re-affirmation of Indonesia's sovereign credit rating in 2012. Bank Indonesia also provides up-to-date data and information regarding the economy of Indonesia through the IRU section on Bank Indonesia's official website in order to provide full access to information for investors.

In addition to communication and educational activities, as a part of its social responsibility, the presence of Bank Indonesia is presumed to ameliorate public well being. A range of community empowerment and outreach programs are implemented through the Bank Indonesia Social Program (BISP) in order to tackle social issues in the areas of education, health, the environment, culture, religion as well as countermeasures against natural disasters.

Through public empowerment programs, Bank Indonesia strives to ameliorate the quality of life for communities in certain areas by paying due consideration to developing economic sectors with unrealised potential. Through the provision of capital assistance, mentoring and training activities, local communities have the opportunity to advance. Such opportunities, coupled with the desire of local communities, are expected to produce numerous success stories.

In 2012, Bank Indonesia Social Responsibility (PSBI) was prioritised to develop the real sector, MSMEs and local economies. Consequently, in addition to the benefit of enhancing public welfare, Bank Indonesia Social Responsibility underpinned the achievement of sustainable economic expansion. Determining which type of assistance to provide through the economic empowerment program is based on reviews and considerations involving the local

asaran. Pola dan mekanismenya juga dirancang agar bantuan dapat berhenti pada suatu kurun waktu tertentu.

Di bidang pengembangan ekonomi regional, beberapa kegiatan yang dilakukan melalui PSBI diantaranya program klaster sapi di wilayah Kendari, komoditas lele di Tanjungpinang, Batam dan Desa Wisata di wilayah Bali. Selain itu juga dikembangkan produksi pakan ternak dan pengembangan embrio UMKM tekstil di wilayah Bandung.

Bank Indonesia juga masih melanjutkan program yang disebut sebagai Desa Kita yang telah dimulai sejak tahun 2010 dan 2011. Kedua desa yang masih dalam binaan Bank Indonesia hingga 2012 adalah Desa Srikaton di Bengkulu serta Dusun Wael dan Desa Nurue di Ambon. Di Desa Srikaton dikembangkan peternakan ayam petelur, lele dan usaha pembiakan jamur tiram. Sedangkan di Dusun Wael dan Desa Nurue dijadikan sentra budidaya rumput laut dan ikan kerapu. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari sisi ekonomi tersebut, didukung dengan perbaikan kualitas hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur, misal sumur bor, saluran air dan bank penampungan air bersih.

Di bidang pendidikan, Bank Indonesia memberikan bantuan pengembangan sarana prasarana pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi, dan pendidikan bagi anak-anak cacat dan anak jalanan. Di bidang sosial dan keagamaan, Bank Indonesia memberikan dukungan perbaikan sarana ibadah di berbagai wilayah di antaranya Denpasar, Manado dan Bekasi. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, Bank Indonesia memberikan bantuan tanggap darurat, di antaranya kepada korban bencana banjir bandang di Serang dan Pasaman, Sumatera Barat, korban bencana angin puting beliung di Sidrap, Sulawesi Selatan, korban lahar dingin Gunung Gamalama di wilayah Maluku Utara dan korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat serta Kampung Dukuh Bandung.

government, as well as academics and the target group. The pattern and mechanism of assistance is also designed to be phased out after a given period of time.

With reference to local economic development, a number of activities have been rolled out through Bank Indonesia Social Responsibility, including the development of beef and dairy cattle clusters in Kendari, catfish commodities in Tanjung Pinang and Batam as well as Tourist Villages in Bali. Furthermore, animal feed production was developed along with embryonic textile MSMEs in Bandung.

Bank Indonesia is also continuing its Our Village program implemented during 2010 and 2011. The two villages involved with this program through 2012 were Srikaton village in Bengkulu as well as Wael and Nurue villages in Ambon. Poultry farming, catfish aquaculture and oyster mushroom cultivation were developed in Srikaton village, while Wael and Nurue villages have become centres of seaweed cultivation and grouper aquaculture. Efforts to economically ameliorate public welfare are supported by improvements in the quality of life. Such efforts were realised through infrastructure development, like drilling wells, drains and clean water storage.

From an educational perspective, Bank Indonesia provided development assistance for educational infrastructure from the elementary level up to the collegial level as well as for children with disabilities and street children. In terms of religious and social affairs, Bank Indonesia provided support through improvements to places of worship in a number of regions, including Denpasar, Manado and Bekasi. In addition, as a form of concern for the victims of natural disasters, Bank Indonesia provided emergency response assistance, among others, to victims of flooding in Serang and Pasaman, West Sumatera, victims of tornados in Sidrap, South Sulawesi, victims of volcanic mudflows from Gamalama Volcano in North Maluku and victims of house fires in Tambora, West Jakarta and Dukuh Village in Bandung.

Bank Indonesia turut mendukung
Bank Indonesia advocated

393

program pengembangan
ekonomi dan UMKM
*economic and MSME
development programs*

147

mahasiswa dididik sebagai
calon wirausaha melalui
program Penciptaan
Wirausaha Baru

*students were educated as
prospective entrepreneurs
through the Create New
Entrepreneurs Program*



248.583

orang mengunjungi Museum Bank Indonesia.
Jumlah pengunjung tersebut meningkat
pesat dalam tiga tahun terakhir dari
sebelumnya

*Visitors of Bank Indonesia museum. The number of
visitors to the museum has increased dramatically
over the past three years*

218.228

pengunjung pada 2011
visitors in 2011

173.509

pengunjung pada 2010
visitors in 2010

3.040

beasiswa
scholarships

diberikan kepada mahasiswa
dari 68 PTN di seluruh Indonesia
yang tergabung dalam GenBI
(Generasi Baru BI)

*were awarded to students from 68
State Universities throughout
Indonesia in connection with the
GenBI program (Generasi Baru or
New Generation).*

9.673

orang
participants

mengikuti program Kunjungan Masyarakat ke
Kantor Pusat BI dalam 90 rangkaian kegiatan
yang diikuti oleh berbagai kalangan pelajar dan
instansi pemerintah

*of the Public Visitor Program to Bank Indonesia Head
Office through 90 sets of activities attended by
a number of students and government institutions*

Jumlah pengunjung Perpustakaan Bank
Indonesia selama 2012 sebanyak
*Number of visitors to the Bank Indonesia
Library in 2012 as much as*

10.015 orang
visitors

Bank Indonesia melakukan kegiatan pengajaran
sebanyak 88 kali kunjungan di berbagai
perguruan tinggi di Indonesia

*Bank Indonesia visited colleges in Indonesia 88 times
in 2012 to provide educational activities*



Akun twitter
Bank Indonesia memiliki
*Bank Indonesia's
Twitter Account has*
27.194
followers

Desa Wisata: Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Kearifan Budaya

Tourist Villages: Community Economic Development through Cultural Wisdom

Bali mempunyai daya tarik luar biasa di sektor pariwisata, salah satunya karena Pulau Dewata itu berhasil menjaga kearifan budaya. Kekuatan inilah yang dilihat Bank Indonesia untuk mengembangkan Desa Wisata di Bali sebagai salah satu program sosial yang berbasis ekonomi.

Program tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2012. Bali yang terkenal sebagai tujuan utama pariwisata di Indonesia dinilai masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Di balik hingar-bingar pariwisata, Bali menyimpan beberapa persoalan mendasar. Salah satu permasalahan utama adalah tidak meratanya pembangunan di Bali, dan kue ekonomi yang belum terbagi secara merata kepada masyarakat. Roda pariwisata cenderung lebih digerakkan oleh hotel, travel agent dan restoran yang dimiliki pengusaha besar dan pedagang perantara. Secara regional, pusat pengembangan pariwisata juga masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Badung khususnya Badung Selatan terutama area Kuta, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua.

Mencermati kondisi itu, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) berupaya membantu memberikan solusi nyata melalui pengembangan Desa Wisata. Program Desa Wisata dilaksanakan bekerjasama dengan Bali Hotel Association (BHA) dan masyarakat setempat. Terdapat tujuh desa yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Bali, yang dilibatkan dalam program tersebut yakni Desa Bedulu, Desa Pancasari, Desa Blimbingsari, Desa Penglipuran, Desa Jasri, Desa Pinge dan Desa Budakeling.

Desa-desa tersebut dipilih karena memiliki keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa fisik lingkungan, alam perdesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan. Alasan dikembangkannya desa wisata berbasis masyarakat ini didasarkan pada fakta masih belum maksimalnya pemanfaatan tenaga masyarakat dan keunikan desa dalam mendukung pariwisata Bali. Hal ini merupakan fakta yang cukup menyedihkan, mengingat masyarakat desa di Bali memiliki keunikan yang bernilai jual tinggi, baik dari sisi kuliner, gaya hidup, dan budaya. Melalui pengembangan desa wisata ini, diharapkan masyarakat desa dapat terlibat dalam pengembangan desanya. Selain itu, program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian setempat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diterapkan beberapa strategi klaster yaitu (i) Model klaster Obyek Daya Tarik Wisata, (ii) Model klaster Desa Wisata dengan desa terkait

Bali has an indomitable allure and charm in the tourism sector, in part due to the success of maintaining cultural wisdom on the Island of Gods. This strength was recognised by Bank Indonesia in terms of developing tourist villages on Bali as part of the economic-based social responsibility program.

Development of this program began in 2011 and was continued in 2012. Bali, famous as the main tourist destination in Indonesia, still has unrealised potential for development. Behind the frenetic tourism, Bali has a number of fundamental problems. One of the most binding constraints is uneven development, with the economic pie unevenly distributed among the local community. Large-scale hotels, travel agents and restaurants that use intermediaries generally turn the wheels of tourism in Bali. Regionally, the centre of tourism development is concentrated in Badung regency, more specifically in South Badung encompassing Kuta, Seminyak, Jimbaran and Nusa Dua.

Observing such conditions, Bank Indonesia, through its representative office in Area III (Bali and Nusa Tenggara), strived to provide a real social solution through the development of Tourist Villages. The tourist village program is implemented in conjunction with the Bali Hotel Association (BHA) and local communities. Seven locations spread all over the island of Bali were selected for participation in the program, namely Bedulu village, Pancasari village, Blimbingsari village, Penglipuran village, Jasri village, Pinge village and budakeling village.

The villages were selected due to their uniqueness and special appeal, in terms of the physical environment, rural nature or socio-cultural aspects. The reason for developing community-based tourist villages is due to the fact that community manpower is still not optimally utilised in rural areas as well as the uniqueness of the villages to support tourism in Bali. This makes for slightly depressing reading considering that local communities in Bali have a high-value uniqueness in terms of their cuisine, lifestyle and culture. Through the development of tourist villages, local communities are expected to become involved with community development. Additionally, this program is expected to absorb local manpower and create a multiplier effect on the local economy.

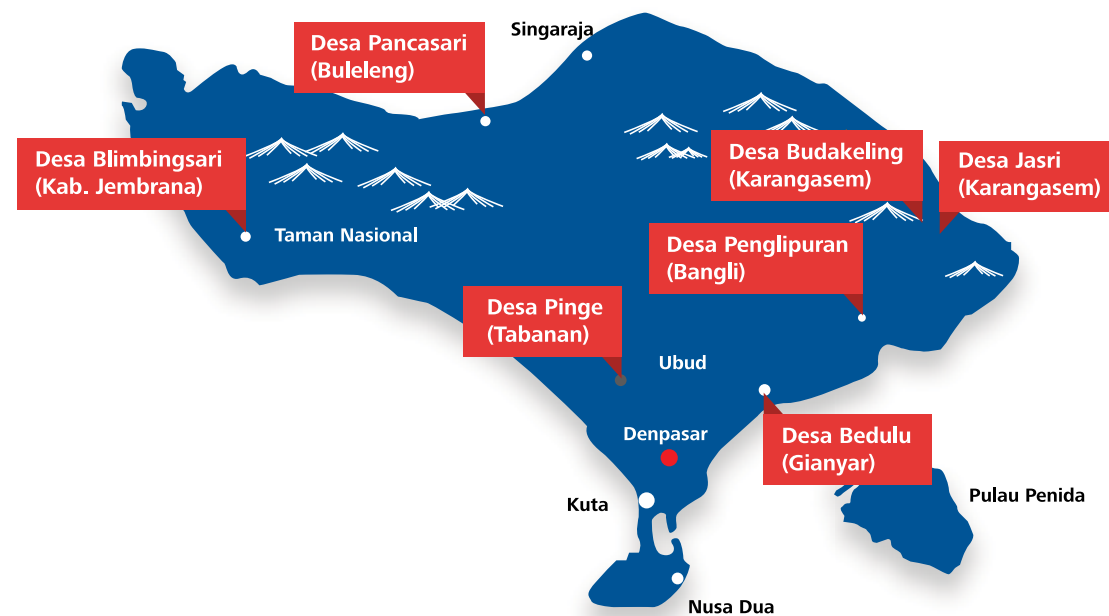
A number of cluster strategies were applied to ensure achievement of the goals of the program as follows: (i) a cluster model for tourist attractions; (ii) a cluster model for

lainnya dan (iii) Model klaster Usaha Pariwisata dengan desa terkait di sekitarnya (Kemitraan Usaha Pariwisata). Pada strategi pertama, Desa Wisata dijadikan sebagai obyek daya tarik wisata. Pada strategi kedua, Desa Wisata diposisikan sebagai katalis pengembangan ekonomi bagi desa-desa di sekitarnya, yang bisa menjadi pemasok bahan baku kerajinan dan kesenian lokal bagi Desa Wisata. Sedangkan pada strategi ketiga, Desa Wisata diarahkan untuk menjadi usaha pariwisata yang berskala besar berbasis UMKM/koperasi/suppliers sehingga desa-desa yang berada di sekitar bisa menjadi pemasok bagi usaha pariwisata tersebut.

Selain memberikan pelatihan, Bank Indonesia juga mendukung penyediaan fasilitas pendukung kesenian, renovasi fasilitas wisata dan tempat kerajinan, perlengkapan manajemen usaha, perlengkapan penginapan, perbaikan jalan *tracking*, renovasi toilet, dan *tourist management center* di ketujuh desa tersebut. Bantuan yang diberikan melalui Program Sosial Bank Indonesia kepada tujuh Desa Wisata tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi secara merata di Bali.

tourist villages linked to other similar villages; (iii) a cluster model for tourist-related businesses with related villages in the environs (Tourism Business Partnerships). According to the first strategy, the respective tourist village becomes a tourist attraction. With the second strategy, the respective tourist village is positioned as a catalyst of local economic development for surrounding villages, which could supply raw materials for handicrafts and artwork local to the tourist village. The third strategy involves positioning the tourist village as a large-scale tourism business based on MSMEs, cooperatives and suppliers, thereby engaging the surrounding villages as suppliers for the central tourism business.

On top of organising training, Bank Indonesia also provides facilities to support the arts, helps renovate tourist facilities and handicraft workshops, provides equipment for business management and lodging facilities, restores trekking routes, renovates toilet facilities and has built a tourist management centre in each of the seven villages. The assistance provided through the Bank Indonesia Social Responsibility Program to the seven tourist villages is expected to trigger equitable economic and tourism development in Bali.



Outlook dan Strategi ke Depan *Outlook and Strategy Looking Ahead*

Pelaksanaan tugas dan strategi yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia ke depan dipengaruhi oleh kondisi dan tantangan yang dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilannya tidak saja ditentukan oleh seberapa baik perencanaan dan implementasi yang dilakukan, namun juga dipengaruhi oleh penerimaan publik terhadap *stance* kebijakan Bank Indonesia. Penyampaian *outlook* dan strategi Bank Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan kepada publik bagaimana kondisi ke depan dan kebijakan apa yang akan dilakukan. Melalui penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat mereduksi ketidakpastian sehingga publik lebih memahami kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Looking ahead, Bank Indonesia task implementation and strategy will be influenced by the conditions and challenges faced in the years ahead. Success is not merely determined by how well the planning and implementation processes are managed, but also by how well the general public receive Bank Indonesia's policy stance. Elaborating upon Bank Indonesia's future task implementation and strategy is one effort to clarify with the general public future conditions and policies in order to combat uncertainty and furnish the general public with a greater understanding of Bank Indonesia policy moving forward.

Outlook dan Strategi Ke Depan

Outlook and Strategy Looking Ahead

Outlook Perekonomian

Kinerja perekonomian tahun 2013 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2012. Permintaan domestik diprediksi masih menjadi kontributor utama membaiknya pertumbuhan ekonomi baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Kontribusi ekspor diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2012, seiring meningkatnya permintaan ekspor sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi dan kenaikan harga komoditas internasional. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor pengangkutan dan komunikasi, diperkirakan masih menjadi penunjang utama kinerja perekonomian nasional.

Inflasi pada 2013 diperkirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi 4,5%+1%. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia pada 2013 serta terus meningkatnya kinerja perekonomian domestik, inflasi diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2012. Namun inflasi masih terkendali dan berada dalam rentang target inflasi. Meskipun tekanan inflasi dari sisi permintaan meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik, kapasitas produksi diperkirakan masih dapat mengimbangi peningkatan permintaan tersebut. Dengan demikian, dampaknya terhadap kenaikan harga relatif terbatas. Selain itu, terkendalinya inflasi pada 2013 juga didukung oleh membaiknya ekspektasi masyarakat.

Prospek perekonomian 2013 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Faktor yang dapat membawa kinerja pertumbuhan ekonomi pada kisaran bawah adalah lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia. Lemahnya perekonomian dunia akan mengurangi permintaan barang-barang ekspor Indonesia sehingga dapat menurunkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, harga komoditas yang rendah dapat mengurangi insentif untuk melakukan ekspor akibat menurunnya margin eksportir.

Sementara dari sisi inflasi, beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan inflasi adalah kendala pasokan dan produksi bahan makanan, kenaikan harga energi dan harga bahan

Economic Outlook

Economic performance in 2013 is predicted to improve upon conditions in 2012. Domestic demand is projected to remain the primary contributor to robust economic growth in terms of consumption and investment. Exports are expected to contribute more in 2013 in line with a rebound in demand for exports stemming from stronger global economic growth and rising international commodity prices. The manufacturing industry, trade sector, hotels and restaurants, as well as transportation and communication are expected to become the drivers of national economic performance.

Inflation in 2013 is projected to remain within its target corridor of 4.5%±1%. Notwithstanding, headline inflation is expected to be slightly higher in 2013 compared to the previous year as a result of the ongoing global economic recovery as well as the expected improvement in economic performance. Inflation will, however, remain under control and within its target corridor. Although inflationary pressures will escalate on the demand side in line with strong domestic demand, production capacity should be adequate to offset the increase in demand. Therefore, the impact on higher prices will be reactively limited. Furthermore, controlled inflation in 2013 will also be supported by improvements in public expectations.

The manifestation of economic prospects in 2013 depends heavily upon a variety of risk factors, externally and domestically. Weak global economic growth and world trade volume could bring domestic economic growth to the lower end of the projected range. A languid global economy will erode demand for exported goods from Indonesia and thereby undermine the contribution of exports to national economic growth. In addition, low commodity prices will reduce incentives to export due to narrower margins.

With reference to inflation, a number of risk factors could exacerbate the rate of inflation, like constraints in the production and supply of foodstuffs, energy price

makanan internasional. Selain itu, risiko inflasi juga dapat berasal dari ketidakpastian pemulihan ekonomi global yang berpotensi memicu tekanan nilai tukar rupiah.

Strategi Ke Depan

Dengan mengamati berbagai perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia akan menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga keseimbangan eksternal dan mengarahkan inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Di bidang moneter, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilarnya, yaitu kebijakan suku bunga, nilai tukar, kebijakan makroprudensial, komunikasi, dan koordinasi. Terkait koordinasi, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan Protokol Manajemen Krisis (PMK) termasuk menyelaraskan dengan PMK Nasional. Kebijakan lain yang akan ditempuh adalah pendalaman pasar keuangan guna mendukung pengelolaan likuiditas di pasar domestik secara lebih optimal.

Di bidang perbankan, fokus utama kebijakan masih diarahkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga berupaya agar perbankan domestik memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih baik, serta mendorong agar fungsi intermediasi tetap dilaksanakan secara optimal. Mendekati pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK pada akhir 2013, Bank Indonesia juga akan semakin memantapkan proses pengalihan fungsi tersebut sehingga proses pengawasan bank tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia mengupayakan agar interkoneksi sistem pembayaran dapat diwujudkan guna meningkatkan efisiensi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan mendorong terciptanya interoperabilitas penyelenggara ATM dan kartu debit. Selain itu, Bank Indonesia akan mendorong kerja sama perbankan dengan sektor telekomunikasi untuk mengembangkan *mobile payment* guna mendukung operasional *branchless banking*.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya ke depan, Bank Indonesia akan memperkuat implementasi kerangka kerja kebijakan moneter yang terintegrasi dengan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, akan dipersiapkan

hikes and soaring international food prices. Furthermore, inflation risk could also stem from uncertainty surrounding the lacklustre global economic recovery, which could potentially trigger rupiah exchange rate pressures.

Strategy Looking Ahead

By observing a range of global and domestic economic conditions, Bank Indonesia will formulate appropriate policy to maintain external balances and steer inflation towards the predetermined target corridor. Consequently, sustainable economic growth is expected in the long run.

In the monetary sector, Bank Indonesia will continue to reinforce its policy mix through five main pillars, namely interest rate policy, exchange rate policy, macroprudential policy, communication and coordination. Relating to coordination, one effort to be continued will be the application of the Crisis Management Protocol (CMP), including harmonisation on a national scale. Another policy that will be followed is financial market deepening in order to foster optimal liquidity management on domestic markets.

In the banking sector, the primary focus will remain centred on maintaining financial system stability. Bank Indonesia will also strive to augment domestic bank resilience and competitiveness, as well as nurture optimal implementation of the intermediation function. Approaching the transfer of banking supervision to the Financial Services Authority at the end of 2013, Bank Indonesia will continue to refine the transfer process to ensure banking supervision is still performed without disruption.

In terms of the payment system, Bank Indonesia will continue efforts to realise an interconnected payment system in order to boost efficiency. To this end, Bank Indonesia will further encourage the creation of interoperable ATM and debit card providers. Additionally, Bank Indonesia will promote cooperation between the banking sector and telecommunications companies in order to develop mobile payments as part of the realisation of branchless banking.

Bank Indonesia will strengthen the implementation of a framework that integrates monetary policy with financial system stability in order to support effective task implementation looking ahead. In addition, business

bisnis proses yang terkait dengan fungsi Bank Indonesia ke depan yakni pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

Di bidang pengedaran uang, ketersediaan uang layak edar secara lebih luas menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia ke depan. Untuk itu, Bank Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi uang serta meningkatkan kualitas uang.

Pemberdayaan sektor riil dan pengembangan UMKM masih akan menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia ke depan. Dalam melakukan hal tersebut, Bank Indonesia akan semakin memperkuat sinergi dengan pihak terkait. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah akan lebih ditingkatkan perannya sebagai ujung tombak pengembangan sektor riil dan UMKM, khususnya dalam memetakan potensi ekonomi mikro di daerah masing-masing, menyiapkan dan melaksanakan program.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan strategi tersebut, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen internalnya. Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik juga akan senantiasa menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

processes will be prepared in relation to Bank Indonesia’s future core purpose, namely maintaining financial system stability.

Regarding the circulation of currency, greater availability of money fit for circulation is the overarching focus of Bank Indonesia policy looking forward. Against this backdrop, Bank Indonesia will introduce a number of efforts to boost the efficiency and effectiveness of money supply as well as improve the quality of money in circulation.

Real sector empowerment and MSME development will remain part of Bank Indonesia’s future strategy. In this context, Bank Indonesia will enhance synergy with relevant parties. Furthermore, Bank Indonesia Representative Offices will expand their role in local communities by spearheading real sector and MSME development, particularly in terms of mapping potential micro economies in each respective locale as well as preparing and implementing various programs.

Bank Indonesia is committed to continuously enhancing internal management capacity in order to ensure the effective implementation of the aforementioned strategy. Additionally, principles of good corporate governance will always form the foundation of Bank Indonesia’s tasks and authority.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

AMRO	: ASEAN+3 Macroeconomic Research Office	AMRO	: ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	APBN	: The State Budget
APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	APMK	: Card-based payment instruments
ASEAN	: The Association of South East Asian Nations	ASEAN	: The Association of South East Asian Nations
ASEAN+3	: ASEAN + Jepang, China, Korea	ASEAN+3	: ASEAN + Japan, China, Korea
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri	ATM	: Automated Teller Machine
Bakorhumas	: Badan Koordinasi Humas Pemerintah	Bakorhumas	: Coordination Agency for Government Relations
BI	: Bank Indonesia	BI	: Bank Indonesia
BI-RTGS	: Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	BI-RTGS	: Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
BI-SSSS	: Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System	BI-SSSS	: Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System
BIS	: Bank for International Settlement	BIS	: Bank for International Settlements
BOPO	: Biaya Operasional Pendapatan Operasional	BOPO	: Operational costs to operational income
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	BPK-RI	: The Audit Board of the Republic of Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat	BPR	: Rural bank
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	BPRS	: Islamic rural bank
BUS	: Bank Umum Syariah	BUS	: Islamic commercial bank
BSBI	: Badan Supervisi Bank Indonesia	BSBI	: Bank Indonesia Supervision Body
CAR	: Capital Adequacy Ratio	CAR	: Capital Adequacy Ratio
CEMA	: Capital Equivalency Maintained Assets	CEMA	: Capital Equivalency Maintained Assets
CMIM	: Chiang Mai Initiative Multilateralization	CMIM	: Chiang Mai Initiative Multilateralization
DF	: Deposit Facility	DF	: Deposit Facility
DHE	: Devisa Hasil Ekspor	DHE	: Foreign exchange export proceeds
DP	: Down Payment	DP	: Downpayment
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	DPR-RI	: The House of Representatives of the Republic of Indonesia
EMEAP	: The Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks	EMEAP	: The Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan	FKSSK	: The Financial System Stability Coordination Forum
Forstra	: Forum Strategis	Forstra	: Strategic Forum
FPJP	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek	FPJP	: Short-term funding facility
FPJPS	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah	FPJPS	: Islamic short-term funding facility
FTV	: Financing to Value	FTV	: Financing to Value
IHK	: Indeks Harga Konsumen	IHK	: Consumer Price Index
IKU	: Indikator Kinerja Utama	IKU	: Key performance indicators
IMF	: International Monetary Fund	IMF	: International Monetary Fund
IRU	: Investor Relations Unit	IRU	: Investor Relations Unit
KCBA	: Kantor Cabang Bank Asing	KCBA	: Foreign Bank Branch Office
KI	: Kredit Investasi	KI	: Investment credit

KK	: Kredit Konsumsi	KK	: Consumer loans
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor	KKB	: Automotive loans
KMK	: Kredit Modal Kerja	KMK	: Working capital credit
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah	KPR	: Mortgage loan
KPw BI	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia	KPW BI	: Bank Indonesia Representative Office
LKTBI	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia	LKTBI	: Annual Financial Report of Bank Indonesia
LTV	: Loan to Value	LTV	: Loan to Value
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN	MEA	: ASEAN Economic Community
MKK-BI	: Manajemen Kelangsungan Kegiatan Bank Indonesia	MKK-BI	: Bank Indonesia Business Continuity Management
MoU	: Memorandum of Understanding	MoU	: Memorandum of Understanding
NDF	: Non-Deliverable Forward	NDF	: Non-Deliverable Forward
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia	NKRI	: The Republic of Indonesia
NPF	: Non Performing Financing	NPF	: Non Performing Financing
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan	OJK	: Financial Services Authority
PDB	: Produk Domestik Bruto	PDB	: Gross Domestic Product
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur	PDG	: Board of Governors’ Regulation
PHR	: Perdagangan, Hotel dan Restoran	PHR	: Trade, Hotels and Restaurants
PMK	: Protokol Manajemen Krisis	PMK	: Crisis Management Protocol
PSBI	: Program Sosial Bank Indonesia	PSBI	: Bank Indonesia Social Responsibility
RDG	: Rapat Dewan Gubernur	RDG	: Board of Governor’s Meeting
SBN	: Surat Berharga Negara	SBN	: Tradeable government securities
SEACEN	: South East Asian Central Banks	SEACEN	: South East Asian Central Banks
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	SKNBI	: Bank Indonesia National Clearing System
SOLA	: Struktur Organisasi Level Atas	SOLA	: High-Level Organisational Structure
SPAMK	: Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja	SPAMK	: The Planning, Budgeting and Performance Management System
STKE	: Sistem Transfer Kredit Elektronik	STKE	: Electronic Credit Transfer System
TD	: Term Deposit	TD	: Term Deposits
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia	TKI	: Indonesian migrant workers
ToT	: Training of Trainers	ToT	: Training of Trainers
TPI	: Tim Pengendali Inflasi	TPI	: Inflation Control Team
TPID	: Tim Pengendali Inflasi Daerah	TPID	: Regional Inflation Control Team
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	: Medium, small and micro enterprises
UU	: Undang-Undang	UU	: Acts of law
UUS	: Unit Usaha Syariah	UUS	: Islamic Business Unit
UYD	: Uang yang Diedarkan	UYD	: Money in circulation
Valas	: Valuta Asing	Valas	: Foreign currency
yoy	: year on year	yoy	: Year-on-year
ytd	: year to date	ytd	: Year-to-date

Laporan Keuangan

Financial Report